

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014**

STANDAR BIAYA

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2013**



BUPATI PASAMAN BARAT



PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 43 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran 2014 perlu ditetapkan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2014.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokolier dan keuangan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

(1). Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Pasal 1

B A B I
KETENTUAN UMUM

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat;
21. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Pasaman Barat;
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Pasaman Barat;
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan staf ahli Kabupaten Pasaman Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 72 /PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

(1). Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014 tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat dapat mengajukan usul standar biaya khusus kepada Bupati Pasaman Barat melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang disertai dengan surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Khusus.

Pasal 3

- (a). referensi penyusunan prakiraan maju; dan/atau
 - (b). bahan penghitungan pagu indikatif SKPD tahun anggaran 2014.
- (3). Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2014 dapat berfungsi sebagai :
- (1). Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dalam Keputusan Bupati tersebut.
 - (2). Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dalam Keputusan Bupati SKPD (tahun anggaran 2014.
 - (1). Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran 2014.

Pasal 2

- (1). Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam BAB II huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun biaya komponen kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2014.
- (2). Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014 dapat berfungsi sebagai estimasi dan batas tertinggi.

Pasal 1

(a). Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014; dan
 (b). Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2014.

Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

**STANDAR BIAYA
 BAB II**

- (2). Standar Biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan biaya kegiatan, yang ditetapkan sebagai masukan.
- (3). Standar Biaya yang bersifat Khusus, selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
- (4). Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- (5). Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- (6). Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- (7). Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
- (8). Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 Nomor: 43.

H. EVITA MURNI, SE



Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada tanggal, 23 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH KAB. PASAMAN BARAT



Ditetapkan di Simpang Ampek

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 4

- (2). Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Format Surat Pernyataan Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pasaman Barat ini.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL : 2013

PERHAL : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

A. BELANJA BARANG/JASA

1. BELANJA TENAGA KONTRAK

(a). Belanja Tenaga Kontrak

Tenaga Kontrak setiap bulannya menerima sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah (Rp./Bulan) |
|----|----------------------------|--------------------|
| 1 | Jasa Tenaga Kontrak Daerah | 600.000,- |

Penjelasan

- Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah diberikan Kepada tenaga Kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian Belanja Tenaga Kontrak
- Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah dengan Kepala SKPD diketahui oleh Bupati Pasaman Barat.
- Penganggaran jasa bagi tenaga Kontrak Daerah dialokasikan dalam kegiatan pada kelompok Belanja Langsung jenis Belanja Barang dan Jasa Objek Belanja Jasa Kantor rincian objek Belanja Jasa Pihak Ketiga.
- (b). Belanja Tenaga Kontrak yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan Pengukuran dan penilaian objek dan subjek PBB akan ditetapkan dengan keputusan Bupati tersendiri.

II. BIAYA PENDIDIKAN DAN LATIHAN / BIMBINGAN TEKNIS / SOSIALISASI/ WORKSHOP DAN SEJENISNYA DI LUAR DAERAH

| No | Uraian | Haraga Satuan (Rp) |
|----|---|--------------------|
| 1 | Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya ke dalam dan luar provinsi diberikan biaya perjalanan dinas maksimal 5 hari. | |
| 2 | Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya melebihi ketentuan diatas maka untuk hari berikutnya uang harian dibayarkan sebesar Rp. 150.000,-/orang/hari untuk luar Provinsi dan Rp. 75.000,-/orang/hari luar kabupaten dalam Provinsi, Rp. 50.000,-/orang/hari dalam kabupaten | |
| 3 | Terhadap pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi maupun tidak dengan kontribusi di dalam Propinsi cukup mendapatkan persetujuan kepala SKPD, sedangkan yang dilaksanakan diluar Provinsi harus memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah. | |

Penjelasan :

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dapat dibayarkan apabila pelaksanaan kegiatan Sosialisasi tersebut lebih dari 3 (tiga) hari.

III. BIAYA MAKAN DAN MINUM

(a). Uang makan PNS dan Honor Daerah diatur sbd.

| No | Uraian | Satuan | Haraga Satuan (Rp) |
|----|---------------------------------------|------------|--------------------|
| 1 | Golongan IV | Orang/Hari | 25.000,- |
| 2 | Golongan III | Orang/Hari | 22.000,- |
| 3 | Golongan II, I & Pegawai Honor Daerah | Orang/Hari | 20.000,- |

(b). Konsumsi tamu/rapat/semnar/bintek dan sosialisasi.

| No | Uraian Pembayaan | Biaya (Rp) | Ket |
|----|--------------------------------|--------------|---|
| 1 | Makan dan Snack Tamu VVIP/ VIP | | |
| a | Sarapan dan Snack | 40.000,-/org | Hanya dapat di Anggaran pada Sekretariat Daerah yang Perjuannya dilaksanakan pada |
| b | Makan Siang dan Snack | 55.000,-/org | |
| c | Makan Malam dan Snack | 55.000,-/org | |

| | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------|-----|
| No | Uraian | Harga Satuan (Rp) | Ket |
| 1 | Biaya Pemeliharaan Komputer | 500.000,-/Unit/Thn | |
| 2 | Biaya Pemeliharaan Laptop/Note book | 750.000,-/Unit/Thn | |
| 3 | Biaya Pemeliharaan Telephone | 350.000,-/Unit/Thn | |

IV. BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR

- Khusus untuk biaya makan penambahan daya tahan tubuh pada hari Raya Idul Fitri & Idul Adha dibayarkan 200 % dari biaya yang ditetapkan

Penjelasan

| | | | |
|----|--------------------------------|-------------|-----------|
| No | Uraian Pembayaan | Biaya (Rp) | Ket |
| 1 | Makan Pasien VIP | 66.000,-/OH | RSUD |
| 2 | Makan Pasien Kelas I dan II | 45.000,-/OH | RSUD |
| 3 | Makan Pasien Kelas III | 36.000,-/OH | RSUD |
| 4 | Makan Pasien Puskesmas Kawatan | 36.000,-/OH | Puskesmas |

(d). Uang Makan Pasien

| | | | |
|----|---|--------------|---|
| No | Uraian Pembayaan | Biaya (Rp) | Ket |
| 1 | Makanan penambah daya tahan tubuh untuk petugas paramedis jaga malam, | 10.000,-/org | Dianggarkan pada RSUD dan Puskesmas rawatan |
| 2 | Kegiatan pembinaan fisik pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran | 10.000,-/org | Dianggarkan pada Satpol PP dan BPBD |
| 3 | Satpam yang tugas Malam. | 10.000,-/org | Dianggarkan pada SKPD |
| 4 | Makanan penambah daya tahan tubuh untuk petugas radiologi | 10.000,-/org | Dianggarkan pada RSUD |

(c). Satuan Biaya Makanan Penambahan Daya Tahan Tubuh

| | | | |
|---|---|----------------|---|
| 2 | Makan Tamu | 15.000,-/org | Rumah Dinas Bupati/ Wakil Bupati. |
| 3 | a Sarapan | 17.000,-/orang | Dapat di Anggarkan pada SKPD yang pelaksanaan penjamuannya di Rumah Dinas Bupati/ Wakil Bupati. |
| | b Makan Siang | 50.000,-/orang | |
| | c Makan Malam | 50.000,-/orang | |
| 4 | Makan Rapat-rapat Koordinasi Lintas SKPD Tingkat Kabupaten. | | Dapat di anggarkan pada SKPD |
| | a Snack | 10.000,-/kotak | |
| | b Makan Nasi Kotak | 27.000,-/kotak | |
| 5 | Makan Rapat Koordinasi Lingkup SKPD, peserta sosialisasi, bintek, seminar, dan petugas pengamanan dalam rangka penyampaian aspirasi dari masyarakat | 20.000,-/Bks | Dapat di anggarkan pada SKPD |
| | c Makan Nasi Bungkus | 17.000,-/Bks | |
| | a Snack | 10.000,-/kotak | |
| 5 | Makan dan Minum Rumah Tangga KDH dan WKDH diatur tersendiri oleh Keputusan Bupati | | Dapat di anggarkan pada SKPD |
| | b Makan Nasi Kotak | 24.000,-/kotak | |
| | c Makan Nasi Bungkus | 17.000,-/Bks | |

| No | Uraian | Harga Satuan (Rp) | Ket |
|--|---|-----------------------|-----|
| 4 | Biaya Pemeliharaan mesin tik | 250.000,-/Unit/Thn | |
| 5 | Biaya Pemeliharaan Telepon sentral | 2.000.000,-/Unit/Thn | |
| 6 | Biaya Pemeliharaan Fax | 750.000,-/Unit/Thn | |
| 7 | Biaya Pemeliharaan HT | 300.000,-/Unit/Thn | |
| 8 | Biaya Pemeliharaan AC | | |
| | ➤ Ac Split | 750.000,-/Unit/Thn | |
| | ➤ Ac Standing Floor | 1.200.000,-/Unit/Thn | |
| | ➤ Ac Sentral | 3.000.000,-/Unit/Thn | |
| 9 | Biaya Pemeliharaan Mesin Perforasi | 6.000.000,-/Unit/Thn | |
| 10 | Biaya Pemeliharaan Jaringan Internet | 1.000.000,-/Tahun | |
| 11 | Biaya Pemeliharaan Sound sistem | | |
| | - Orgen /Piano | 3.000.000,-/Unit/Thn | |
| | - Mixer dibawah 12 chanel | 750.000,-/Unit/Thn | |
| | - Mixer diatas 12 chanel | 1.000.000,-/Unit/Thn | |
| | - Speaker diatas 18 inchi | 500.000,-/Unit/Thn | |
| | - Speaker dibawah 18 inchi | 350.000,-/Unit/Thn | |
| | - Power Supply orgen | 500.000,-/Unit/Thn | |
| | - Amplifier orgen | 500.000,-/Unit/Thn | |
| 12 | Biaya Pemeliharaan Alat Elektronik lainnya | 1.000.000,-/Tahun | |
| 13 | Biaya Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA | 5.346.000,-/Unit/Thn | |
| 14 | Biaya Pemeliharaan Genset 75 KVA | 6.413.000,-/Unit/Thn | |
| 15 | Biaya Pemeliharaan Genset 100 KVA | 7.535.000,-/Unit/Thn | |
| 16 | Biaya Pemeliharaan Genset 125 KVA | 7.997.000,-/Unit/Thn | |
| 17 | Biaya Pemeliharaan Genset 150 KVA | 9.845.000,-/Unit/Thn | |
| 18 | Biaya Pemeliharaan Genset 175 KVA | 10.989.000,-/Unit/Thn | |
| 19 | Biaya Pemeliharaan Genset 200 KVA | 11.770.000,-/Unit/Thn | |
| 20 | Biaya Pemeliharaan Genset 250 KVA | 12.458.600,-/Unit/Thn | |
| 21 | Biaya Pemeliharaan Genset 275 KVA | 13.189.000,-/Unit/Thn | |
| 22 | Biaya Pemeliharaan Genset 300 KVA | 15.554.000,-/Unit/Thn | |
| 23 | Biaya Pemeliharaan Genset 350 KVA | 17.039.000,-/Unit/Thn | |
| 24 | Biaya Pemeliharaan Genset 450 KVA | 19.019.000,-/Unit/Thn | |
| 25 | Biaya Pemeliharaan Genset 500 KVA | 23.584.000,-/Unit/Thn | |
| Biaya Pemeliharaan peralatan lainnya yang belum tercantum pada daftar diatas menyesuaikan dengan harga pasar | | | |

V. BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) RUTIN

BBM rutin bulanan beserta besarnya dapat diberikan kepada Bupati/ Wakil bupati, Pimpinan DPRD dan Rumah Tangga Bupati serta Wakil Bupati .

| No | Uraian |
|------|---|
| (1). | Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati) diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati. |
| (2). | Pimpinan DPRD mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang kedudukan dan Protokoler DPRD |

| | |
|-----|---|
| (3) | Rumah Tangga Bupati dan wakil Bupati diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Tersendiri |
| (4) | Kedaraan Operasional roda empat (4) diberikan BBM rutin bulanan sebesar 20 liter/ bulan |

VI. BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG

| No | Uraian | Harga Satuan (Rp) |
|----|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Gedung/Bangunan Bertingkat | 145.000,-/m ² / Tahun |
| 2 | Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat | 99.000,-/m ² / Tahun |
| 3 | Halaman Gedung/Kantor/Bangunan | 10.000,-/m ² / Tahun |

VII. BIAYA SEWA SARANA MOBILITAS

| No | Uraian | Harga Satuan (Rp) |
|----|-------------------------|-----------------------|
| 1 | Mobil Roda 4 (empat) | 640.000,-/unit/hari |
| 2 | Mobil Roda 6 Bus Sedang | 1.700.000,-/unit/hari |
| 3 | Mobil Roda 6 Bus Besar | 2.700.000,-/unit/hari |

Penjelasan

- Biaya sewa kendaraan tersebut sudah termasuk BBM, Biaya Sopir dan Pajak
- Biaya sewa Mobilisasi alat berat disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku
- Biaya sewa kapal laut disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku (apabila diharuskan dengan Transportasi air).

VIII. BIAYA WIRID PENGAJIAN/ CERAMAH AGAMA/ PERINGATAN HARI BESAR ISLAM/KEGIATAN LAINNYA

| No | Uraian | Harga Satuan (Rp) |
|----|--|-----------------------|
| 1 | Honor Penceramah dalam kabupaten | 350.000,-/org/ kali |
| 2 | Honor Penceramah luar kabupaten dalam propinsi | 1.000.000,-/org/ kali |
| 3 | Honor Penceramah luar propinsi | 3.000.000,-/org/ kali |
| 4 | Honor Imam/ Pembaca Do'a/ Rohaniawan, Pembaca Al quran, Pembawa Acara, Pemimpin lagu | |
| | a. PNS/Non PNS | 100.000,-/org/ kali |
| 5 | Instruktur Senam | |
| | a. Dalam Daerah | 250.000,-/org/ kali |
| | b. Luar Daerah Dalam Propinsi | 500.000,-/org/ kali |

IX. BIAYA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA :

I. PNS/HONOR DAERAH, SATPOL PP/ BANPOL PP/ POL HUT/ BANPOL HUT

| No | Uraian | PNS/ Honor Daerah (Rp) | SATPOL PP/ BANPOL PP/POLHUT/ BANPOL HUT (Rp) |
|----|--------------------------------|------------------------|--|
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Harian | 500.000,-/Thn/Stell | 550.000,-/Thn/Stell |
| 2 | Pengadaan Pakaian Olah Raga | 250.000,-/Thn/Stell | |
| 3 | Bahan Pakaian Khas Daerah | 250.000,-/ Org | |
| 4 | Bahan Pakaian Muslim/KORPRI | 250.000,-/Org | |

| | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|
| 5 | Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan SatpolPP/BanpolPP/Polhut/Banpolhut(termasuk perlengkapannya) | | 750.000,-/Thn/Stell |
| 6 | Pengadaan Pakaian Satpam | 750.000,-/Thn/Stell | |

2. BUPATI / WAKIL BUPATI

| No | Uraian | Standar (Rp) | Ket |
|----|---|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | Mengikuti Harga Pasar | Bahan Woll Itali |
| 2 | Pakaian Sipil Resmi (PSR) | | Bahan Woll Itali |
| 3 | Pakaian Sipil Harian (PSH) | | Bahan Woll England |
| 4 | Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang | | Bahan sesuai dengan harga pasar |
| 5 | Pakaian khusus lainnya | | Bahan sesuai dengan harga pasar |

3. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

| No | Uraian | Standar (Rp) | Ket |
|----|---|-------------------|---|
| 1 | Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | 3.000.000,-/ stel | Bahan Woll Itali |
| 2 | Pakaian Sipil Resmi (PSR) | 2.750.000,-/ stel | Bahan Woll Itali |
| 3 | Pakaian Sipil Harian (PSH) | 1.500.000,-/ stel | Bahan Woll England |
| 4 | Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang | 1.000.000,-/ stel | Bahan sesuai dengan harga pasar |
| 5 | Pin Emas Lambang Daerah | 7,5 Gram/Org | Sesuai Harga Pasar diberikan 1 kali/ Periode. |

B. BELANJA PERJALANAN DINAS

I. Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat

1.1. Untuk Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

| No | Tingkatan | Dalam Wilayah Pasaman Barat | | | | | |
|----|----------------------|-----------------------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|
| | | Wil.I (Rp) | BBM | Wil.II (Rp) | BBM | Wil.III (Rp) | BBM |
| 1 | Bupati/ Wakil Bupati | 250.000,- | 25 Ltr | 250.000,- | 40 Ltr | 250.000,- | 50 Ltr |

1.2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

| No | Tingkatan | Dalam Wilayah Pasaman Barat | | |
|----|---------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | Wilayah 1 (Rp) | Wilayah 2 (Rp) | Wilayah 3 (Rp) |
| | | Kec. Sasak Rn Pasisie, Luhak Nan Duo | Kec. Talamau, Kinali, gunung Tuleh dan Sei Aur. | Kec. Sei Beremas, Ranah Batahan dan Lb Melintang dan Kt Balingka |
| 1 | Tingkat A | 100.000,- | 125.000,- | 150.000,- |
| 2 | Tingkat B | 90.000,- | 115.000,- | 140.000,- |
| 3 | Tingkat C | 80.000,- | 105.000,- | 130.000,- |
| 4 | Tingkat D | 70.000,- | 95.000,- | 120.000,- |
| 5 | BBM s/d 2000 cc | 15 Ltr. | 25 Ltr. | 35 Ltr. |
| 6 | BBM di atas 2000 cc | 30 Ltr | 40 Ltr | 50 Ltr |
| 7 | BBM Roda 2 | 5 Ltr | 7 Ltr | 9 Ltr |

Penjelasan

a. Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :

1. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Golongan IV
2. Tingkat B untuk PNS Golongan III
3. Tingkat C untuk PNS Golongan II
4. Tingkat D untuk PNS Golongan I

- b. Apabila dalam melakukan perjalanan dinas dalam Daerah menggunakan kendaraan umum dapat ditambah dengan biaya transportasi sesuai dengan wilayah (at-cost) :
1. Wilayah I sebesar Rp.25.000,- (P/P)
 2. Wilayah II sebesar Rp.30.000,- (P/P)
 3. Wilayah III sebesar Rp.45.000,- (P/P)
- c. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar (at-cost) melampirkan bukti pembayaran Rill.
- d. Bagi Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah harus diberikan secara selektif. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan II untuk Honor Daerah berpendidikan Sarjana ke atas dan Golongan I untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah.
- e. Bagi Sopir/Ajudan yang berstatus Tenaga Kontrak dapat diberikan Uang harian perjalanan dinas dalam daerah secara selektif, efisien dan efektif terbatas. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Gol I
- 1.3. Penugasan Khusus dan termasuk untuk penugasan ke daerah terisolir / tertinggal bagi PNS, Honor Daerah dan Pegawai Kontrak dapat diberikan uang harian sebagai berikut :

| No | Golongan | Dalam Wilayah Pasaman Barat | | | | | |
|----|-----------------------|-------------------------------|-----------------|----|-------------------------|---------------------|--|
| | | Wilayah 1 (Rp) | | | Wilayah 2 (Rp) | | Wilayah 3 (Rp) |
| | | Kec. Pasisie, Duo dan Pasaman | Sasak Luhak Nan | Rn | Kec. Kinali, Tuleh Aur. | Talamau, gunung Sei | Kec. Sei Beremas, Ranah Batahan dan Lb Melintang dan Kt Balingka |
| 1 | Golongan IV | | | | | | |
| 2 | Golongan III | | | | | | |
| 3 | Golongan II | | | | | | |
| 4 | Gol. I, Honda & Sopir | | | | | | |

Penjelasan

1. Penugasan khusus dalam rangka memfasilitasi acara pejabat negara dan pejabat daerah, petugas teknis Kontruksi Lapangan, petugas survey, petugas pendataan dan pengawasan, petugas lapangan SAT- GAS Pemadam Kebakaran dan Tim Reaksi Cepat, petugas pengamanan lapangan dan petugas lapangan pemungut pajak dan retribusi Daerah, diberikan biaya perjalanan dinas secara selektif, efisien dan efektif oleh Kepala SKPD.
 2. Penugasan khusus yang melaksanakan tugas berdasarkan atas Surat Perintah Tugas Khusus, lama penugasan maksimal 3 (tiga) hari dan jika melebihi harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
 3. Biaya transportasi Khusus kedaerah terisolir / tertinggal dibayarkan sesuai dengan harga rill.
- 1.4. Penugasan dari Kecamatan ke Nagari/Jorong dibayarkan biaya operasional per hari sebagai berikut :

| No. | Tingkatan | Kunjungan kerja (Rp.) | Pemungutan PAD & PBB (Rp.) |
|-----|-----------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Tingkat A | 75.000,- | 90.000,- |
| 2 | Tingkat B | 65.000,- | 80.000,- |
| 3 | Tingkat C | 50.000,- | 65.000,- |
| 4 | Tingkat D | 35.000,- | 50.000,- |

II. Uang Harian dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat.

- 2.1. Untuk Bupati dan Wakil Bupati dengan rincian sebagai berikut:

| No | Kabupaten/ Kota Tujuan | Uang Harian (Rp) | Bahan Bakar Minyak (BBM) |
|----|------------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | Padang Pariaman | 350.000,-/Hari | 100 liter PP |
| 2 | Agam | 350.000,-/Hari | 50 liter PP |
| 3 | Pasaman | 350.000,-/Hari | 80 liter PP |

| | | | |
|----|-----------------|----------------|--------------|
| 4 | Tanah Datar | 350.000,-/Hari | 100 liter PP |
| 5 | Lima Puluh Kota | 350.000,-/Hari | 110 liter PP |
| 6 | Kab.Solok | 350.000,-/Hari | 110 liter PP |
| 7 | Sijunjung | 350.000,-/Hari | 130 liter PP |
| 8 | Dharmas Raya | 350.000,-/Hari | 200 liter PP |
| 9 | Solok Selatan | 350.000,-/Hari | 200 liter PP |
| 10 | Pesisir Selatan | 350.000,-/Hari | 130 liter PP |
| 11 | Pariaman | 350.000,-/Hari | 100 liter PP |
| 12 | Bukittinggi | 350.000,-/Hari | 100 liter PP |
| 13 | Padang Panjang | 350.000,-/Hari | 100 liter PP |
| 14 | Padang | 350.000,-/Hari | 100 liter PP |
| 15 | Payakumbuh | 350.000,-/Hari | 110 liter PP |
| 16 | Kodya Solok | 350.000,-/Hari | 120 liter PP |
| 17 | Sawah Lunto | 350.000,-/Hari | 125 liter PP |
| 18 | Mentawai | 350.000,-/Hari | - |
| 19 | BIM | | 100 liter PP |

2.2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan rincian sebagai berikut:

| No | Kab/Kota | Tingkat A | Tingkat B | Tingkat C | Tingkat D | BBM s/d 2000 cc | BBM di atas 2000 cc | Trans Port |
|----|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------------|------------|
| 1 | Padang Pariaman | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 150.000,- | 60 | 100 | 80.000.- |
| 2 | Agam | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 150.000,- | 40 | 50 | 120.000.- |
| 3 | Pasaman | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 150.000,- | 50 | 80 | 120.000.- |
| 4 | Tanah Datar | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 150.000,- | 60 | 100 | 160.000.- |
| 5 | Lima Puluh Kota | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 150.000,- | 70 | 110 | 160.000.- |
| 6 | Kab.Solok | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 150.000,- | 70 | 110 | 160.000.- |
| 7 | Sijunjung | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 150.000,- | 100 | 130 | 180.000.- |
| 8 | Dharmas Raya | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 150.000,- | 150 | 200 | 200.000.- |
| 9 | Solok Selatan | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 150.000,- | 150 | 200 | 180.000.- |
| 10 | Pesisir Selatan | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 150.000,- | 100 | 130 | 180.000.- |
| 11 | Pariaman | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 150.000,- | 60 | 100 | 80.000.- |
| 12 | Bukittinggi | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 150.000,- | 60 | 100 | 140.000.- |
| 13 | Padang Panjang | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 150.000,- | 60 | 100 | 140.000.- |
| 14 | Padang | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 150.000,- | 60 | 100 | 140.000.- |
| 15 | Payakumbuh | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 150.000,- | 70 | 110 | 160.000.- |
| 16 | Kodya Solok | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 150.000,- | 80 | 120 | 180.000.- |
| 17 | Sawah Lunto | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 150.000,- | 90 | 125 | 180.000.- |
| 18 | Mentawai | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 150.000,- | - | - | - |
| 19 | BIM | | | | | 60 | 100 | 140.000.- |

Penjelasan

A. Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :

1. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II dan golongan IV.
2. Tingkat B untuk PNS Golongan III
3. Tingkat C untuk PNS Golongan II
4. Tingkat D untuk PNS Golongan I

- B. Bagi Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi harus diberikan secara selektif dan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan II untuk Honor Daerah berpendidikan Sarjana ke atas dan Golongan I untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah.
- C. Bagi Sopir/ Ajudan yang berstatus Tenaga Kontrak dapat diberikan uang harian perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi secara selektif, efisien dan efektif terbatas. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan I(Khusus Sopir yang perjalanan dinasnya ke BIM besaran biaya perjalanan dinasnya mengikuti besaran uang harian Kabupaten Pariaman)

III. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat Luar Provinsi Sumatera Barat.

3.1. Untuk Bupati dan Wakil Bupati dengan rincian sebagai berikut :

| No | Provinsi Tujuan | Bupati /Wakil Bupati |
|-----|-------------------------|----------------------|
| 1. | Nangroe Aceh Darussalam | 650.000,- |
| 2. | Sumatera Utara | 652.000,- |
| 3. | Riau | 630.000,- |
| 4. | Kepulauan Riau | 661.000,- |
| 5. | Jambi | 630.000,- |
| 6. | Sumatera Selatan | 650.000,- |
| 7. | Lampung | 690.000,- |
| 8. | Bengkulu | 650.000,- |
| 9. | Bangka Belitung | 630.000,- |
| 10. | Banten | 845.000,- |
| 11. | Jawa Barat | 690.000,- |
| 12. | DKI Jakarta | 900.000,- |
| 13. | Jawa Tengah | 620.000,- |
| 14. | DI Yogyakarta | 690.000,- |
| 15. | Jawa Timur | 735.000,- |
| 16. | Bali | 780.000,- |
| 17. | Nusa Tenggara Barat | 688.000,- |
| 18. | Nusa Tenggara Timur | 692.000,- |
| 19. | Kalimantan Barat | 660.000,- |
| 20. | Kalimantan Tengah | 630.000,- |
| 21. | Kalimantan Selatan | 660.000,- |
| 22. | Kalimantan Timur | 920.000,- |
| 23. | Sulawesi Utara | 680.000,- |
| 24. | Gorontalo | 685.000,- |
| 25. | Sulawesi Barat | 685.000,- |
| 26. | Sulawesi Selatan | 750.000,- |
| 27. | Sulawesi Tengah | 618.000,- |
| 28. | Sulawesi Tenggara | 695.000,- |
| 29. | Maluku | 731.000,- |
| 30. | Maluku Utara | 680.000,- |
| 31. | Papua | 1.095.000,- |
| 32. | Papua Barat | 805.000,- |

Penjelasan

- Untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati).
- Uang harian dibayarkan Lumpsum.
- Selama melaksanakan perjalanan dinas Bupati/ Wakil Bupati diberikan transportasi local sebesar Rp.600.000/hari dibayar At-cost.

3.2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Provinsi | Tk A | Tk B | Tk C | Tk D | Tk E |
|-----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Aceh | 450.000,- | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- |
| No. | Provinsi | Tk A | Tk B | Tk C | Tk D | Tk E |
| 2. | Sumatera Utara | 452.000,- | 402.000,- | 352.000,- | 302.000,- | 252.000,- |
| 3. | Riau | 430.000,- | 380.000,- | 330.000,- | 280.000,- | 230.000,- |
| 4. | Kep. Riau (Batam) | 461.000,- | 411.000,- | 361.000,- | 311.000,- | 261.000,- |
| 5. | Jambi | 430.000,- | 380.000,- | 330.000,- | 280.000,- | 230.000,- |
| 6. | Sumatera Selatan | 450.000,- | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- |
| 7. | Lampung | 490.000,- | 440.000,- | 390.000,- | 340.000,- | 290.000,- |
| 8. | Bengkulu | 450.000,- | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- |
| 9. | Bangka Belitung | 430.000,- | 380.000,- | 330.000,- | 280.000,- | 230.000,- |
| 10. | Banten | 645.000,- | 595.000,- | 545.000,- | 495.000,- | 445.000,- |
| 11. | Jawa Barat | 490.000,- | 440.000,- | 390.000,- | 340.000,- | 290.000,- |
| 12. | DKI Jakarta | 700.000,- | 650.000,- | 600.000,- | 550.000,- | 500.000,- |
| 13. | Jawa Tengah | 420.000,- | 370.000,- | 320.000,- | 270.000,- | 220.000,- |
| 14. | DI Yogyakarta | 490.000,- | 440.000,- | 390.000,- | 340.000,- | 290.000,- |
| 15. | Jawa Timur | 535.000,- | 485.000,- | 435.000,- | 385.000,- | 335.000,- |
| 16. | Bali | 580.000,- | 530.000,- | 480.000,- | 430.000,- | 380.000,- |
| 17. | NTB | 488.000,- | 438.000,- | 388.000,- | 338.000,- | 288.000,- |
| 18. | NTT | 492.000,- | 442.000,- | 392.000,- | 342.000,- | 292.000,- |
| 19. | Kalimantan Barat | 460.000,- | 410.000,- | 360.000,- | 310.000,- | 260.000,- |
| 20. | Kalteng | 430.000,- | 380.000,- | 330.000,- | 280.000,- | 230.000,- |
| 21. | Kalsel | 460.000,- | 410.000,- | 360.000,- | 310.000,- | 260.000,- |
| 22. | Kalimantan Timur | 720.000,- | 670.000,- | 620.000,- | 570.000,- | 520.000,- |
| 23. | Sulawesi Utara | 480.000,- | 430.000,- | 380.000,- | 330.000,- | 280.000,- |
| 24. | Gorontalo | 485.000,- | 435.000,- | 385.000,- | 335.000,- | 285.000,- |
| 25. | Sulawesi Barat | 485.000,- | 435.000,- | 385.000,- | 335.000,- | 285.000,- |
| 26. | Sulawesi Selatan | 550.000,- | 500.000,- | 450.000,- | 400.000,- | 350.000,- |
| 27. | Sulawesi Tengah | 418.000,- | 368.000,- | 318.000,- | 268.000,- | 218.000,- |
| 28. | Sulawesi Tenggara | 495.000,- | 445.000,- | 395.000,- | 345.000,- | 295.000,- |
| 29. | Maluku | 531.000,- | 481.000,- | 431.000,- | 381.000,- | 331.000,- |
| 30. | Maluku Utara | 480.000,- | 430.000,- | 380.000,- | 330.000,- | 280.000,- |
| 31. | Papua | 895.000,- | 845.000,- | 795.000,- | 745.000,- | 695.000,- |
| 32. | Papua Barat | 605.000,- | 555.000,- | 505.000,- | 455.000,- | 405.000,- |

Penjelasan

- A. Anggota DPRD/ PNS serta Honor Daerah yang melaksanakan perjalanan Dinas mempedomani tingkatan biaya perjalanan dinas sesuai table diatas.
- a. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II
 - b. Tingkat B untuk PNS Golongan IV
 - c. Tingkat C untuk PNS Golongan III
 - d. Tingkat D untuk PNS Golongan II
 - e. Tingkat E untuk PNS Golongan I

- B. Bagi Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dan atau luar Provinsi harus diberikan secara selektif dengan mengajukan telaahan staf tersendiri untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan II untuk Honor Daerah berpendidikan Sarjana ke atas dan Golongan I untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah.
- C. Untuk pemberian Reward kepada pegawai kontrak atas keberhasilan pelaksanaan tugas dapat diberikan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam bentuk study lapangan atas persetujuan tertulis Bupati.
- D. Untuk pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas luar propinsi via Bandara Internasional Minang Kabau (BIM), dan tidak menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transportasi Simpang Ampek – BIM maksimal sebesar Rp.140.000,- P/P dibayarkan at-cost (biaya rill)
- E. Uang Harian dibayarkan Lumpsum.

3.3. Uang Representasi bagi Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat Eselon II (dua) dalam melaksanakan Perjalan Dinas luar Provinsi Sumatera Barat

| No | Eselon/ Jabatan | Satuan | Ket |
|----|--------------------------------|--------------------|-----|
| 1 | Bupati/ Wakil Bupati | 250.000,-/org/hari | |
| 2 | Pejabat Eselon II/Anggota DPRD | 200.000,-/org/hari | |

IV. Sarana Transportasi untuk perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat.

4.1. Bupati/ Wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honor Daerah, sebagai berikut :

| No | Eselon/ Jabatan | Jenis Transport | | |
|----|---|-----------------|---------------|--------------------|
| | | Pesawat Udara | Kapal Laut | Kereta Api/ Bus |
| 1 | Bupati/ Wakil Bupati | Kelas Bisnis | VIP/ Kelas IA | Spesial/ Eksekutif |
| 2 | Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II | Kelas Ekonomi | Kelas IB | Spesial/ Eksekutif |
| 3 | Pejabat Eselon III/PNS golongan IV, Pejabat Eselon IV/ PNS golongan III, PNS golongan II dan I serta Pegawai Honor Haerah dan Kontrak | Kelas Ekonomi | Kelas IIA | Spesial/ Eksekutif |

Penjelasan

- a. Biaya tiket Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat at-cost (sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah)
- b. Biaya tiket Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumatera Barat yang melebihi 1 (satu) kali rute Perjalanan, perjalanan berikutnya tetap dibayar at-cost (sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah)
- c. Untuk perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan daerah yang tidak memiliki Bandar Udara diberikan biaya transportasi maksimal sebesar Rp. 400.000,-/org (PP) dibayar at-cost dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.
- 4.2. Bupati/ Wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honor Daerah, dari BANDARAHALABAN menggunakan transport Udara dengan tujuan Daerah pada tabel dibawah sebagai berikut :

| No | Rute Penerbangan | Batas Maksimal Satuan Biaya Tiket (Rp) |
|----|----------------------------|--|
| 1 | Simpang Ampek – Padang | 375.000,- |
| 2 | Simpang Ampek – Pekan Baru | 575.000,- |

V. Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Barat menggunakan jalan darat dengan rincian sebagai berikut :

5.1. Untuk Bupati dan Wakil Bupati dengan perincian sebagai berikut :

| No | Kota Tujuan | Jarak Tempuh PP | Jumlah Liter BBM |
|----|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | Jambi | 1.378 | 276 |
| 2 | Lampung | 2.712 | 542 |
| 3 | Palembang | 1.932 | 386 |
| 4 | Pekanbaru | 780 | 182 |
| No | Kota Tujuan | Jarak Tempuh PP | Jumlah Liter BBM |
| 5 | Rengat | 800 | 160 |
| 6 | Sidempuan | 600 | 120 |
| 7 | Pematang Siantar | 1.020 | 204 |
| 8 | Medan | 1.340 | 268 |

5.2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

| No | Kota Tujuan | Jarak Tempuh PP | Jumlah Liter BBM |
|----|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | Jambi | 1.378 | 230 |
| 2 | Lampung | 2.712 | 452 |
| 3 | Palembang | 1.932 | 322 |
| 4 | Pekanbaru | 780 | 170 |
| 5 | Rengat | 800 | 134 |
| 6 | Sidempuan | 600 | 100 |
| 7 | Pematang Siantar | 1.020 | 170 |
| 8 | Medan | 1.340 | 224 |

VI. Tarif Rata-rata Hotel/Penginapan

6.1. Tarif Rata-Rata Hotel dalam Provinsi Sumatera Barat Untuk Bupati/ Wakil Bupati

| No | Kabupaten/ Kota Tujuan | Harga Satuan (Rp) |
|----|------------------------|-------------------|
| 1 | Padang pariaman | 850.000,-/Malam |
| 2 | Agam | 850.000,-/Malam |
| 3 | Pasaman | 850.000,-/Malam |
| 4 | Tanah Datar | 850.000,-/Malam |
| 5 | Lima Puluh Kota | 850.000,-/Malam |
| 6 | Kabupate Solok | 850.000,-/Malam |
| 7 | Sijunjung | 850.000,-/Malam |
| 8 | Dhamas Raya | 850.000,-/Malam |
| 9 | Solok Selatan | 850.000,-/Malam |

| | | |
|----|-----------------|-------------------|
| 10 | Pesisir Selatan | 850.000,-/Malam |
| 11 | Pariaman | 850.000,-/Malam |
| 12 | Bukittinggi | 1.000.000,-/Malam |
| 13 | Padang Panjang | 850.000,-/Malam |
| 14 | Padang | 1.000.000,-/Malam |
| 15 | Payakumbuh | 850.000,-/Malam |
| 16 | Kota Solok | 850.000,-/Malam |
| 17 | Sawah Lunto | 850.000,-/Malam |
| 18 | Mentawai | |

Penjelasan

1. Biaya penginapan dapat diberikan apabila pelaksanaan kegiatan memang mengharuskan untuk menginap.
2. Biaya penginapan dibayarkan at-cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang sah) sesuai tabel diatas adalah batas maksimal.
3. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada ybs diberikan biaya penginapan 30% (*tiga puluh persen*) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.
4. Khusus untuk kabupaten mentawai menyesuaikan dengan tarif penginapan setempat.

6.2. Tarif rata-rata hotel Dalam Provinsi Sumatera Barat untuk Anggota DPRD dan PNS, serta Honor Daerah.

| No | Kabupaten/ Kota Tujuan | Harga Satuan (Rp) | | | |
|----|------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | TK. A | TK. B | TK. C | TK. D |
| 1 | Padang pariaman | 650.000,- | 550.000,- | 450.000,- | 350.000,- |
| 2 | Agam | 650.000,- | 550.000,- | 450.000,- | 350.000,- |
| 3 | Pasaman | 650.000,- | 550.000,- | 450.000,- | 350.000,- |
| 4 | Tanah Datar | 650.000,- | 550.000,- | 450.000,- | 350.000,- |
| 5 | Lima Puluh Kota | 650.000,- | 550.000,- | 450.000,- | 350.000,- |
| 6 | Kabupaten Solok | 650.000,- | 550.000,- | 450.000,- | 350.000,- |
| 7 | Sijunjung | 650.000,- | 550.000,- | 450.000,- | 350.000,- |
| 8 | Dharmas Raya | 650.000,- | 550.000,- | 450.000,- | 350.000,- |
| 9 | Solok Selatan | 650.000,- | 550.000,- | 450.000,- | 350.000,- |
| 10 | Pesisir Selatan | 650.000,- | 550.000,- | 450.000,- | 350.000,- |
| 11 | Pariaman | 650.000,- | 550.000,- | 450.000,- | 350.000,- |
| 12 | Bukittinggi | 700.000,- | 600.000,- | 500.000,- | 400.000,- |
| 13 | Padang Panjang | 650.000,- | 550.000,- | 450.000,- | 350.000,- |
| 14 | Padang | 700.000,- | 600.000,- | 500.000,- | 400.000,- |
| 15 | Payakumbuh | 650.000,- | 550.000,- | 450.000,- | 350.000,- |
| 16 | Kota Solok | 650.000,- | 550.000,- | 450.000,- | 350.000,- |
| 17 | Sawah Lunto | 650.000,- | 550.000,- | 450.000,- | 350.000,- |
| 18 | Mentawai | - | - | - | - |

Penjelasan

1. Peruntukan Penginapan :
 - a. Tingkat A : Pimpinan /Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II serta Pejabat Fungsional Golongan IV/c keatas
 - b. Tingkat B : Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Gol IV/a dan IV/b
 - c. Tingkat C : Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Gol III/c dan III/d
 - d. Tingkat D : Aparatur Non Struktural dan Pejabat Fungsional Golongan III/b kebawah dan Honor Daerah
2. Biaya Penginapan dapat diberikan apabila pelaksanaan kegiatan memang mengharuskan untuk menginap.
3. Biaya penginapan dibayarkan at-cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang sah) sesuai tabel diatas adalah batas maksimal.
4. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada ybs diberikan biaya penginapan 30% (*tiga puluh persen*) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
5. Khusus untuk kabupaten mentawai menyesuaikan dengan tarif penginapan setempat.

6.3. Tarif Rata-Rata Hotel Luar Provinsi Sumatera Barat Untuk Bupati/ Wakil Bupati.

| No | Kabupaten/ Kota Tujuan | Harga Satuan (Rp) |
|----|------------------------|-------------------|
| 1 | Aceh Darusalam | 4.420.000,- |
| 2 | Sumatera Utara | 4.960.000,- |
| 3 | Riau | 3.817.000,- |
| 4 | Kepulauan Riau | 3.410.000,- |
| 5 | Jambi | 4.000.000,- |
| 6 | Sumatera Selatan | 4.680.000,- |
| 7 | Lampung | 3.960.000,- |
| 8 | Bengkulu | 1.300.000,- |
| 9 | Bangka Belitung | 2.858.000,- |
| 10 | Banten | 3.808.000,- |
| 11 | Jawa Barat | 3.664.000,- |
| 12 | DKI Jakarta | 8.720.000,- |
| 13 | Jawa Tengah | 4.146.000,- |
| 14 | D.I Yogyakarta | 4.620.000,- |
| 15 | Jawa Timur | 4.400.000,- |
| 16 | Bali | 4.881.000,- |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 3.429.000,- |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 3.000.000,- |
| 19 | Kalimantan Barat | 2.400.000,- |
| 20 | Kalimantan Tengah | 3.000.000,- |
| 21 | Kalimantan Selatan | 4.250.000,- |
| 22 | Kalimantan Timur | 4.000.000,- |
| 23 | Kalimantan Utara | 4.000.000,- |
| 24 | Sulawesi Utara | 3.200.000,- |
| 25 | Gorontalo | 1.320.000,- |
| 26 | Sulawesi Barat | 1.260.000,- |

| | | |
|----|-------------------|-------------|
| 27 | Sulawesi Selatan | 4.820.000,- |
| 28 | Sulawesi Tengah | 2.030.000,- |
| 29 | Sulawesi Tenggara | 1.850.000,- |
| 30 | Maluku | 3.000.000,- |
| 31 | Maluku Utara | 3.110.000,- |
| 32 | Papua | 2.850.000,- |
| 33 | Papua Barat | 2.750.000,- |

Penjelasan

1. Biaya penginapan dibayarkan at-cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang sah) sesuai tabel diatas adalah batas maksimal.
2. Perjalanan dinas yang bersifat rombongan dapat menggunakan hotel yang sama dengan klasifikasi kamar berbeda.
3. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada ybs diberikan biaya penginapan 30% (*tiga puluh persen*) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

6.4. Tarif rata-rata hotel Luar Provinsi Sumatera Barat untuk Anggota DPRD dan PNS, serta Honor Daerah.

| No | Kota Tujuan / Provinsi | DPRD/ Eselon II | Eselon III/Gol IV | Eselon IV/Gol III | Golongan, II dan I |
|----|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Aceh Darusalam | 1.308.000,- | 1.080.000,- | 410.000,- | 370.000,- |
| 2 | Sumatera Utara | 1.206.000,- | 703.000,- | 470.000,- | 310.000,- |
| 3 | Riau | 1.168.000,- | 720.000,- | 450.000,- | 380.000,- |
| 4 | Kepulauan Riau | 930.000,- | 650.000,- | 380.000,- | 280.000,- |
| 5 | Jambi | 1.030.000,- | 697.000,- | 370.000,- | 290.000,- |
| 6 | Sumatera Selatan | 1.228.000,- | 602.000,- | 514.000,- | 280.000,- |
| 7 | Lampung | 1.299.000,- | 770.000,- | 374.000,- | 356.000,- |
| 8 | Bengkulu | 790.000,- | 712.000,- | 599.000,- | 510.000,- |
| 9 | Bangka Belitung | 1.150.000,- | 850.000,- | 533.000,- | 304.000,- |
| 10 | Banten | 1.430.000,- | 1.024.000,- | 556.000,- | 400.000,- |
| 11 | Jawa Barat | 1.753.000,- | 949.000,- | 497.000,- | 463.000,- |
| 12 | DKI Jakarta | 1.000.000,- | 650.000,- | 610.000,- | 400.000,- |
| 13 | Jawa Tengah | 1.452.000,- | 750.000,- | 450.000,- | 350.000,- |
| 14 | D.I Yogyakarta | 1.248.000,- | 670.000,- | 528.000,- | 387.000,- |
| 15 | Jawa Timur | 1.359.000,- | 841.000,- | 485.000,- | 286.000,- |
| 16 | Bali | 1.810.000,- | 1.220.000,- | 904.000,- | 658.000,- |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 1.222.000,- | 737.000,- | 540.000,- | 360.000,- |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 1.000.000,- | 700.000,- | 450.000,- | 400.000,- |
| 19 | Kalimantan Barat | 1.130.000,- | 808.000,- | 430.000,- | 330.000,- |
| 20 | Kalimantan Tengah | 1.596.000,- | 923.000,- | 465.000,- | 436.000,- |
| 21 | Kalimantan Selatan | 1.603.000,- | 816.000,- | 500.000,- | 379.000,- |
| 22 | Kalimantan Timur | 1.458.000,- | 816.000,- | 550.000,- | 450.000,- |
| 23 | Kalimantan Utara | 1.458.000,- | 816.000,- | 550.000,- | 450.000,- |
| 24 | Sulawesi Utara | 1.553.000,- | 640.000,- | 500.000,- | 290.000,- |
| 25 | Gorontalo | 1.010.000,- | 910.000,- | 410.000,- | 240.000,- |
| 26 | Sulawesi Barat | 1.030.000,- | 910.000,- | 400.000,- | 360.000,- |
| 27 | Sulawesi Selatan | 1.135.000,- | 853.000,- | 539.000,- | 375.000,- |
| 28 | Sulawesi Tengah | 1.298.000,- | 767.000,- | 400.000,- | 330.000,- |

| | | | | | |
|----|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 29 | Sulawesi Tenggara | 1.070.000,- | 802.000,- | 450.000,- | 420.000,- |
| 30 | Maluku | 1.030.000,- | 680.000,- | 484.000,- | 280.000,- |
| 31 | Maluku Utara | 1.512.000,- | 600.000,- | 420.000,- | 380.000,- |
| 32 | Papua | 1.524.000,- | 720.000,- | 460.000,- | 414.000,- |
| 33 | Papua Barat | 1.482.000,- | 900.000,- | 400.000,- | 370.000,- |

Penjelasan

1. Peruntukan Penginapan :
 - a. Tingkat A : Pimpinan /Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II serta Pejabat Fungsional Golongan IV/c keatas
 - a. Tingkat B : Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Gol IV/a dan IV/b
 - b. Tingkat C : Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Gol III/c dan III/d
 - c. Tingkat D : Aparatur Non Struktural dan Pejabat Fungsional Golongan III/b kebawah dan Honor Daerah
2. Biaya penginapan dibayarkan at-cost (dibayar dengan bukti pengeluaran yang sah) sesuai tabel diatas adalah batas maksimal.
3. Perjalanan dinas yang bersifat rombongan dapat menggunakan hotel yang sama dengan klasifikasi kamar berbeda.
4. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada ybs diberikan biaya penginapan 30% (*tiga puluh persen*) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

C. PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPT, SPPD

1. Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah Bupati/ Wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honor Daerah, yang diperintah oleh Pejabat yang berwenang.
2. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas Dalam daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD :
 1. Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati
 2. Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
 3. Anggota DPRD penandatanganan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
 - B. Sekretariat Daerah :
 1. Sekretaris Daerah SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 2. Asisten SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten.
 3. Kepala Bagian SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sedangkan SPPD untuk Kepala Bagian ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkupnya.
 4. Kepala Sub Bagian, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkupnya dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian.
 - C. Sekretariat DPRD:
 1. Sekretaris DPRD, Pejabat Eselon III, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD
 2. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, SPPD ditandatangani oleh pejabat eselon III pada lingkupnya.
 - D. Badan, Dinas dan Kantor :
 1. Kepala Badan/Dinas/Kantor, pejabat eselon III pada Badan/Dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan
 2. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pejabat eselon III pada lingkupnya.
 - E. Kantor Camat :
 1. Camat dan Sekcam SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat.
 2. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat.

- F. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 1. Kepala UPTD SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD
 2. Ka TU dan Staf PNS dan Pegawai Honor Daerah di lingkup UPTD SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD.
 3. Kepala Sekolah, Kepala TU, Guru, Staf PNS dan Pegawai Honor Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
3. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD :
 1. SPT dan SPPD untuk Bupati ditandatangani oleh Bupati
 2. SPT dan SPPD untuk Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
 3. SPT dan SPPD untuk Anggota DPRD penandatanganannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
 - B. Sekretariat Daerah :
 1. SPT dan SPPD untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 2. SPT dan SPPD untuk Asisten Setda/Staf ahli Bupati, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang mewakili Setda.
 3. SPT untuk Kepala Bagian dilingkungan Setda ditandatangani oleh Sekretaris Daerah apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang mewakili Setda, sedangkan SPPD untuk Kepala Bagian ditandatangani oleh Asisten sesuai lingkungannya.
 - C. Sekretariat DPRD:
 1. SPT untuk Sekretaris DPRD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang mewakili Setda.
 2. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon III ditandatangani oleh Sekretaris DPRD
 3. SPT dan SPPD untuk Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai Honor Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, SPPD ditandatangani oleh pejabat eselon III pada lingkungannya.
 - D. Badan, Dinas dan Kantor :
 1. SPT Untuk Kepala Badan/Dinas/Kantor ditandatangani oleh Sekretaris Daerah apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang mewakili Setda sedangkan SPPD ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor.
 2. SPT Untuk pejabat eselon III pada Badan/Dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
 3. SPT untuk Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pejabat eselon III pada lingkungannya.
 - E. Kantor Camat :
 1. SPT untuk Camat oleh Sekretaris Daerah apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang mewakili Setda sedangkan SPPD ditandatangani oleh Camat.
 2. SPT dan SPPD Untuk Sekcam ditandatangani oleh Camat.
 3. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat.
 - F. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 1. Kepala UPTD SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD
 2. Ka TU dan Staf PNS dan Pegawai honor daerah di lingkup UPTD SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD.
 3. Kepala Sekolah, Kepala TU, Guru, Staf PNS dan Pegawai Honor Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
 4. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :
 - A. SPT dan SPPD untuk Bupati ditandatangani oleh Bupati
 - B. SPT dan SPPD untuk Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
 - C. Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Anggota DPRD, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota DPRD.

- D. SPT dan SPPD untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 - E. SPT dan SPPD untuk Kepala SKPD ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 - F. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, Pejabat eselon IV, staf PNS dan Pegawai Honor Daerah SPT ditandatangani Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris daerah Berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkungannya.
 - G. Pejabat eselon III pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, SPT ditandatangani oleh Bupati, wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
 - H. Camat dan Sekcam SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 - I. Pejabat eselon IV, staf PNS dan Pegawai Honor Daerah di lingkungan Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Kantor SPT ditandatangani Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
5. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
 6. Setiap PNS pada SKPD yang akan melakukan perjalanan dinas keluar provinsi harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Bupati.
 7. SPT untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Sumatera Barat, penomoran register SPT dicatat dan dibukukan oleh Sespri Bupati.
 8. Lamanya perjalanan dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 5 (lima) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati untuk melaksanakan Konsultasi dan Kordinasi luar Provinsi Sumatera Barat lama perjalanan maksimal 3 (tiga) hari dan untuk 2 (dua) tempat maksimal 4 (empat) hari kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
 9. Lamanya Perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat untuk 1 (satu) bulan maksimal 12 hari, kecuali untuk penugasan/undangan khusus mewakili pemerintah daerah untuk kepentingan daerah dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Pasaman Barat dengan mengajukan Telaahan Staf.
 10. Untuk Rapat koordinasi dan atau konsultasi maksimal jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas sebanyak 2 (dua) orang, kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
 11. Kecuali Bupati, Wakil Bupati. Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang.
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas terdiri dari:
- A. Kwitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditandatangani oleh para pihak yang berkompeten (Form 1 dan 1a).
 - B. Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang

berwenang (Form 2).

- C. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilegalisir oleh pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas dilakukan (Form 3),
- D. Laporan Hasil Perjalanan Dinas (LHPD)

D. STANDAR BIAYA TRANSPORTASI DAN SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI DENGAN MEMPEDOMANI

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 72/ PMK. 02/ 2013 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2014.

E. BIAYA PENDIDIKAN, LATIHAN/SOSIALISASI/SEMINAR/PENYULUH/DIKLAT TEKNIS

Standar biaya Pendidikan dan Latihan Struktural

1.1. Biaya Pendidikan dan Latihan Struktural

| No | Uraian | Satuan | Standar (Rp) |
|--|--|----------|--------------|
| <i>A. Kontribusi</i> | | | |
| 1 | Biaya Diklat PIM II | PerOrang | 30.261.000.- |
| 2 | Biaya diklat PIM III | PerOrang | 22.125.000.- |
| 3 | Biaya diklat PIM IV | PerOrang | 20.230.000.- |
| 4 | Latihan Prajabatan | | |
| | a. Golongan I dan II | PerOrang | 4.470.000.- |
| | b. Golongan III | PerOrang | 5.545.000.- |
| 5 | Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk.II | PerOrang | 1.500.000.- |
| 6 | Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. III | PerOrang | 500.000.- |
| 7 | Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. IV | PerOrang | 350.000.- |
| <i>B. Kegiatan Diklat Prajabatan, Diklat, Pimpinan, Teknis, dan Fungsional</i> | | | |
| 1 | Honor Widyaiswara/ Narasumber | | |
| | a. Widyaiswara Pusat | Org/Keg | 2.400.000.- |
| | b. Widyaiswara Provinsi | OJP | 150.000.- |
| | c. Widyaiswara Daerah | OJP | 100.000.- |
| | d. Honor Narasumber Seminar | Org/Keg | 1.100.000.- |
| | e. Honor Narasumber Seminar Lokus OL | Org/Keg | 600.000.- |
| 2 | Honor Pembimbing Diskusi | Org/Keg | 250.000.- |
| 3 | Honor Pelatih Upacara Pembukaan/Penutup | Org/Keg | 200.000.- |
| 4 | Honor Petugas Kelas | | |
| | a. Petugas Piket | OJP | 15.000.- |
| | b. Petugas / Pengamat Kelas | OJP | 25.000.- |
| 5 | Honor Pengawasan/Pengendalian (Diklat PIM) | Paket | 3.400.000.- |
| 6 | Honor Fasilitator Out Bond | Org/Keg | 2.000.000.- |
| 7 | Honorarium Pendamping Out Bond | Org/Keg | 750.000.- |
| 8 | Honorarium Pelayanan Tindak Medik | | |
| | a. Honor Petugas | | |
| | - Diklat Teknis/Fungsional < 6 hari | Paket | 400.000.- |
| | - Diklat Teknis/Fungsional 7 - 14 hari | Paket | 600.000.- |
| | - Diklat Kepemimpinan Tk. IV | Paket | 1.500.000.- |
| | - Diklat Kepemimpinan Tk. III | Paket | 1.500.000.- |

| | | | |
|----|--|-----------|-------------|
| | - Diklat Prajabatan Gol III | Paket | 1.000.000.- |
| | - Diklat Prajabatan Gol I dan II | Paket | 800.000.- |
| | b. Pengadaan Obat-obatan | | |
| | - Diklat Teknis / Fungsional < 6 hari | Paket | 400.000.- |
| | - Diklat Teknis/ Fungsional 7 – 14 hari | Paket | 600.000.- |
| | - Diklat Kepemimpinan Tk. IV | Paket | 1.500.000.- |
| | - Diklat Kepemimpinan Tk. III | Paket | 1.500.000.- |
| | - Diklat Prajabatan Gol III | Paket | 1.000.000.- |
| | - Diklat Prajabatan Gol I dan II | Paket | 800.000.- |
| 9 | Honor Pengawas Ujian | | |
| | a. Pengawas Ujian Pusat | Paket | 1.000.000.- |
| | b. Pengawas Ujian Daerah | Paket | 600.000.- |
| | Biaya Transportasi | | |
| 10 | Penggantian transport untuk narasumber (at-cost) | | |
| | 0 – 60 Km | | 100.000.- |
| | 60-150 Km | | 200.000.- |
| | >150 km | | 300.000.- |
| 11 | Biaya akomodasi dan konsumsi | | |
| | a. Narasumber | OH | 400.000.- |
| | b. Panitia dan Peserta | OH | 300.000.- |
| 12 | Bantuan Biaya Diklat PIM | | |
| | a. Pendidikan Diklat PIM II | | |
| | - Bantuan Biaya Pelaksanaan OL | Per Orang | 3.000.000.- |
| | - Bantuan Kertas Kerja Perorangan (KKP) | Per Orang | 1.500.000.- |
| | - Bantuan Kontribusi P3KI | Per Orang | 2.500.000.- |
| | b. Pendidikan Diklat PIM III | | |
| | - Bantuan Biaya Pelaksanaan OL | Per Orang | 2.000.000.- |
| | - Bantuan Kertas Kerja Perorangan(KKP) | Per Orang | 1.000.000.- |
| | - Bantuan Kontribusi P3KI | Per Orang | 2.500.000.- |
| | c. Kegiatan Pendidikan Diklat PIM IV | | |
| | - Bantuan Biaya Pelaksanaan OL | Per Orang | 1.000.000.- |
| | - Bantuan Kertas Kerja Perorangan(KKP) | Per Orang | 500.000.- |
| 13 | Honorarium Instruktur Senam per Angkatan | Paket | 1.000.000.- |
| | C. Kegiatan OL | | |
| | 1. Bantuan untuk Pemda Lokasi OL | Paket | 1.000.000.- |
| | 2. Bantuan untuk lokus/ instansi terkait | Paket | 250.000.- |
| 14 | Honorarium MC/ Pembawa Acara | | |
| | a. PNS/Non PNS. | OK | 150.000.- |

1.2. Biaya Diklat Teknis Fungsional PNS/ Sosialisasi/ Bintek

| No | Uraian | Satuan | Standar (Rp) |
|----|---|-------------|-------------------|
| 1 | Honor Narasumber/ Widyaiswara/ Praktisi/ Pakar/ Pejabat | | |
| | a. Pusat | OJP | 750.000.- |
| | b. Provinsi | OJP | 500.000.- |
| | c. Kabupaten | OJP | 300.000.- |
| 2 | Biaya Transportasi | | |
| | Penggantian BBM Narasumber | | |
| | a. 0 – 60 Km | | 100.000.- |
| | b. 60 – 150 Km | | 200.000.- |
| | c. 150 Km ke atas | | 300.000.- |
| | d. Penggantian Tiket pesawat narasumber | Orang Tiket | Ekonomi (at-cost) |
| 3 | Penggantian Diklat/ bahan ajar | Makalah | 100.000.- |
| 4 | Biaya Akomodasi dan Konsumsi | OH | 500.000.- |
| 5 | Uang Saku Peserta | OH | 50.000.- |
| 6 | Honor Instruktur Senam Per Angkatan | Paket | 1.000.000.- |

1.3. Diklat/ Penyuluhan/ Sosialisasi Keterampilan untuk masyarakat

| No | Uraian | Satuan | Standar (Rp) |
|----|---|--------------|--------------|
| 1 | Honor Narasumber/ Widyaiswara/ Praktisi/ Pakar/ Pejabat | | |
| | a. Pusat/ Instansi Vertikal Tingkat Provinsi | | |
| | - Menteri/ Pejabat setingkat Menteri | OJP | 1.700.000.- |
| | - Eselon I | OJP | 1.400.000.- |
| | - Eselon II | OJP | 1.000.000.- |
| | - Eselon III | OJP | 900.000.- |
| | - Pakar/praktisi/Pembicara Khusus non eselon | OJP | 750.000.- |
| | b. Provinsi/Kabupaten | | |
| | - Eselon I | OJP | 750.000.- |
| | - Eselon II | OJP | 500.000 |
| | - Eselon III kebawah | OJP | 400.000 |
| | - Pakar/praktisi/Pembicara Khusus non eselon | OJP | 300.000 |
| 2 | Biaya Transportasi | | |
| | Penggantian BBM untuk Narasumber | | |
| | a. 0 – 60 Km | | 100.000 |
| | b. 60 – 150 Km | | 200.000 |
| | c. 150 Km ke atas | | 300.000 |
| | d. Penggantian Tiket pesawat narasumber | Orang/ tiket | At cost |
| 3 | Penggantian Diklat/ bahan ajar | Permakalah | 100.000 |
| 4 | Biaya Akomodasi dan Konsumsi | | |
| | a. Narasumber pusat | OH | 500.000 |
| | b. Peserta dan panitia | OH | 500.000 |
| 5 | Biaya Sewa Kendaraan Observasi Lapangan | | |
| | (Bus AC 40 seat) | | |
| | a. Dalam Propinsi | Unit/ Hari | 1.500.000 |

| | | | |
|----|------------------------------------|------------|-----------|
| | b. Luar Propinsi | | |
| 6 | Uang Saku Peserta | Unit/ Hari | 2.100.000 |
| 7 | Uang Transport Peserta | OH | 50.000 |
| 8 | Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama | OH | 75.000 |
| 9 | Honor Pembawa Acara/ MC | OH | 100.000 |
| 10 | Honor Instruktur Pembinaan fisik | OH | 75.000 |
| | | | 250.000 |

F. STANDARISASI BAGI ANGGOTA ORGANISASI YANG SUMBER DANANYA BERASAL DARI APBD UNTUK MELAKUKAN KEGIATANNYA DI ATUR OLEH ORGANISASI TERSEBUT DENGAN KETENTUAN

| No | Uraian |
|----|--|
| 1 | Biaya perjalanan untuk ketua Organisasi Tingkat Kabupaten mengacu pada standar Perjalanan Dinas Eselon III |
| 2 | Biaya perjalanan untuk ketua Organisasi Tingkat Kecamatan mengacu pada standar Perjalanan Dinas Eselon IV |
| 3 | Biaya Perjalanan untuk anggota Organisasi Tingkat Kabupaten mengacu pada standar Perjalanan Dinas Golongan III |
| 4 | Biaya Perjalanan untuk anggota Organisasi Tingkat Kecamatan mengacu pada standar Perjalanan Dinas Golongan II |
| 5 | Penganggarannya dibebankan pada belanja penggantian transportasi |

G. BIAYA MAKSIMAL RAPAT/ SIDANG

1. Standar Biaya Honorarium Sidang/ Rapat

1.1. Uang Sidang/ Rapat Tim Baperjakat Pada BKD Bidang Pengembangan & Diklat

| a | Uraian | Satuan | Standar (Rp) |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|
| A. Uang Sidang/ Rapat Tim Baperjakat | | | |
| 1 | Honor Tim | | |
| | - Pembina | Org Per Sidang | 1.500.000.- |
| | - Wakil Pembina | Org Per Sidang | 1.250.000.- |
| | - Ketua | Org Per Sidang | 1.000.000.- |
| | - Anggota | Org Per Sidang | 850.000.- |
| | - Sekretaris Bukan Anggota | Org Per Sidang | 500.000.- |
| 2 | Honor Sekretariat Tim | | |
| | - Koordinator | Org Per Sidang | 250.000.- |
| | - Anggota | Org Per Sidang | 200.000.- |
| 3 | Honorarium MC/ Pembawa Acara | | |
| | - PNS/Non PNS | OK | 150.000.- |

| No | Uraian | Satuan | Standar (Rp) |
|--|--|----------------|--------------|
| B. Uang Sidang/ Rapat Tim Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) | | | |
| 1 | Honor Tim | | |
| | - Pembina | Org Per Sidang | 1.000.000.- |
| | - Wakil Pembina | Org Per Sidang | 800.000.- |
| | - Ketua | Org Per Sidang | 750.000.- |
| | - Anggota | Org Per Sidang | 500.000.- |
| | - Sekretaris Bukan Anggota | Org Per Sidang | 400.000.- |
| 2 | Honor Sekretariat Tim | | |
| | - Koordinator | Org Per Sidang | 250.000.- |
| | - Wakil Koordinator | Org Per Sidang | 200.000.- |
| | - Anggota | Org Per Sidang | 150.000.- |
| 3 | Honor Tim Verifikasi Tenaga Honor Daerah/Kontrak | | |
| | - Ketua | Org Per Sidang | 750.000.- |
| | - Wakil Ketua | Org Per Sidang | 600.000.- |
| | - Sekretaris | Org Per Sidang | 500.000.- |
| | - Anggota | Org Per Sidang | 400.000.- |
| | - Sekretariat | Org Per Sidang | 250.000.- |

1.2. Standar Biaya Tugas Belajar dan Izin Belajar

| es | Uraian | Satuan | Standar (Rp) |
|----|---|-----------------|---|
| 1 | Tugas Belajar | | |
| | A. Biaya Hidup dan Biaya Operasional | | |
| | - Program D1 s/d D3 | Bulan | Besarnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tersediri |
| | - Program S1 & D4 | Bulan | |
| | - Program S2 | Bulan | |
| | - Program S3 | Bulan (regular) | |
| | B. Tunjangan Buku (TB) | | |
| | - Program D3 | Semester | Besarnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tersediri |
| | - Program S1 & D4 | Semester | |
| | - Program S2 | Semester | |
| | - Dokter Spesialis | Semester | |
| | C. Bantuan Penelitian/ Penulisan Skripsi, Laporan akhir | | |
| | - Program D3 | Org kali | Besarnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tersediri |
| | - Program S1 & D4 | Org kali | |
| | - Program S2 | Org kali | |
| | - Dokter Spesialis | Org kali | |
| | D. Bantuan PEMBERANGKATAN TB yg bukan dibiayai Pemda | | 5.000.000.- |
| 2 | Izin Belajar | | |
| | A. Tunjangan Buku | | |
| | - Program D3 | Semester | 400.000.- |
| | - Program S1 & D4 | Semester | 500.000.- |
| | - Program S2 | Semester | 1.000.000.- |
| | - Dokter Spesialis | Semester | 1.500.000.- |
| | B. Bantuan Penelitian/ Penulisan Skripsi, Laporan Akhir | | |
| | - Program D3 | Org kali | 500.000.- |
| | - Program S1 & D4 | Org kali | 1.000.000.- |
| | - Program S2 | Org kali | 1.500.000.- |
| | - Dokter Spesialis | Org kali | 2.000.000.- |
| 3 | Hadiah untuk Masyarakat Berprestasi diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri | | |

H. HONORARIUM KHUSUS PADA SEKRETARIAT DAERAH

1. Honorarium pada Sekretariat Daerah

1.1. Jasa Hukum

| No | Uraian | Satuan | Standar (Rp) |
|----|---|----------------------|--------------|
| 1 | Biaya pengkajian Penyusunan Produk Hukum Kabupaten | Org Per Sidang/Rapat | 125.000,- |
| 2 | Biaya dalam Penanganan Perkara dalam Persidangan di Pengadilan | Org Per Sidang/Rapat | 250.000,- |
| 3 | Biaya Pembahasan Perkara gugatan, rangka penyusunan Eksepsi, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan dan memori banding | Orang Per Sidang | 150.000,- |
| 4 | Biaya Persidangan Setempat | Per Sidang | 1.500.000,- |
| 5 | Pelaksana Kerjasama Hukum antara Pemerintah dengan Pihak Pengacara Negara dan Pengacara Profesional akan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati. | | |
| 6 | Biaya Saksi | Orang | 100.000,- |
| 7 | Biaya Pengambilan Keputusan di Pengadilan Negeri dan PTUN | Per Kasus | 400.000,- |
| 8 | Biaya Pengajuan Banding/ Kasasi | Per Kasus | 1.000.000,- |
| 9 | Jasa Pembuatan Naskah Akademik Ranperda | Per Ranperda | 6.000.000,- |

2. Bagian Pemerintahan/ Pertanahan

2.1. Honorarium Panitia Pengadaan Tanah

| No | Uraian | Satuan | Standar (Rp) |
|----|--|--------|--------------|
| 1 | Ganti rugi tanah s/d 10 Milliar | | |
| | Ketua | Paket | 1.000.000.- |
| | Wakil Ketua | Paket | 900.000.- |
| | Sekretaris | Paket | 800.000.- |
| | Anggota | Paket | 700.000.- |
| | Sekretariat | Paket | 450.000.- |
| | Satgas | Paket | 450.000.- |
| 2 | Ganti rugi tanah 10 Milliar s/d 50 Milliar | | |
| | Ketua | Paket | 1.500.000.- |
| | Wakil Ketua | Paket | 1.300.000.- |
| | Sekretaris | Paket | 1.200.000.- |
| | Anggot | Paket | 1.000.000.- |
| | Sekretariat | Paket | 450.000.- |
| | Satgas. | Paket | 450.000.- |
| 3 | Ganti rugi tanah 50 Milliar | | |
| | Ketua | Paket | 2.400.000.- |
| | Wakil Ketua | Paket | 2.000.000.- |
| | Sekretaris | Paket | 1.800.000.- |
| | Anggota | Paket | 1.500.000.- |
| | Sekretariat | Paket | 450.000.- |
| | Satgas | Paket | 450.000.- |
| 4 | Biaya Honorarium tim penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati. | | |
| 5 | Penetapan Honorarium fasilitisasi konflik pertanahan per kasus diatur dengan keputusan Bupati Tersendiri. | | |
| 6 | Penetapan Standar Biaya Pengamanan pada Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan perikanan, Satpol PP, diatur dengan Surat Keputusan Bupati Tersendiri. | | |

I. HONORARIUM PELAYANAN TINDAK MEDIK

1. Honorarium Pelayanan Tindak Medik
- 1.1. Jasa Pelayanan Tindak Medik

| No | Uraian | Satuan | Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------|-----------|----------|---|-----|------|--|-----|-------|---------|---|--------------------|----------|----------|---|---|---|-----------------------------------|----------|----------|---|---|------------------|-----------|----------|----------|---|----------------------|-----------|----------|----------|---|------------|-----------|----------|----------|---|-------------------------------|-----------|----------|----------|---|-------------------|-----------|----------|----------|---|---------------------|-----------|----------|----------|---|--------------------------------|-----------|----------|----------|----|--------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | Jasa Dokter jaga | Orang/ shift | 125.000,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Jasa Perawat kontrol pengawas | Orang/ shift | 75.000,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Jasa Rujukan Spesialis ke Rumah Sakit | Per Kunjungan | 750.000,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Jasa Petugas Penyemprot/ Fogging Focus penyakit Demam Berdarah | Orang/ Hari | 50.000,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Bantuan biaya Transport untuk Dokter Tamu yg melakukan rawatan | Orang/ Kali | 500.000,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Bantuan BBM untuk Dokter Tamu | Per Kunjungan | 30 liter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Honor dokter hari libur | Per Shif | 175.000,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Honor Petugas Pengawas | Per Shif | 125.000,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Jasa petugas pengantar pasien kurang mampu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A. Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Propinsi Sumatera Barat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Sopir | Per Orang antar | 125.000,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Perawat | Per Orang antar | 100.000,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B. Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan Kecamatan sebagai berikut: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Tujuan</th> <th rowspan="2">BBM</th> <th colspan="2">Jasa</th> <th rowspan="2">Ket</th> </tr> <tr> <th>Sopir</th> <th>Perawat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kec. Luhak Nan Duo</td> <td>45.000,-</td> <td>15.000,-</td> <td>-</td> <td rowspan="10">BBM pada Tabel adalah batas maksimal dibayarkan at-cost</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kec.Pasaman/ Kec.Sasak Rn Pasisie</td> <td>90.000,-</td> <td>25.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Maligi/ Sikilang</td> <td>112.500,-</td> <td>50.000,-</td> <td>25.000,-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kec. Talamau/ Kinali</td> <td>135.000,-</td> <td>40.000,-</td> <td>25.000,-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Mandiingin</td> <td>135.000,-</td> <td>40.000,-</td> <td>25.000,-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kec. Gunung Tuleh/ Sungai Aur</td> <td>135.000,-</td> <td>50.000,-</td> <td>25.000,-</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Kec. Lb Melintang</td> <td>180.000,-</td> <td>50.000,-</td> <td>25.000,-</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Kec. Sungai Beremas</td> <td>180.000,-</td> <td>60.000,-</td> <td>30.000,-</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Kec. Koto Balingka/ Pegambiran</td> <td>180.000,-</td> <td>75.000,-</td> <td>35.000,-</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Kec. Ranah Batahan</td> <td>180.000,-</td> <td>75.000,-</td> <td>35.000,-</td> </tr> </tbody> </table> | | | No | Tujuan | BBM | Jasa | | Ket | Sopir | Perawat | 1 | Kec. Luhak Nan Duo | 45.000,- | 15.000,- | - | BBM pada Tabel adalah batas maksimal dibayarkan at-cost | 2 | Kec.Pasaman/ Kec.Sasak Rn Pasisie | 90.000,- | 25.000,- | - | 3 | Maligi/ Sikilang | 112.500,- | 50.000,- | 25.000,- | 4 | Kec. Talamau/ Kinali | 135.000,- | 40.000,- | 25.000,- | 5 | Mandiingin | 135.000,- | 40.000,- | 25.000,- | 6 | Kec. Gunung Tuleh/ Sungai Aur | 135.000,- | 50.000,- | 25.000,- | 7 | Kec. Lb Melintang | 180.000,- | 50.000,- | 25.000,- | 8 | Kec. Sungai Beremas | 180.000,- | 60.000,- | 30.000,- | 9 | Kec. Koto Balingka/ Pegambiran | 180.000,- | 75.000,- | 35.000,- | 10 | Kec. Ranah Batahan | 180.000,- | 75.000,- | 35.000,- |
| No | Tujuan | BBM | Jasa | | | | Ket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sopir | Perawat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kec. Luhak Nan Duo | 45.000,- | 15.000,- | - | BBM pada Tabel adalah batas maksimal dibayarkan at-cost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kec.Pasaman/ Kec.Sasak Rn Pasisie | 90.000,- | 25.000,- | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Maligi/ Sikilang | 112.500,- | 50.000,- | 25.000,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kec. Talamau/ Kinali | 135.000,- | 40.000,- | 25.000,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Mandiingin | 135.000,- | 40.000,- | 25.000,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Kec. Gunung Tuleh/ Sungai Aur | 135.000,- | 50.000,- | 25.000,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Kec. Lb Melintang | 180.000,- | 50.000,- | 25.000,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Kec. Sungai Beremas | 180.000,- | 60.000,- | 30.000,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Kec. Koto Balingka/ Pegambiran | 180.000,- | 75.000,- | 35.000,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Kec. Ranah Batahan | 180.000,- | 75.000,- | 35.000,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Kunjungan dokter spesialis ke puskesmas | Orang Per Kunjungan | 500.000,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

J. BIAYA KEGIATAN PENYUSUNAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD, PENGHAPUSAN ASSET DAN TPTGR.

1. Standar Sidang TAPD dalam rangka pembahasan APBD, Tim Penghapusan Asset
- 1.1. Standar Biaya Sidang TAPD dalam rangka pembahasan APBD, Tim Penghapusan Asset

| No | Uraian | Satuan | Standar (Rp) |
|----|--|-----------|--------------|
| I | Standar Biaya Sidang TAPD dalam pembahasan APBD, Tim Penghapusan Asset | | |
| | Ketua | PerSidang | 300.000,- |
| | Wakil Ketua | PerSidang | 250.000,- |

| No | Uraian | Satuan | Standar (Rp) |
|------|---|-----------|--------------|
| | Sekretaris | PerSidang | 200.000.- |
| | Anggota | PerSidang | 150.000.- |
| | Sekretariat | PerSidang | 100.000.- |
| II | Honor Tim Penghapusan | | |
| | Penanggungjawab | Per Paket | 500.000.- |
| | Wakil Penanggungjawab | Per Paket | 450.000.- |
| | Koordinator | Per Paket | 400.000.- |
| | Ketua | Per Paket | 350.000.- |
| | Wakil Ketua | Per Paket | 325.000.- |
| | Sekretaris | Per Paket | 300.000.- |
| | Anggota | Per Paket | 250.000.- |
| | Sekretariat | Per Paket | 150.000.- |
| III | Honor Tim Verifikasi BMD | | |
| | Ketua | Per Paket | 350.000.- |
| | Sekretaris | Per Paket | 300.000.- |
| | Anggota | Per Paket | 250.000.- |
| | Sekretariat | Per Paket | 150.000.- |
| IV | Honor Tim Penjual/Pelelangan BMD selain tanah dan/ atau Bangunan | | |
| | Penanggungjawab | Per Paket | 500.000.- |
| | Wakil Penanggungjawab | Per Paket | 450.000.- |
| | Koordinator | Per Paket | 400.000.- |
| | Ketua | Per Paket | 350.000.- |
| | Sekretaris | Per Paket | 300.000.- |
| | Anggota | Per Paket | 250.000.- |
| | Sekretariat | Per Paket | 150.000.- |
| V | Honorarium TPTGR | | |
| | Ketua | PerSidang | 300.000.- |
| | Wakil Ketua | PerSidang | 250.000.- |
| | Sekretaris | PerSidang | 200.000.- |
| | Anggota | PerSidang | 150.000.- |
| | Sekretariat | PerSidang | 100.000.- |
| VI | Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri | | |
| VII | Honor Tim penyusun Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Laporan Semester diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri. | | |
| VIII | Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja pada BPKAD selaku PPKD diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri | | |
| IX | Honor Tim Peneliti dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri | | |
| X | Honor Tim KUA-PPAS diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri | | |
| XI | Honor Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Daerah diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri. | | |
| XII | Honorarium Tim Pengelola Sistim Informasi Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Bupati Tersendiri. | | |

1.2. Standar Honorarium ULP dan Perizinan Terpadu

| NO | Uraian |
|----|--|
| 1 | Khusus Honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP), Perizinan Terpadu diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri. |

K. BIAYA HONORARIUM

| No | URAIAN | SATUAN | HARGA | KET |
|----|--|------------|-------------|-----|
| 1 | HONOR PENANGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN | | | |
| | 1.1. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN | | | |
| | a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 Juta | Org/ Bulan | 360.000.- | |
| | b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta | Org/ Bulan | 450.000.- | |
| | c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta | Org/ Bulan | 550.000.- | |
| | d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar | Org/ Bulan | 600.000.- | |
| | e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar | Org/ Bulan | 800.000.- | |
| | f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar | Org/ Bulan | 850.000.- | |
| | g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar | Org/ Bulan | 900.000.- | |
| | h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar | Org/ Bulan | 1.250.000.- | |
| | i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar | Org/ Bulan | 1.500.000.- | |
| | j. Nilai pagu dana diatas Rp.50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar | Org/ Bulan | 1.700.000.- | |
| | k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar | Org/ bulan | 2.000.000.- | |
| | l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar | Org/ Bulan | 2.450.000.- | |
| | m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar | Org/ bulan | 2.800.000.- | |
| | n. Nilai pagu dana diatas Rp.500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar | Org/ Bulan | 3.200.000.- | |
| | o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 triliun | Org/ bulan | 3.500.000.- | |
| | p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun | Org/ Bulan | 4.100.000.- | |
| | 1.2. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN | | | |
| | a. Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta | Org/ Bulan | 260.000.- | |
| | b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta | Org/ Bulan | 300.000.- | |
| | c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta | Org/ Bulan | 350.000.- | |
| | d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar | Org/ Bulan | 450.000.- | |
| | e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar | Org/ Bulan | 550.000.- | |
| | f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar | Org/ Bulan | 600.000.- | |
| | g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar | Org/ Bulan | 650.000.- | |
| | h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar | Org/ Bulan | 900.000.- | |
| | i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25Miliar s/d Rp. 50 Miliar | Org/ Bulan | 1.050.000.- | |
| | j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar | Org/ Bulan | 1.200.000.- | |
| | k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75Miliar s/d Rp. 100 Miliar | Org/ bulan | 1.400.000.- | |
| | l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar | Org/ Bulan | 1.700.000.- | |
| | m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar | Org/ bulan | 2.000.000.- | |
| | n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar | Org/ Bulan | 2.250.000.- | |
| | o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 triliun | Org/ bulan | 2.500.000.- | |
| | p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun | Org/ Bulan | 2.900.000.- | |
| | 1.3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN | | | |
| | a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta | Org/ Bulan | 150.000.- | |
| | b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta | Org/ Bulan | 200.000.- | |
| | c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta | Org/ Bulan | 225.000.- | |
| | d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta | Org/ Bulan | 250.000.- | |
| | e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar | Org/ Bulan | 275.000.- | |
| | f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar | Org/ Bulan | 300.000.- | |
| | g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar | Org/ Bulan | 325.000.- | |
| | h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar | Org/ Bulan | 350.000.- | |
| | i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar | Org/ Bulan | 400.000.- | |
| | Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas | Org/ Bulan | 450.000.- | |
| | 1.4. PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM (PENGGUNA ANGGARAN) | | | |
| | a. Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta | Org/ Bulan | 360.000.- | |
| | b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta | Org/ Bulan | 450.000.- | |
| | c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta | Org/ Bulan | 550.000.- | |
| | d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar | Org/ Bulan | 600.000.- | |
| | e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar | Org/ Bulan | 800.000.- | |
| | f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar | Org/ Bulan | 850.000.- | |
| | g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar | Org/ Bulan | 900.000.- | |
| | h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar | Org/ Bulan | 1.250.000.- | |
| | i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25Miliar s/d Rp. 50 Miliar | Org/ Bulan | 1.500.000.- | |
| | j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar | Org/ Bulan | 1.700.000.- | |
| | k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75Miliar s/d Rp. 100 Miliar | Org/ Bulan | 2.000.000.- | |
| | l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar | Org/ Bulan | 2.450.000.- | |

| | | | | |
|---|--|------------|-------------|--|
| m. | Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar | Org/ Bulan | 2.800.000.- | |
| n. | Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar | Org/ Bulan | 3.200.000.- | |
| o. | Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 triliun | Org/ Bulan | 3.500.000.- | |
| p. | Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun | Org/ Bulan | 4.100.000.- | |
| 1.5. BENDAHARA PENGELUARAN/ PEMEGANG UANG MUKA CABANG (BPUMC) | | | | |
| a. | Nilai pagu dana s/d Rp. 100 Juta | Org/ Bulan | 260.000.- | |
| b. | Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta | Org/ Bulan | 300.000.- | |
| c. | Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta | Org/ Bulan | 350.000.- | |
| d. | Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar | Org/ Bulan | 450.000.- | |
| e. | Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar | Org/ Bulan | 550.000.- | |
| f. | Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar | Org/ Bulan | 600.000.- | |
| g. | Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar | Org/ Bulan | 650.000.- | |
| h. | Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar | Org/ Bulan | 900.000.- | |
| i. | Nilai pagu dana diatas Rp. 25Miliar s/d Rp. 50 Miliar | Org/ Bulan | 1.050.000.- | |
| j. | Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar | Org/ Bulan | 1.200.000.- | |
| k. | Nilai pagu dana diatas Rp. 75Miliar s/d Rp. 100 Miliar | Org/ Bulan | 1.400.000.- | |
| l. | Nilai pagu dana diatas Rp.100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar | Org/ Bulan | 1.700.000.- | |
| m. | Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar | Org/ Bulan | 2.000.000.- | |
| n. | Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar | Org/ Bulan | 2.250.000.- | |
| o. | Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 triliun | Org/ Bulan | 2.500.000.- | |
| p. | Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun | Org/ Bulan | 2.900.000.- | |
| 1.6. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN | | | | |
| a. | Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta | Org/ Bulan | 250.000.- | |
| b. | Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta | Org/ Bulan | 250.000.- | |
| c. | Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta | Org/ Bulan | 300.000.- | |
| d. | Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta | Org/ Bulan | 350.000.- | |
| e. | Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar | Org/ Bulan | 375.000.- | |
| f. | Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar | Org/ Bulan | 400.000.- | |
| g. | Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar | Org/ Bulan | 425.000.- | |
| h. | Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar | Org/ Bulan | 450.000.- | |
| i. | Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar | Org/ Bulan | 450.000.- | |
| j. | Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar | Org/ Bulan | 475.000.- | |
| 1.7. BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN | | | | |
| a. | Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta | Org/ Bulan | 100.000.- | |
| b. | Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta | Org/ Bulan | 125.000.- | |
| c. | Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta | Org/ Bulan | 150.000.- | |
| d. | Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta | Org/ Bulan | 175.000.- | |
| e. | Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar | Org/ Bulan | 200.000.- | |
| f. | Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar | Org/ Bulan | 225.000.- | |
| g. | Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar | Org/ Bulan | 250.000.- | |
| h. | Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar | Org/ Bulan | 275.000.- | |
| i. | Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar | Org/ Bulan | 300.000.- | |
| j. | Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas | Org/ Bulan | 325.000.- | |
| 1.8. PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN | | | | |
| a. | Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta | Org/ Bulan | 75.000.- | |
| b. | Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta | Org/ Bulan | 100.000.- | |
| c. | Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta | Org/ Bulan | 125.000.- | |
| d. | Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta | Org/ Bulan | 150.000.- | |
| e. | Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar | Org/ Bulan | 175.000.- | |
| f. | Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar | Org/ Bulan | 200.000.- | |
| g. | Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar | Org/ Bulan | 225.000.- | |
| h. | Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar | Org/ Bulan | 250.000.- | |
| i. | Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar | Org/ Bulan | 275.000.- | |
| j. | Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar | Org/ Bulan | 300.000.- | |
| 1.9. PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG | | | | |
| a. | Nilai asset tetap s/d 1 milliar | Org/ Bulan | 450.000.- | |
| b. | Nilai asset tetap 1 milliar s/d 10 milliar | Org/ Bulan | 600.000.- | |
| c. | Nilai asset tetap 10 milliar s/d 100 milliar | Org/ Bulan | 750.000.- | |
| d. | Nilai asset tetap 100 milliar s/d 1 triliun | Org/ Bulan | 1.000.000.- | |
| 1.10. PEMBANTU PENGURUS BARANG DAN PENYIMPAN BARANG/PENYIMPAN MEDIA SETORAN PAJAK DAN RESTRIBUSI | | | | |
| a. | Nilai asset tetap s/d 1 milliar | Org/ Bulan | 250.000.- | |
| b. | Nilai asset tetap 1 milliar s/d 10 milliar | Org/ Bulan | 300.000.- | |
| c. | Nilai asset tetap 10 milliar s/d 100 milliar | Org/ Bulan | 350.000.- | |
| d. | Nilai asset tetap 100 milliar s/d 1 triliun | Org/ Bulan | 450.000.- | |
| e. | Honor pembantu pengurus barang sekolah(SDN,SLTPN,SLTAN) | Org/ Bulan | 150.000.- | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 4 | HONOR PENGELOLA PNBP 4.1. ATASAN LANGSUNG BENDAHARA a. Nilai Penerimaan s/d Rp. 200 Juta b. Nilai Penerimaan Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta c. Nilai Penerimaan Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar d. Nilai Penerimaan Rp. 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 Miliar 4.2. BENDAHARA a. Nilai Penerimaan s/d Rp. 200 Juta b. Nilai Penerimaan Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta c. Nilai Penerimaan Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar d. Nilai Penerimaan Rp. 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 Miliar 4.3. SEKRETARIAT/ ANGGOTA Sekretariat/ anggota maksimum 5 orang | Org/ Bln Org/ Bln Org/ Bln Org/ Bln Org/ Bln Org/ Bln Org/ Bln Org/ Bln Org/ Bln Org/ Bln Org/ Bln | 450.000.- 550.000.- 600.000.- 700.000.- 800.000.- 300.000.- 400.000.- 500.000.- 600.000.- 700.000.- 200.000.- | |
| Catatan : Alokasi dana untuk honorarium seluruh pengelolaan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PNBP masing-masing Satuan Kerja. | | | | |
| 5 | HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN 6.1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah a. Pengarah b. Wakil Pengarah c. Penanggung jawab d. Koordinator e. Ketua/Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota h. Sekretariat | Org/ paket Org/ paket Org/ paket Org/ paket Org/ paket Org/ paket Org/ paket Org/ paket | 750.000.- 700.000.- 600.000.- 500.000.- 400.000.- 350.000.- 300.000.- 200.000.- | |
| Catatan : - Pembentukan tim dilaksanakan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan bersifat lintas sektoral. - Yang dibolehkan masuk tim adalah PNS dan Honor Daerah | | | | |
| 6 | 6.1. HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT 1. Penanggungjawab/ Pembina 2. Ketua/ Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota 6.2. HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL 1. Penanggungjawab 2. Redaktur 3. Penyunting/ Editor 4. Redaktur Pelaksana 5. Sekretariat 6. Pembuat artikel 6.3. HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH 1. Penanggungjawab 2. Redaktur 3. Penyunting/ Editor 4. Redaktur Pelaksana 5. Sekretariat 6. Pembuat artikel | OB OB OB OB Oter Oter Oter Oter Oter Halaman Oter Oter Oter Oter Oter Halaman | 400.000.- 300.000.- 250.000.- 200.000.- 450.000.- 350.000.- 275.000.- 180.000.- 150.000.- 150.000.- 400.000.- 300.000.- 250.000.- 180.000.- 150.000.- 100.000.- | |
| 7 | 7.1. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE 1. Penanggung Jawab 2. Redaktur 3. Editor 4. Web Admin 5. Web Developer 6. Pembuat Artikel 7. Penerjemah | OB OB OB OB OB Halaman 1500 Karakter | 500.000.- 450.000.- 400.000.- 350.000.- 300.000.- 100.000.- 100.000.- | |
| 8 | 8.1. UANG SIDANG/ RAPAT PANITIA/ TIM 1. Golongan I & II 2. Golongan III 3. Golongan IV Honor Muspida diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati | Org/ Sdg Org/ Sdg Org/ Sdg | 50.000.- 60.000.- 75.000.- | |
| Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Sidang sebanyak-banyaknya 2 x sidang sehari Sidang ditetapkan dengan Surat Tugas dan dilengkapi dengan daftar hadir | | | | |

L. BIAYA PELAKSANAAN UAS DAN UAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PADA DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA

1. Biaya Pelaksanaan UAS dan UAN

1.1. Standar Biaya Pelaksanaan UAS dan UAN

| No | Uraian | Satuan | Standar (Rp) |
|----|--|---------------|--------------|
| | Honorarium Pembuat Soal (UAN) | Per Bid Study | 150.000.- |
| | Honorarium Pendamping Pembuat Soal | Per Bid Study | 150.000.- |
| | Honorarium Editing Soal | Per Bid Study | 150.000.- |
| | Panitia Rayon (UPTD | | |
| | - Ketua | Orang/ Keg | 450.000.- |
| | - Sekretaris | Orang/ Keg | 400.000.- |
| | - Anggota | Orang/ Keg | 350.000.- |
| | Panitia Sub Rayon (Sekolah) | | |
| | - Ketua | Orang/ Keg | 450.000.- |
| | - Sekretaris | Orang/ Keg | 400.000.- |
| | - Anggota | Orang/ Keg | 350.000.- |
| | Panitia Sekolah Pelaksana | | |
| | - Ketua | Orang/ Keg | 450.000.- |
| | - Sekretaris | Orang/ Keg | 400.000.- |
| | - Bendahara | Orang/ Keg | 350.000.- |
| | - Anggota | Orang/ Keg | 300.000.- |
| | Pengawas Ruang | | 350.000.- |
| | Pemeriksaan hasil Ujian Menggunakan Alat / Mesin (Scanner) | Per Lembar | 1.000.- |
| | Pemeriksaan Ujian Manual | Orang/ Hari | 75.000.- |

1.2. Pelaksanaan Lomba-lomba dan Penilaian

| No | Uraian | Satuan | Standar (Rp) |
|----|--|-----------------|---|
| 1 | Pelaksanaan Lomba Perorangan Tingkat Kabupaten | | |
| | • Honorarium Juri | | 200.000.- |
| | • Hadiah Pemenang berupa tabanas (uang) | | |
| | - Juara I | Pemenang/ lomba | Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tersendiri |
| | - Juara II | Pemenang/ lomba | |
| | - Juara III | Pemenang/ lomba | |
| | - Juara Harapan I | Pemenang/ lomba | |
| | - Juara Harapan II | Pemenang/ lomba | |
| | - Juara Harapan III | Pemenang/ lomba | |
| | • Hadiah Pemenang berupa Trophy/Bingkisan, senilai | | |
| | - Juara I | Pemenang/ lomba | 250.000.- |
| | - Juara II | Pemenang/ lomba | 200.000.- |
| | - Juara III | Pemenang/ lomba | 150.000.- |
| | - Juara Harapan I,II dan III | Pemenang/ lomba | 100.000.- |
| | • Bantuan Transport Juri | | |
| | • Bantuan Transport Juri dari Wilayah Kabupaten Pasaman Barat | Orang/ Hari | 50.000.- |
| | • Bantuan Transport Juri dari Luar Wilayah Kabupaten Pasaman Barat | Orang/ Hari | 150.000.- |
| 2 | Pelaksanaan Lomba Per Grup Tingkat Kabupaten Pasaman Barat | | |
| | • Honorarium Juri | | 200.000.- |
| | • Hadiah Pemenang berupa tabanas (Uang) | | |
| | - Juara I | Pemenang/ lomba | Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tersendiri |
| | - Juara II | Pemenang/ lomba | |
| | - Juara III | Pemenang/ lomba | |

| No | Uraian | Satuan | Standar (Rp) |
|----|--|-----------------|---|
| | - Juara Harapan I | Pemenang/ lomba | Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tersendiri |
| | - Juara Harapan II | Pemenang/ lomba | |
| | - Juara Harapan III | Pemenang/ lomba | |
| | • Hadiah Pemenang berupa Trophy/Bingkisan, senilai | | |
| | - Juara I | Pemenang/ lomba | 400.000.- |
| | - Juara II | Pemenang/ lomba | 300.000.- |
| | - Juara III | Pemenang/ lomba | 200.000.- |
| | - Juara Harapan I,II dan III | Pemenang/ lomba | 150.000.- |
| | • Bantuan Transport Juri | | |
| | • Bantuan Transport Juri dari Wilayah Kabupaten Pasaman Barat | Orang/ Hari | 50.000.- |
| | • Bantuan Transport Juri dari Luar Wilayah Kabupaten Pasaman Barat | Orang/ Hari | 150.000.- |
| 3 | Reward Atas Prestasi Siswa | | |
| | • Peraih Nilai Ujian Nasional Terbaik Tingkat SD | | |
| | - Juara I | Orang | Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tersendiri |
| | - Juara II | Orang | |
| | - Juara III | Orang | |
| | • Peraih Nilai Ujian Nasional Terbaik Tingkat SMP/MTs | | |
| | - Juara I | Orang | Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tersendiri |
| | - Juara II | Orang | |
| | - Juara III | Orang | |
| | • Peraih Nilai Ujian Nasional Terbaik Tingkat SMS/MA/SMK | | |
| | - Juara I | Orang | Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tersendiri |
| | - Juara II | Orang | |
| | - Juara III | Orang | |
| | • Pemenang Lomba Tingkat Provinsi | | |
| | - Juara I | Orang | Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tersendiri |
| | - Juara II | Orang | |
| | - Juara III | Orang | |
| | - Grup diatas 3 (tiga) orang | Grup | |
| | • Pemenang Lomba Tingkat Nasional | | |
| | - Juara I | Orang | Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tersendiri |
| | - Juara II | Orang | |
| | - Juara III | Orang | |
| | - Grup diatas 3 (tiga) orang | Grup | |
| | • Pemenang Lomba Tingkat Internasional | | |
| | - Perorangan | Orang | Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tersendiri |
| | - Grup diatas 3 (tiga) orang | Grup | |
| 5 | Transport dan Uang Saku Siswa mengikuti lomba dan pelatihan | | |
| | - Transport Siswa | | |
| | - Transport dalam wilayah Pasaman Barat | Orang/ Hari | 50.000.- |
| | - Transport Keluar Wilayah Pasbar dalam Provinsi | Orang/ Hari PP | 150.000.- |

| No | Uraian | Satuan | Standar (Rp) |
|----|--|---------------|--------------|
| | - Transport keluar Provinsi dengan Pesawat | Orang/Hari PP | 1.500.000.- |
| | - Transpot Keluar Pasaman Barat dengan jalan Darat | Orang/Hari PP | 500.000.- |
| 6 | Uang Saku Siswa (uang harian) | | |
| | - Dalam Kab. Pasaman Barat | Orang/Hari | 50.000.- |
| | - Luar Kab. Pasaman Barat dalam Provinsi | Orang/Hari | 150.000.- |
| | - Luar Provinsi Sumatera Barat | Orang/Hari | 300.000.- |
| | - Luar Negeri | Orang/Hari | 600.000.- |

1.3. Standar Honorarium Kegiatan pada Budaya dan Pariwisata

| No | Uraian | Satuan | Standar (Rp) |
|----|---|-----------|--------------|
| 1 | Honor Penari | Org/ Kali | 200.000.- |
| 2 | Honor Pemusik | Org/ Kali | 200.000.- |
| 3 | Honor Penyanyi | Org/ Kali | 300.000.- |
| 4 | Honor Teknisi Lighting | Org/ Kali | 250.000.- |
| 5 | Honor teknisi Sound System | Org/ Kali | 250.000.- |
| 6 | Penggantian Transport Penari | Org/ Kali | 300.000.- |
| 7 | Penggantian Transport Pemusik | Org/ Kali | 300.000.- |
| 8 | Penggantian Transport Penyanyi | Org/ Kali | 200.000.- |
| 9 | Penggantian Transport Juri wilayah Pasbar | Org/ Kali | 100.000.- |
| 10 | Penggantian Transport Juri Luar Kab. Pasbar | Org/ Kali | 200.000.- |
| 11 | Honor Moderator | Org/ Kali | 200.000.- |

M. BIAYA SEWA RUMAH JABATAN

1. Biaya Sewa Rumah Bagi Pejabat Struktural pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman barat

1.1. Standar Biaya Sewa Rumah Jabatan bagi Pejabat yang tidak dapat Fasilitas Rumah Dinas

| No | Uraian | Satuan | Standar (Rp) |
|----|---|-----------|--------------|
| 1 | Asisten, Kaban, Kadis, Inspektur & Staf Ahli | Per Tahun | 10.000.000.- |
| 2 | Kepala Kantor, Direktur RSUD | Per Tahun | 8.000.000.- |
| 3 | Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah | Per Tahun | 6.000.000.- |
| 4 | Dokter Spesialias | Per Tahun | 6.000.000.- |
| 5 | Apabila Suami Istri sama-sama menduduki jabatan sebagaimana dimaksud angka 1 s/d 4 hanya dapat dibayarkan bantuan sewa rumah adalah salah satunya | | |

1.2. Standar Biaya Tunjangan Perumahan DPRD

| No | Uraian | Satuan | Standar (Rp) |
|----|--|--------|--------------|
| 1 | Standar Biaya untuk tunjangan perumahan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah tersendiri dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. | | |

N. BELANJA PEGAWAI

1 Belanja Pegawai

1.1. Belanja Pegawai Non PNS

| No | Uraian | Satuan | Standar (Rp) |
|----|---|--------|--------------|
| 1 | Belanja Honorarium | | |
| | Belanja Honor Daerah | | |
| | • Tenaga Adminstrasi | Bulan | 700.000.- |
| | • Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah | Bulan | 1.500.000.- |
| | • Apoteker Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah | Bulan | 1.500.000.- |
| | • Dokter Spesialis Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah | Bulan | 15.000.000.- |
| | • Guru, Bidan dan Perawat | Bulan | 700.000.- |
| | • Sopir, Satpam, Petugas Kebersihan Kantor | Bulan | 700.000.- |

1.2. Tambahan Penghasilan PNS

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban kerja diberikan kepada PNS dengan besaran sebagai berikut :

| No | Jabatan/ Eselonering | Satuan | Standar (Rp) |
|---|--|----------|--------------|
| 1 | Eselon II/a | Org/ Bln | 5.000.000.- |
| 2 | Eselon II/b/ Staf Ahli | Org/ Bln | 3.000.000.- |
| 3 | Eselon III/a | Org/ Bln | 2.000.000.- |
| 4 | Eselon III/b | Org/ Bln | 1.750.000.- |
| 5 | Eselon IV/a | Org/ Bln | 1.250.000.- |
| 6 | Eselon IV/b | Org/ Bln | 1.000.000.- |
| 7 | Pegawai Struktural Non Eselon Gol III dan IV | Org/ Bln | 450.000.- |
| 8 | Pegawai Struktural Non Eselon Gol I dan II | Org/ Bln | 350.000.- |
| 9 | Kepala SD | Org/ Bln | 400.000.- |
| 10 | Kepala SLTP | Org/ Bln | 500.000.- |
| 11 | Kepala SLTA | Org/ Bln | 500.000.- |
| 12 | Pengawas/ Penilik | Org/ Bln | 500.000.- |
| 13 | Guru, Tenaga Kesehatan | Org/ Bln | 200.000.- |
| 14 | Khusus Daerah Terpencil (Kep. SD, Guru TK, SD, Tenaga Kesehatan) | Org/ Bln | 500.000.- |
| 15 | Dokter PNS, Apoteker dan tenaga Medis lainnya yang setingkat. | Org/ Bln | 600.000.- |
| 16 | Pegawai Fungsional lainnya Golongan III dan IV | Org/ Bln | 400.000.- |
| 17 | Pegawai Fungsional lainnya Golongan I dan II | Org/ Bln | 350.000.- |
| Tambahan Penghasilan bagi pejabat Fungsional pada Inspektorat sbb | | | |
| 1 | Pejabat Pengawas Pemerintah Madya/ Auditor Madya Gol IV/b keatas | Org/ Bln | 2.500.000.- |
| 2. | Pejabat Pengawas Pemerintah Madya/ Auditor Madya Gol IV/a. | Org/ Bln | 2.250.000.- |
| 3. | Pejabat Pengawas Pemerintah Muda dan Auditor Muda Gol III/d. | Org/ Bln | 2.000.000.- |
| 4. | Pejabat Pengawas Pemerintah Muda dan Auditor Muda Gol III/c. | Org/ Bln | 1.750.000.- |
| 5. | Pejabat Pengawas Pemerintah Pertama/ Auditor Pertama Gol III/b | Org/ Bln | 1.500.000.- |
| 6. | Pejabat Pengawas Pemerintah Pertama/ Auditor Pertama Gol III/a | Org/ Bln | 1.250.000.- |
| 7. | Auditor Terampil Gol II/c – II/d | Org/ Bln | 1.000.000.- |
| 8. | Staf Fungsional II/d kebawah | Org/ Bln | 750.000.- |

| HONORARIUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMERIKSAAAN REGULER | | | |
|--|--|-----------------|-------------|
| I | Pemeriksaan Reguler pada : SKPD Kecamatan, Nagari, UPTD (Puskesmas, Sekolah) sbb | | |
| | 1. Penanggungjawab | Org/Paket/Obrik | 1.350.000.- |
| | 2. Dalnis | Org/Paket/Obrik | 1.250.000.- |
| | 3. Ketua TIM | Org/Paket/Obrik | 1.200.000.- |
| | 4. Anggota TIM | Org/Paket/Obrik | 900.000.- |
| II | Pemeriksaan Reguler pada : SKPD (Badan, Dinas dan Kantor) sbb | | |
| | 1. Penanggungjawab | Org/Paket/Obrik | 2.000.000.- |
| | 2. Dalnis | Org/Paket/Obrik | 1.750.000.- |
| | 3. Ketua TIM | Org/Paket/Obrik | 1.600.000.- |
| | 4. Anggota TIM | Org/Paket/Obrik | 1.600.000.- |
| HONORARIUM KHUSUS PADA INSPEKTORAT | | | |
| I | Honorarium terhadap pengawasan kegiatan pembangunan Fisik dan Non Fisik sbb: | | |
| | 1. Pembina | Triwulan | 2.500.000.- |
| | 2. Wakil Pembina | Triwulan | 2.250.000.- |
| | 3. Penanggung Jawab | Triwulan | 2.100.000.- |
| | 4. Koordinator | Triwulan | 1.800.000.- |
| | 5. Ketua Tim | Triwulan | 1.500.000.- |
| | 6. Wakil Ketua | Triwulan | 1.200.000.- |
| | 7. Sekretaris | Triwulan | 1.100.000.- |
| | 8. Anggota | Triwulan | 1.000.000.- |
| II | Honorarium Tim Pembahasan Penyelesaian dan Koordinasi hasil Pemeriksaan BPK RI, Depdagri dan Inspektorat Provinsi sbb: | | |
| | 1. Pembina | Triwulan | 2.100.000.- |
| | 2. Wakil Pembina | Triwulan | 2.000.000.- |
| | 3. Penanggung Jawab | Triwulan | 1.750.000.- |
| | 4. Koordinator | Triwulan | 1.700.000.- |
| | 5. Ketua Tim | Triwulan | 1.600.000.- |
| | 6. Wakil Ketua | Triwulan | 1.500.000.- |
| | 7. Sekretaris | Triwulan | 1.300.000.- |
| | 8. Anggota | Triwulan | 1.250.000.- |
| | 9. Sekretariat | Triwulan | 1.000.000.- |

1.3. Tambahan Penghasilan PNS

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada PNS yang ditugaskan sebagai Dokter Spesialis dengan besaran sebagai berikut :

| No | Jabatan | Satuan | Standar (Rp) |
|----|----------------------|----------|--------------|
| 1 | Dokter Spesialis PNS | Org/ Bln | 7.500.000.- |

1.4. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berpotensi menanggung resiko pada keselamatan diri pribadi dengan besaran sebagai berikut :

| No | Jabatan | Satuan | Standar (Rp) |
|----|-------------------|----------|--------------|
| 1 | Petugas Radiologi | Org/ Bln | 500.000.- |

1.5. Honorarium Petugas PBB
Honorarium Petugas PBB pada Dinas Pendapatan Daerah

| No | Uraian | Satuan | Standar (Rp) |
|----|---|----------|--------------|
| 1 | Petugas Entri Data PBB | Org/ Bln | 1.400.000.- |
| 2 | Petugas Operator Consule Permasalahan PBB | Org/ Bln | 2.000.000.- |
| 3 | Petugas Fungsional Penilai Objek PBB | Org/ Bln | 2.000.000.- |
| 4 | Petugas Fungsional Pengukur Objek PBB | Org/ Bln | 2.000.000.- |
| 5 | Teknisi Aplikasi PBB | Org/ Bln | 1.000.000.- |

1.6 Honorarium Pengkoordinasian dan Pengendalian Raskin
Honorarium Pengkoordinasian dan Pengendalian Raskin Kabupaten Pasaman Barat

| No | Uraian | Satuan | Standar (Rp) |
|---|-----------------|-----------|--------------|
| Honorarium Pengkoordinasian & Pengendalian Raskin | | | |
| 1 | Pengarah | Per Bulan | 500.000.- |
| 2 | Wakil Pengarah | Per Bulan | 450.000.- |
| 3 | Penanggungjawab | Per Bulan | 400.000.- |
| 4 | Ketua | Per Bulan | 300.000.- |
| 5 | Wakil Ketua | Per Bulan | 275.000.- |
| 6 | Sekretaris | Per Bulan | 250.000.- |
| 7 | Anggota | Per Bulan | 200.000.- |

O. LEMBUR PNS DAN NON PNS

| No | Uraian | Satuan | Standar (Rp) |
|---|-------------------|----------|--------------|
| Satuan Uang Lembur PNS/ Non PNS (maksimal 20 Jam/Bulan) | | | |
| 1 | PNS | | |
| | • Golongan I | Org/ Jam | 9.000.- |
| | • Golongan II | Org/ Jam | 10.000.- |
| | • Golongan III | Org/ Jam | 12.500.- |
| | • Golongan IV | Org/ Jam | 15.000.- |
| 2 | Honor Daerah/ PTT | Org/ Jam | 9.000.- |
| 3 | Tenaga Kontrak | Org/ Jam | 9.000.- |

Penjelasan :

- Pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan lembur maksimal 20 jam per bulan termasuk hari libur
- Terhadap Pegawai yang ditugaskan diluar jam kerja (Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya dihitung 200% dari tarif lembur

P. UANG DUKA/ WAFAT/ TEWAS

| No | Uraian | PNS (Rp) | Honor Daerah (Rp) |
|----|---|--------------|-------------------|
| 1 | Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan diluar kabupaten | 15.000.000.- | 5.000.000.- |
| 2 | Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan diluar kabupaten | 6.000.000.- | 3.000.000.- |
| 3 | Meninggal tidak dalam kedinasan | 5.000.000.- | 2.500.000.- |
| 4 | Suami/ Istri meninggal | 2.500.000.- | 1.000.000.- |
| 5 | Orang tua/ Anak meninggal | 1.000.000.- | 500.000.- |

Penjelasan:

- Untuk Poin 1 dan 2 dilengkapi dengan : (1). Surat Perintah Tugas pada saat kejadian (2). Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang (3). SK Penempatan terakhir.
- Poin 3 dilengkapi dengan : (1). Surat Keterangan Kematian dari Instansi terkait.
- Untuk poin 4 dan 5 dilengkapi dengan : (1). Surat Keterangan Ahli Waris (2). Surat Keterangan Kematian dari Instansi terkait (3). Surat Permohonan Ahli Waris.

Q. STANDAR BIAYA PERAWATAN KENDARAAN

1. Standar Biaya Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

1.1. Biaya Pemeliharaan Kendaraan bermotor menurut merk/ CC kendaraan unit/ tahun.

| No | Merk Kendaraan/ CC | Pembuatan s/d Tahun 2010 | Pembuatan diatas Tahun 2010 |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A. Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| 1 | Nissan Terano | 17,850,000.- | 16,957,500.- |
| 2 | Toyota Land Cruiser Prado | 28,350,000.- | 26,250,000.- |
| 3 | Toyota Fortuner/Honda CRV | 28,350,000.- | 26,250,000.- |

| No | Merk Kendaraan/ CC | Pembuatan s/d Tahun 2010 | Pembuatan diatas Tahun 2010 |
|---|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 4 | Mitsubishi L-300 | 15,225,000.- | 14,700,000.- |
| 5 | Toyota Kijang LSX/LGX/Krista | 14,700,000.- | 11,550,000.- |
| 6 | Toyota Avanza/ Daihatsu Xenia | 14,650,000.- | 13,125,000.- |
| 7 | Toyota Altis | 18,325,000.- | 17,325,000.- |
| 8 | Suzuki Grand Vitara | 16,983,750.- | 14,883,750.- |
| 9 | Mitsubishi Kuda | 17,325,000.- | 15,225,000.- |
| 10 | Toyota Kijang Innova | 18,325,000.- | 17,325,000.- |
| 11 | Isuzu Panther | 17,325,000.- | 15,225,000.- |
| 12 | Toyota Camry | 20,217,500.- | 18,325,000.- |
| 13 | Toyota Rush | 15,217,500.- | 13,225,000.- |
| 14 | Daihatsu Terios | 15,217,500.- | 13,225,000.- |
| 15 | Nisan Evalia | | 13,125,000.- |
| 16 | Suzuki APV | 14,650,000.- | 13,125,000.- |
| B. Kendaraan Khusus | | | |
| 1 | Ambulance | 17,850,000.- | 16,275,000.- |
| 2 | Patroli/ Vorryders | 17,850,000.- | 16,275,000.- |
| 3 | Pemadam Kebakaran Roda 6 Biasa | 18,900,000.- | 17,850,000.- |
| 4 | Pemadam Kebakaran Roda 6 Besar | 21.950,000.- | 20.750,000.- |
| 5 | Toyota Dyna Rino | 17,325,000.- | 16,275,000.- |
| 6 | Mitsubishi Colt Diesel | 17,850,000.- | 16,800,000.- |
| C. Kendaraan Double Gardan/Cabin | | | |
| 1 | Toyota Hilux | 17,650,000.- | 16,125,000.- |
| 2 | Ford | 17,650,000.- | 16,125,000.- |
| 3 | Mitsubishi Strada | 17,650,000.- | 16,125,000.- |
| 4 | Kendaraan Bermotor Roda 2(Dua) | 2.500,500.- | 1,250,000.- |

P. STANDARISASI KENDARAAN

1. Standarisasi Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Dinas Jabatan

| No | Uraian | Jenis Kendaraan | CC |
|----|--------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | Bupati | Sedan/ Jeep | 2.500/ 3.200 cc |
| 2 | Wakil Bupati | Sedan/ Jeep | 2.200/ 2.500 cc |
| 3 | Ketua DPRD | Sedan/ Minibus | 2.500 cc |
| 4 | Wakil Ketua DPRD | Sedan/ Minibus | 2.200 cc |
| 5 | Pejabat Eselon II | Sedan/ Minibus (bensin/solar) | 2.000/ 2.500 cc |
| 6 | Pejabat Eselon III | Sedan/ Minibus (bensin/solar) | 1.600/ 2.500 cc |
| 7 | Pejabat Eselon IV | Sepeda Motor | 200 cc |

Ditetapkan di Simpang Ampek
pada tanggal, 23 Oktober 2013
BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN.R

K O P S K P D

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nama :
Nip :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

- 1) Perhitungan yang terdapat pada daftar pembayaran telah saya hitung dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atas pembayaran tersebut, kami bersedia bertanggung jawab dan mengembalikan ke Kas Negara.
- 3) Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., 20..

Kepala

.....
NIP,

Jeanie purno...e

P
H

19 Feb 2013



PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 95 TAHUN 2012

2013

STANDAR BIAYA

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013



BUPATI PASAMAN BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 95 TAHUN 2012

T E N T A N G

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran 2013 perlu ditetapkan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya tahun anggaran 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan staf ahli Kabupaten Pasaman Barat;
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2012;
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Pasaman Barat;
19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Pasaman Barat;
20. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012;
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
2. Standar Biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan biaya kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
3. Standar Biaya yang bersifat Khusus, selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran

kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.

4. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
5. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
6. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

B A B II
STANDAR BIAYA
Pasal 2

Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 terdiri atas :

- a. Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013; dan
- b. Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2013.

Pasal 3

1. Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2013.
2. Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 dapat berfungsi sebagai estimasi dan batas tertinggi.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran 2013.
- (2) Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dalam keputusan Bupati tersendiri.
- (3) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2013 dapat berfungsi sebagai :
 - a. referensi penyusunan prakiraan maju; dan/atau
 - b. bahan penghitungan pagu indikatif SKPD tahun anggaran 2013.

Pasal 5

- (1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat dapat mengajukan usul standar biaya khusus kepada Bupati Pasaman Barat melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang disertai dengan surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran

untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Khusus.

- (2) Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pasaman Barat ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Ampek.
Pada Tanggal 8 November 2012



Diundangkan di Simpang Ampek
Pada tanggal 8 November 2012



Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012 Nomor

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL : 2012

PERIHAL : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

A. BELANJA BARANG DAN JASA

I. BELANJA TENAGA KONTRAK

a. Belanja Tenaga Kontrak

Tenaga Kontrak setiap bulannya menerima sebagai berikut :

❖ Jasa Tenaga Kontrak Daerah Rp. 600.000

Keterangan :

- Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah diberikan Kepada tenaga Kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak Daerah dengan Kepala SKPD diketahui oleh Bupati Pasaman Barat.
- Mekanisme pengajuan kontrak untuk tenaga kontrak, sebelum ditandatangani Bupati terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan mempedomani SK pengangkatan tenaga kontrak tahun 2012.
- Penganggaran jasa bagi tenaga kontrak Daerah dialokasikan dalam kegiatan pada kelompok Belanja Langsung jenis Belanja Barang dan Jasa Objek Belanja Jasa Kantor rincian objek Belanja Jasa Pihak Ketiga.

B. Belanja Tenaga Kontrak yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan Pengukuran dan penilaian objek dan subjek PBB akan ditetapkan dengan keputusan Bupati tersendiri.

II. BIAYA PENDIDIKAN DAN LATIHAN / BIMBINGAN TEKNIS / SOSIALISASI / WORKSHOP DAN SEJENISNYA DI LUAR DAERAH

1. Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya ke dalam dan luar propinsi diberikan biaya perjalanan dinas maksimal 5 hari.
2. Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya melebihi ketentuan diatas maka untuk hari berikutnya uang harian dibayarkan sebesar Rp. 50.000,-/ orang/ hari.
3. Terhadap pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi baik yang di dalam Propinsi maupun luar Propinsi, harus memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah.

III. BIAYA MAKAN DAN MINUM

- a. Uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honor Daerah diatur sebagai berikut :
 - Untuk Golongan IV : Rp.25.000,-/orang/hari.
 - Untuk Golongan III : Rp.22.000,-/orang/hari.
 - Untuk Golongan II, I dan Pegawai Honor Daerah : Rp.20.000,-/orang/hari.
 - Bagi PNS dan Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas tidak dibayarkan Uang Makan.
 - Untuk PNS penganggarnya pada Objek Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Rincian Objek Belanja Uang Makan Pegawai Negeri Sipil rekening 5.1.1.02.08.

- Untuk Pegawai Honor Daerah penganggarnya pada Objek Belanja Uang Makan dan Minum Harian Non PNS, Rincian Objek Uang Makan dan Minum Harian Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap rekening 5.2.1.06.01

b. Konsumsi tamu/ rapat/ lembur

| NO | JENIS BIAYA | | BIAYA | KETERANGAN |
|----|---|-----|------------------|---|
| 1 | Makan dan Snack Tamu VVIP/ VIP | | | |
| | a. Sarapan dan Snack | Rp. | 40.000,- / orang | hanya dapat dianggarkan pada sekretariat daerah, |
| | b. Makan Siang dan Snack | Rp. | 50.000,- / orang | |
| | c. Makan Malam dan Snack | Rp. | 50.000,- / orang | |
| | d. Snack tanpa makan | Rp. | 15.000,- /orang | |
| 2 | Makan Tamu | | | |
| | a. Sarapan | Rp | 10.000,- / orang | hanya dapat dianggarkan pada sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD |
| | b. Makan Siang | Rp | 20.000,- / orang | |
| | c. Makan Malam | Rp | 20.000,- / orang | |
| 3 | Makan Rapat | | | |
| | a. Makan Siang/ malam | Rp | 20.000,- / orang | |
| | b. Snack | Rp | 10.000,- / orang | |
| 4 | Makan Tamu dan petugas pengamanan dalam rangka penyampaian aspirasi dari masyarakat | Rp | 15.000,- /orang | Dianggarkan pada pada Satpol PP |
| 5 | peserta sosialisasi,bintek, seminar | | | Peserta tidak menginap |
| | a. Makan | Rp | 15.000,-/orang | |
| | b.Snack | Rp | 10.000/orang | |
| 6 | Rapat di Luar Daerah untuk Tim TAPD | | | |
| | a. Akomodasi dan Konsumsi | Rp | 400.000,-/OH | |

c. Satuan Biaya Makanan Penambahan Daya Tahan tubuh

| NO | JENIS BIAYA | | BIAYA | KETERANGAN |
|----|---|----|------------------|---|
| 1 | Makanan penambah daya tahan tubuh untuk petugas paramedis jaga malam, | Rp | 10.000,- / orang | Dianggarkan pada RSUD dan Puskesmas rawatan |
| 2 | Kegiatan pembinaan fisik pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. | Rp | 10.000,- / orang | Dianggarkan pada Satpol PP dan BPBD |
| 3 | Satpam dan petugas jaga malam | Rp | 10.000,-/ orang | Dianggarkan pada SKPD |
| 4 | Makanan penambah daya tahan tubuh untuk petugas radiologi | Rp | 12.000,-/ orang | Dianggarkan pada RSUD |

Keterangan :

Khusus untuk biaya makan penambahan daya tahan tubuh pada hari Raya Idul Fitri & Idul Adha dibayarkan 200 % dari biaya yang ditetapkan

d. Uang Makan Pasien

| NO | JENIS BIAYA | | BIAYA | KETERANGAN |
|----|--------------------------------|----|-----------|------------|
| 1 | Makan Pasien VIP | Rp | 66.000/OH | RSUD |
| 2 | Makan Pasien Klas I dan II | Rp | 45.000/OH | RSUD |
| 3 | Makan Pasien Klas III | Rp | 36.000/OH | RSUD |
| 4 | Makan Pasien Puskesmas Rawatan | Rp | 36.000/OH | Puskesmas |

IV. BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR

| NO | URAIAN | HARGA SATUAN |
|----|--|-----------------------------|
| 1 | Biaya Pemeliharaan Komputer | Rp. 500.000,-/ unit/tahun |
| 2 | Biaya Pemeliharaan Laptop/Note book | Rp. 750.000,-/ unit/tahun |
| 3 | Biaya Pemeliharaan Telephone | Rp. 350.000,-/ unit/tahun |
| 4 | Biaya Pemeliharaan mesin tik | Rp. 250.000,-/ unit/tahun |
| 5 | Biaya Pemeliharaan Telepon sentral | Rp. 2.000.000,-/ unit/tahun |
| 6 | Biaya Pemeliharaan Fax | Rp. 750.000,-/ unit/tahun |
| 7 | Biaya Pemeliharaan HT | Rp. 300.000,-/ unit/tahun |
| 8 | Biaya Pemeliharaan AC | |
| | - Ac Split | Rp. 750.000,-/ unit/tahun |
| | - Ac Standing Floor | Rp. 1.200.000,-/unit/tahun |
| | - Ac Sentral | Rp. 3.000.000,-/unit/tahun |
| 9 | Biaya Pemeliharaan Mesin Perforasi | Rp. 1.000.000,-/ unit/tahun |
| 10 | Biaya Pemeliharaan Jaringan Internet | Rp. 1.000.000,-/tahun |
| 11 | Biaya Pemeliharaan Sound sistem | |
| | - Orgen /Piano | Rp. 3.000.000,-/unit/tahun |
| | - Mixer dibawah 12 chanel | Rp. 750.000,-/ unit/tahun |
| | - Mixer diatas 12 chanel | Rp. 1.000.000,-/ unit/tahun |
| | - Speaker diatas 18 inchi | Rp. 500.000,-/ unit/tahun |
| | - Speaker dibawah 18 inchi | Rp. 350.000,-/ unit/tahun |
| | - Power Supply orgen | Rp. 500.000,-/ unit/tahun |
| | - Amplifier orgen | Rp. 500.000,-/ unit/tahun |
| 12 | Biaya Pemeliharaan Alat Elektronik lainnya | Rp. 1.000.000,-/tahun |
| 13 | Biaya Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA | Rp. 5.346.000,-/unit/tahun |
| 14 | Biaya Pemeliharaan Genset 75 KVA | Rp. 6.413.000,-/unit/tahun |
| 15 | Biaya Pemeliharaan Genset 100 KVA | Rp. 7.535.000,-/unit/tahun |
| 16 | Biaya Pemeliharaan Genset 125 KVA | Rp. 7.997.000,-/unit/tahun |
| 17 | Biaya Pemeliharaan Genset 150 KVA | Rp. 9.845.000,-/unit/tahun |
| 18 | Biaya Pemeliharaan Genset 175 KVA | Rp. 10.989.000,-/unit/tahun |
| 19 | Biaya Pemeliharaan Genset 200 KVA | Rp. 11.770.000,-/unit/tahun |
| 20 | Biaya Pemeliharaan Genset 250 KVA | Rp. 12.458.600,-/unit/tahun |
| 21 | Biaya Pemeliharaan Genset 275 KVA | Rp. 13.189.000,-/unit/tahun |
| 22 | Biaya Pemeliharaan Genset 300 KVA | Rp. 15.554.000,-/unit/tahun |
| 23 | Biaya Pemeliharaan Genset 350 KVA | Rp. 17.039.000,-/unit/tahun |
| 24 | Biaya Pemeliharaan Genset 450 KVA | Rp. 19.019.000,-/unit/tahun |
| 25 | Biaya Pemeliharaan Genset 500 KVA | Rp. 23.584.000,-/unit/tahun |
| | (Pemeliharaan genset berdasarkan No. 84/PMK.02/2011) | |

V. BBM RUTIN

BBM rutin perbulan dapat diberikan kepada Pejabat / PNS yang memakai kendaraan dinas sesuai SK penunjukannya, sebagai berikut :

1. Pejabat Negara diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
2. Pimpinan DPRD mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang kedudukan dan Protokoler DPRD
3. Eselon II/a sebesar 250 liter.
4. Eselon II/b sebesar 200 liter.
5. Eselon III/a dan III/b yang memakai kendaraan dinas Roda 4 sebesar 150 liter.

6. Eselon III/a dan III/b yang memakai kendaraan dinas Roda 2 sebesar 60 liter.
7. Eselon IV/a/ IV/b/ Bendahara/ Bendahara Pembantu/Pengurus Barang yang memakai kendaraan dinas Roda 2(dua) sebesar 50 liter.
8. PPTK non Eselon yang memakai kendaraan dinas roda 2 diberikan 50 liter.
9. Penyuluh pada BP4K2P dan Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan yang memakai kendaraan dinas roda 2 (dua) 25 Liter/bulan

VI. BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG

| NO | URAIAN | HARGA SATUAN |
|----|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Gedung/bangunan Bertingkat | Rp. 110.000/ m ² / Tahun |
| 2 | Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat | Rp. 90.000/ m ² / Tahun |
| 3 | Halaman Gedung/Kantor/bangunan | Rp. 10.000/ m ² / Tahun |

VII. BIAYA SEWA SARANA MOBILITAS

| NO | URAIAN | HARGA SATUAN |
|----|-----------|-------------------------------|
| 1 | Roda 4 | Rp. 610.000,- / unit / hari |
| 2 | Roda 6 | Rp. 1.500.000,- / unit / hari |
| 3 | Bus Besar | Rp. 2.100.000,- / unit / hari |

Keterangan:

- Biaya sewa kendaraan tersebut sudah termasuk BBM, Biaya Sopir dan Pajak
- Biaya sewa Ruang Pertemuan dan Rapat dibayarkan dengan biaya rill yang berlaku
- Biaya sewa Mobilisasi alat berat disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku
- Biaya sewa kapal laut disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku.

VIII. BIAYA WIRID PENGAJIAN/ CERAMAH AGAMA/ PERINGATAN HARI BESAR ISLAM/KEGIATAN LAINNYA

| NO | URAIAN | HARGA SATUAN |
|----|--|-----------------------------|
| 1 | Honor Penceramah dalam kabupaten | Rp. 200.000/ orang/ kali |
| 2 | Honor Penceramah luar kabupaten dalam propinsi | Rp. 750.000/ orang/ kali |
| 3 | Honor Penceramah luar propinsi | Rp. 2.500.000/orang/ kali |
| 4 | Honor Imam/ Pembaca Do'a/ Rohaniawan | |
| | a. PNS | Rp. 100.000/ orang/ kali |
| | b. Non PNS | Rp. 125.000,- / orang/ kali |
| 5 | Honor Pembaca Al-qur'an | |
| | a. PNS | Rp. 75.000/orang/kali |
| | b. Non PNS | Rp. 100.000/orang/kali |
| 6. | Pembawa Acara | |
| | a. PNS | Rp. 60.000/orang/kali |
| | b. Non PNS | Rp. 75.000/orang/kali |
| 7. | Pemimpin Lagu | |
| | a. PNS | Rp. 60.000/orang/kali |
| | b. Non PNS | Rp. 75.000/orang/kali |
| 8. | Instruktur Senam | |
| | a. Dalam Daerah | Rp. 250.000/orang/kali |
| | b. Luar Daerah Dalam Propinsi | Rp. 500.000/orang/kali |

IX. BIAYA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA :

1. PNS/HONOR DAERAH, SATPOL PP/ BANPOL PP / POL HUT / BANPAM HUT :

| NO | URAIAN | PNS/ HONOR/KONTRAK DAERAH | SATPOL PP/ BANPOL PP/POLHUT/BANPAMHUT |
|----|--|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Pakaian Dinas Harian | Rp. 400.000,-/ tahun/ stel | Rp.450.000,,/tahun/stel |
| 2 | Pakaian Olah Raga | Rp. 200.000,- / tahun/ stel | |
| 3 | Pakaian Muslim/KORPRI/ Khas Daerah | Rp. 150.000,- / tahun/ stel | |
| 4 | Pakaian Dinas Lapangan beserta perlengkapannya | | |
| 5 | Pakaian Satpam | Rp. 340.000,- / tahun/ stel | |

2. BUPATI/WAKIL BUPATI :

| NO | URAIAN | STANDAR | KET |
|----|---|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | Rp. 3.000.000,-/ stel | Bahan Woll Itali |
| 2 | Pakaian Sipil Resmi (PSR) | Rp. 2.750.000,-/ stel | Bahan Woll Itali |
| 3 | Pakaian Sipil Harian (PSH) | Rp.1.500.000,-/ stel | Bahan Woll England |
| 4 | Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang | Rp.1.000.000,-/ stel | Bahan sesuai dengan harga pasar |
| 5 | Pakaian khusus lainnya | Rp. 600.000,-/ stel | Bahan sesuai dengan harga pasar |

3. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD :

| NO | URAIAN | STANDAR | KET |
|----|---|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | Rp. 3.000.000,-/ stel | Bahan Woll Itali |
| 2 | Pakaian Sipil Resmi (PSR) | Rp. 2.750.000,-/ stel | Bahan Woll Itali |
| 3 | Pakaian Sipil Harian (PSH) | Rp. 1.500.000,-/ stel | Bahan Woll England |
| 4 | Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang | Rp. 1.000.000,-/ stel | Bahan sesuai dengan harga pasar |

B. BELANJA PERJALANAN DINAS

I. Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat

1. Untuk Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

| NO | Tingkatan | Dalam Kabupaten Pasaman Barat | | |
|----|--------------|---|--|--|
| | | Wilayah 1 Kec.Sasak Kec.Luhak Nan Duo | Wilayah 2 Kec.Talamau Kec.Kinali Kec.GunungTuleh Kec.Sei.Aur | Wilayah 3 Kec.Sei.Beremas Kec.Ranah Batahan Kec.Koto Balingka Kec.Lb.Melintang |
| 1. | Bupati | Rp. 250.000,- | Rp. 250.000,- | Rp. 250.000,- |
| 2. | Wakil Bupati | Rp. 225.000,- | Rp. 225.000,- | Rp. 225.000,- |
| 3. | BBM | 40 Ltr. | 45 Ltr. | 50 Ltr. |

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

| NO | Tingkatan | Dalam Kabupaten Pasaman Barat | | |
|----|----------------------------|---|--|--|
| | | Wilayah 1 Kec.Sasak Kec.Luhak Nan Duo | Wilayah 2 Kec.Talamau Kec.Kinali Kec.GunungTuleh Kec.Sei.Aur | Wilayah 3 Kec.Sei.Beremas Kec.Ranah Batahan Kec.Koto Balingka Kec.Lb.Melintang |
| 1. | Tingkat A IV | Rp. 90.000,- | Rp. 100.000,- | Rp. 140.000,- |
| 2. | Tingkat B III | Rp. 80.000,- | Rp. 90.000,- | Rp. 115.000,- |
| 3. | Tingkat C II | Rp. 65.000,- | Rp. 80.000,- | Rp. 90.000,- |
| 4. | Tingkat D I / Sopir | Rp. 55.000,- | Rp. 60.000,- | Rp. 65.000,- |

| | | | | |
|----|-----------------------|---------|---------|---------|
| 5. | BBM / Mobil Dinas | 20 Ltr. | 30 Ltr. | 40 Ltr. |
| 6. | BBM Truk/Bus (roda 6) | 30 Ltr | 40 Ltr | 50 Ltr |
| 7. | BBM roda 2 / Honda | 5 ltr | 7 ltr | 9 ltr |

- a. Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :
1. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Golongan IV
 2. Tingkat B untuk PNS Golongan III
 3. Tingkat C untuk PNS Golongan II
 4. Tingkat D untuk PNS Golongan I
- b. Apabila dalam melakukan perjalanan dinas dalam Daerah menggunakan kendaraan umum dapat ditambah dengan biaya transportasi sesuai dengan wilayah :
1. Wilayah I sebesar Rp.25.000,- (P/P)
 2. Wilayah II sebesar Rp.30.000,- (P/P)
 3. Wilayah III sebesar Rp.45.000,- (P/P)
- c. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar.
- d. Bagi Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah harus diberikan secara selektif. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan II untuk Honor Daerah berpendidikan Sarjana ke atas dan Golongan I untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah.
- e. Bagi Sopir/Ajudan yang berstatus Tenaga Kontrak dapat diberikan Uang harian perjalanan dinas dalam daerah secara selektif, efisien dan efektif terbatas. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan I
- f. Penugasan khusus termasuk untuk penugasan ke daerah terisolir / tertinggal bagi PNS, Honor Daerah dan Pegawai Kontrak dapat diberikan uang harian sebagai berikut :

| No | Golongan | Wilayah I | Wilayah II | Wilayah III |
|----|-----------|--|---|--|
| | | Kec. Sasak Kec. Luhak nan Duo Kec. Pasaman | Kec. Talamau Kec. Kinali Kec. Gunung Tuleh Kec. Sungai Aur | Kec. Sungai Beremas Kec. Ranah Batahan Kec. Koto Balingka Kec. Lembah Melintang |
| | | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) |
| 1 | Tingkat A | 125.000,- | 140.000,- | 200.000,- |
| 2 | Tingkat B | 110.000,- | 125.000,- | 150.000,- |
| 3 | Tingkat C | 90.000,- | 110.000,- | 125.000,- |
| 4 | Tingkat D | 75.000,- | 90.000,- | 100.000,- |

Keterangan:

1. Penugasan khusus dalam rangka memfasilitasi acara pejabat negara dan pejabat daerah, petugas teknis Kontruksi Lapangan, petugas survey, petugas pendataan dan pengawasan, petugas lapangan SAT- GAS Pemadam Kebakaran dan Tim Reaksi Cepat, petugas pengamanan lapangan, petugas lapangan pemungut pajak dan retribusi Daerah, diberikan biaya perjalanan dinas secara selektif, efisien dan efektif oleh Kepala SKPD.
2. Penugasan khusus yang melaksanakan tugas berdasarkan atas Surat Perintah Tugas Khusus, lama penugasan maksimal 3 (tiga) hari dan jika melebihi harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
3. Biaya transportasi Khusus ke daerah terisolir / tertinggal dibayarkan sesuai dengan harga rill.

- g. Penugasan dari Kecamatan ke Nagari/Jorong dibayarkan biaya operasional per hari sebagai berikut :

| No. | Tingkatan | Kunjungan kerja (Rp.) | Pemungutan PAD dan PBB (Rp.) |
|-----|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 1. | Tingkat A | 75.000,- | 90.000,- |
| 2. | Tingkat B | 65.000,- | 80.000,- |
| 3. | Tingkat C | 50.000,- | 65.000,- |
| 4. | Tingkat D | 35.000,- | 50.000,- |

II. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat dan Biaya Transportasi.

1. Untuk Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Kab./Kota | Bupati | Wabub | BBM Ltr. |
|-----|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 1. | Padang Pariaman | 300.000,- | 275.000,- | 65 |
| 2. | Agam | 300.000,- | 275.000,- | 100 |
| 3. | Pasaman | 300.000,- | 275.000,- | 75 |
| 4. | Tanah Datar | 300.000,- | 275.000,- | 100 |
| 5. | Lima Puluh Kota | 300.000,- | 275.000,- | 110 |
| 6. | Kab.Solok | 300.000,- | 275.000,- | 110 |
| 7. | Sijunjung | 375.000,- | 350.000,- | 160 |
| 8. | Dharmas Raya | 420.000,- | 400.000,- | 225 |
| 9. | Solok Selatan | 375.000,- | 350.000,- | 225 |
| 10. | Pesisir Selatan | 375.000,- | 350.000,- | 160 |
| 11. | Pariaman | 300.000,- | 275.000,- | 65 |
| 12. | Bukittinggi | 300.000,- | 275.000,- | 100 |
| 13. | Padang Panjang | 300.000,- | 275.000,- | 100 |
| 14. | Padang | 300.000,- | 275.000,- | 100 |
| 15. | Payakumbuh | 300.000,- | 275.000,- | 110 |
| 16. | Kodya Solok | 300.000,- | 275.000,- | 110 |
| 17. | Sawah Lunto | 375.000,- | 350.000,- | 135 |
| 18. | Mentawai | 425.000,- | 400.000,- | - |

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah :

| No. | Kab./Kota | Tingkat A <i>IV E2</i> | Tingkat B <i>III</i> | Tingkat C <i>II</i> | Tingkat D <i>I / Solok</i> | Transport | BBM Roda 4 | BBM Roda 6 |
|-----|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|
| 1. | PD.Pariaman | 150.000,- | 125.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 80.000,- | 40 | 70 |
| 2. | Agam | 150.000,- | 125.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 120.000,- | 60 | 100 |
| 3. | Pasaman | 150.000,- | 125.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 120.000,- | 50 | 80 |
| 4. | Tanah Datar | 200.000,- | 175.000,- | 150.000,- | 125.000,- | 160.000,- | 60 | 100 |
| 5. | 50 Puluh Kota | 250.000,- | 225.000,- | 175.000,- | 150.000,- | 160.000,- | 70 | 110 |
| 6. | Kab.Solok | 275.000,- | 250.000,- | 225.000,- | 200.000,- | 160.000,- | 70 | 110 |
| 7. | Sijunjung | 350.000,- | 325.000,- | 300.000,- | 275.000,- | 180.000,- | 100 | 130 |
| 8. | Dharmas Raya | 350.000,- | 350.000,- | 325.000,- | 320.000,- | 200.000,- | 150 | 200 |
| 9. | Solok Selatan | 350.000,- | 325.000,- | 300.000,- | 275.000,- | 180.000,- | 150 | 200 |
| 10. | Pesisir Selatan | 350.000,- | 325.000,- | 300.000,- | 275.000,- | 180.000,- | 100 | 130 |
| 11. | Pariaman | 150.000,- | 125.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 80.000,- | 40 | 70 |
| 12. | Bukittinggi | 250.000,- | 225.000,- | 175.000,- | 150.000,- | 140.000,- | 60 | 100 |
| 13. | PD. Panjang | 200.000,- | 175.000,- | 150.000,- | 125.000,- | 140.000,- | 60 | 100 |
| 14. | Padang | 250.000,- | 225.000,- | 175.000,- | 150.000,- | 140.000,- | 60 | 100 |
| 15. | Payakumbuh | 250.000,- | 225.000,- | 175.000,- | 150.000,- | 160.000,- | 70 | 110 |
| 16. | Kodya Solok | 275.000,- | 250.000,- | 225.000,- | 200.000,- | 180.000,- | 80 | 120 |
| 17. | Sawah Lunto | 300.000,- | 275.000,- | 250.000,- | 225.000,- | 180.000,- | 90 | 125 |
| 18. | Mentawai | 400.000,- | 375.000,- | 350.000,- | 325.000,- | - | - | - |
| 19. | BIM | 250.000,- | 225.000,- | 175.000,- | 150.000,- | - | 60 | 100 |

A. Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :

1. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II dan golongan IV.
2. Tingkat B untuk PNS Golongan III
3. Tingkat C untuk PNS Golongan II
4. Tingkat D untuk PNS Golongan I

B. Bagi Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi harus diberikan secara selektif dan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan II untuk Honor Daerah berpendidikan Sarjana ke atas dan Golongan I untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah.

C. Bagi Sopir/ajudan yang berstatus Tenaga Kontrak dapat diberikan Uang harian perjalanan dinas luar Daerah dalam Provinsi secara selektif, efisien dan efektif. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan I

III. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kab.Pasaman Barat Luar Provinsi Sumatera Barat dan Biaya Bantuan Transportasi Bandara P/P :

1. Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Provinsi | Bupati | Wabub | Bantuan Transportasi |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 1. | Nangroe Aceh Darussalam | 450.000,- | 400.000,- | 180.000,- |
| 2. | Sumatera Utara | 450.000,- | 400.000,- | 150.000,- |
| 3. | Riau | 450.000,- | 400.000,- | 150.000,- |
| 4. | Kepulauan Riau (Batam) | 450.000,- | 400.000,- | 200.000,- |
| 5. | Jambi | 450.000,- | 400.000,- | 120.000,- |
| 6. | Sumatera Selatan | 450.000,- | 400.000,- | 180.000,- |
| 7. | Lampung | 450.000,- | 400.000,- | 200.000,- |
| 8. | Bengkulu | 450.000,- | 400.000,- | 160.000,- |
| 9. | Bangka Belitung | 450.000,- | 400.000,- | 140.000,- |
| 10. | DKI Jakarta | 525.000,- | 500.000,- | 545.000,- |
| 11. | Jawa Barat | 450.000,- | 400.000,- | 520.000,- |
| 12. | Banten | 450.000,- | 400.000,- | 350.000,- |
| 13. | Jawa Tengah | 450.000,- | 400.000,- | 200.000,- |
| 14. | DI Yogyakarta | 450.000,- | 400.000,- | 200.000,- |
| 15. | Jawa Timur | 475.000,- | 450.000,- | 250.000,- |
| 16. | Bali | 475.000,- | 450.000,- | 250.000,- |
| 17. | Nusa Tenggara Barat | 450.000,- | 400.000,- | 120.000,- |
| 18. | Nusa Tenggara Timur | 450.000,- | 400.000,- | 150.000,- |
| 19. | Kalimantan Barat | 450.000,- | 400.000,- | 180.000,- |
| 20. | Kalimantan Tengah | 450.000,- | 400.000,- | 160.000,- |
| 21. | Kalimantan Selatan | 450.000,- | 400.000,- | 180.000,- |
| 22. | Kalimantan Timur | 450.000,- | 400.000,- | 560.000,- |
| 23. | Sulawesi Utara | 450.000,- | 400.000,- | 220.000,- |
| 24. | Gorontalo | 475.000,- | 450.000,- | 180.000,- |
| 25. | Sulawesi Barat | 450.000,- | 400.000,- | 250.000,- |
| 26. | Sulawesi Selatan | 450.000,- | 400.000,- | 240.000,- |
| 27. | Sulawesi Tengah | 450.000,- | 400.000,- | 120.000,- |
| 28. | Sulawesi Tenggara | 450.000,- | 400.000,- | 180.000,- |
| 29. | Maluku | 450.000,- | 400.000,- | 340.000,- |
| 30. | Maluku Utara | 450.000,- | 400.000,- | 220.000,- |
| 31. | Papua | 475.000,- | 450.000,- | 520.000,- |
| 32. | Papua Barat | 475.000,- | 450.000,- | 250.000,- |

Keterangan :

1. Biaya Bantuan Transportasi Bandara merupakan biaya Transportasi pulang pergi dan dibayarkan secara lumpsum.
2. Selama dilokasi perjalanan dinas kepada Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) diberikan transportasi lokal sebesar Rp. 150.000,- per hari dan dibayarkan secara lumpsum.

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Provinsi | Tingkat A E 2 | Tingkat B IV | Tingkat C III | Tingkat D II | Tingkat E I | Taxi |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 1. | Aceh Darussalam | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 180.000,- |
| 2. | Sumatera Utara | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 150.000,- |
| 3. | Riau | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 150.000,- |
| 4. | Kepulauan Riau (Batam) | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 200.000,- |
| 5. | Jambi | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 120.000,- |
| 6. | Sumatera Selatan | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 180.000,- |
| 7. | Lampung | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 200.000,- |
| 8. | Bengkulu | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 160.000,- |
| 9. | Bangka Belitung | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 140.000,- |
| 10. | DKI Jakarta | 500.000,- | 450.000,- | 400.000,- | 375.000,- | 350.000,- | 520.000,- |
| 11. | Jawa Barat | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 275.000,- | 250.000,- | 520.000,- |
| 12. | Banten | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 350.000,- |
| 13. | Jawa Tengah | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 200.000,- |
| 14. | DI Yogyakarta | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 275.000,- | 250.000,- | 200.000,- |
| 15. | Jawa Timur | 450.000,- | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 250.000,- |
| 16. | Bali | 450.000,- | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 250.000,- |
| 17. | Nusa Tenggara Barat | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 275.000,- | 250.000,- | 120.000,- |
| 18. | Nusa Tenggara Timur | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 275.000,- | 250.000,- | 150.000,- |
| 19. | Kalimantan Barat | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 180.000,- |
| 20. | Kalimantan Tengah | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 160.000,- |
| 21. | Kalimantan Selatan | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 180.000,- |
| 22. | Kalimantan Timur | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 560.000,- |
| 23. | Sulawesi Utara | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 220.000,- |
| 24. | Gorontalo | 450.000,- | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 180.000,- |
| 25. | Sulawesi Barat | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 250.000,- |
| 26. | Sulawesi Selatan | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 275.000,- | 250.000,- | 240.000,- |
| 27. | Sulawesi Tengah | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 275.000,- | 250.000,- | 120.000,- |
| 28. | Sulawesi Tenggara | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 180.000,- |
| 29. | Maluku | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 340.000,- |
| 30. | Maluku Utara | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 250.000,- | 200.000,- | 220.000,- |
| 31. | Papua | 450.000,- | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 275.000,- | 520.000,- |
| 32. | Papua Barat | 450.000,- | 400.000,- | 350.000,- | 300.000,- | 275.000,- | 250.000,- |

Keterangan :

1. Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :
 - a. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
 - b. Tingkat B untuk Golongan IV
 - c. Tingkat C untuk PNS Golongan III
 - d. Tingkat D untuk PNS Golongan II
 - e. Tingkat E untuk PNS Golongan I
2. Bagi Pegawai Honor Daerah yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dan atau luar Provinsi harus diberikan secara selektif dengan mengajukan telaahan staf tersendiri untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan II untuk Honor Daerah berpendidikan Sarjana ke atas dan Golongan I untuk Honor Daerah berpendidikan SLTA kebawah.
3. Untuk pemberian Reward kepada pegawai kontrak atas keberhasilan pelaksanaan tugas dapat diberikan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam bentuk study lapangan atas persetujuan tertulis Bupati.

4. Bantuan transportasi Bandara merupakan biaya Bantuan transportasi Bandara pulang pergi dan dibayarkan secara lumpsum.
5. Untuk pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas luar propinsi via Bandara Internasional Minang Kabau (BIM), dan tidak menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transportasi Simpang Empat – BIM sebesar Rp.140.000,- P/P dibayarkan dalam bentuk lumpsum.
6. Bagi pejabat negara dan pejabat struktural eselon II yang melakukan perjalanan dinas diluar Provinsi Sumatera Barat diberikan uang representasi perhari dengan ketentuan :
 - a. Untuk Bupati : Rp. 200.000,-
 - b. Untuk Wakil Bupati : Rp. 150.000,-
 - c. Untuk Pejabat Eselon II : Rp. 100.000,-

IV. Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri

Standar Uang Harian (Uang saku, Transport Lokal, Uang Makan, dan Uang Penginapan) Perjalanan Dinas Luar Negeri diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.

V. Standar Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Ke Luar negeri

Biaya transportasi untuk perjalanan dinas luar Negeri menggunakan pesawat udara tujuan Negara lain bagi Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD pegawai negeri sipil disesuaikan den Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013

VI. Sarana Transportasi yang digunakan dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah / luar negeri adalah sebagai berikut :

| No | Eselon/Jabatan | Jenis Transportasi | | |
|----|--|--------------------|--------------|-------------------|
| | | Pesawat Udara | Kapal Laut | Kereta Api/Bus |
| 1. | Bupati/Wk.Bupati | Kelas Bisnis | VIP/Kelas IA | Spesial/Eksekutif |
| 2. | Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II | Kelas Ekonomi | Kelas I B | Spesial/Eksekutif |
| 3. | Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I serta Pegawai Honor Daerah/Kontrak | Kelas Ekonomi | Kelas II A | Spesial/Eksekutif |

Keterangan :

1. Biaya Transportasi (Biaya tiket) dari dan ketempat tujuan sesuai dengan harga yang tertera dalam tiket (*at cost*).
2. Untuk perjalanan dinas luar daerah luar Propinsi yang menggunakan jalur darat (Propinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumatera selatan) dapat diberikan biaya :
 - a. Bantuan BBM Untuk yang menggunakan kendaraan dinas dengan ketentuan 1 (satu) liter untuk 6 (enam) km. Pembayarannya dilengkapi dengan bon pembelian BBM.
 - b. Khusus untuk Propinsi Riau yang menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transportasi sebesar Rp 300.000,- dan dibayarkan secara lumpsum.
3. Biaya transport perjalanan dinas (dari Bandara LABAN) menggunakan pesawat udara tujuan daerah lain bagi Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, dengan tarif sebagai berikut :

| No | Rute Penerbangan | Batas Maksimal Satuan Biaya Tiket |
|----|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Simpang Ampek – Padang | 375.000 |
| 2 | Simpang Ampek – Pekanbaru | 575.000 |

VII. Biaya BBM untuk perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat menggunakan Jalan Darat bagi Bupati/wakil Bupati, dengan tarif sebagai berikut :

1. Untuk Pejabat Negara Bupati dan Wakil Bupati dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Kab./Kota | JARAK TEMPUH (Km) PP | BBM ltr | KETERANGAN |
|-----|------------------|----------------------|---------|------------|
| 1. | Jambi | 1.378 | 276 | |
| 2. | Lampung | 2.712 | 542 | |
| 3. | Palembang | 1.932 | 386 | |
| 4. | Pekanbaru | 780 | 156 | |
| 5. | Rengat | 800 | 160 | |
| 6. | Sidempuan | 600 | 120 | |
| 7. | Pematang Siantar | 1.020 | 204 | |
| 8. | Medan | 1.340 | 268 | |

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah :

| No. | Kab./Kota | JARAK TEMPUH PP | BBM Ltr. |
|-----|------------------|-----------------|----------|
| 1. | Jambi | 1.378 | 230 |
| 2. | Lampung | 2.712 | 452 |
| 3. | Palembang | 1.932 | 322 |
| 4. | Pekanbaru | 780 | 130 |
| 5. | Rengat | 800 | 134 |
| 6. | Sidempuan | 600 | 100 |
| 7. | Pematang Siantar | 1.020 | 170 |
| 8. | Medan | 1.340 | 224 |

VIII. Tarif Rata-Rata Hotel

1. Tarif Rata-Rata Hotel Dalam Provinsi Sumatera Barat untuk Pejabat Negara.

| No. | Kab./Kota | Bupati | Wabup |
|-----|-----------------|-----------|-----------|
| 1. | Padang Pariaman | 550.000,- | 400.000,- |
| 2. | Agam | 550.000,- | 400.000,- |
| 3. | Pasaman | 550.000,- | 400.000,- |
| 4. | Tanah Datar | 550.000,- | 400.000,- |
| 5. | Lima Puluh Kota | 550.000,- | 400.000,- |
| 6. | Kabupaten Solok | 550.000,- | 400.000,- |
| 7. | Sijunjung | 550.000,- | 400.000,- |
| 8. | Dharmas Raya | 550.000,- | 400.000,- |
| 9. | Solok Selatan | 550.000,- | 400.000,- |
| 10. | Pesisir Selatan | 550.000,- | 400.000,- |
| 11. | Pariaman | 550.000,- | 400.000,- |
| 12. | Bukittinggi | 850.000,- | 550.000,- |
| 13. | Padang Panjang | 550.000,- | 400.000,- |
| 14. | Padang | 850.000,- | 550.000,- |
| 15. | Payakumbuh | 550.000,- | 400.000,- |
| 16. | Kota Solok | 550.000,- | 400.000,- |
| 17. | Sawah Lunto | 550.000,- | 400.000,- |
| 18. | Mentawai | - | - |

Keterangan :

Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.

Biaya Penginapan dibayarkan dalam bentuk lumpsum, khusus untuk Kabupaten Mentawai menyesuaikan dengan tarif penginapan setempat.

2. Tarif Rata-Rata Hotel Dalam Provinsi Sumatera Barat untuk Anggota DPRD dan PNS, serta Honor daerah.

| No. | Kab./Kota | Tingkat A | Tingkat B | Tingkat C | Tingkat D |
|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Padang Pariaman | 350.000,- | 300.000,- | 200.000,- | 150.000,- |
| 2. | Agam | 350.000,- | 300.000,- | 200.000,- | 150.000,- |
| 3. | Pasaman | 350.000,- | 300.000,- | 200.000,- | 150.000,- |
| 4. | Tanah Datar | 350.000,- | 300.000,- | 200.000,- | 150.000,- |

| | | | | | |
|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5. | Lima Puluh Kota | 350.000,- | 300.000,- | 200.000,- | 150.000,- |
| 6. | Kabupaten Solok | 350.000,- | 300.000,- | 200.000,- | 150.000,- |
| 7. | Sijunjung | 350.000,- | 300.000,- | 200.000,- | 150.000,- |
| 8. | Dharmas Raya | 350.000,- | 300.000,- | 200.000,- | 150.000,- |
| 9. | Solok Selatan | 350.000,- | 300.000,- | 200.000,- | 150.000,- |
| 10. | Pesisir Selatan | 350.000,- | 300.000,- | 200.000,- | 150.000,- |
| 11. | Pariaman | 350.000,- | 300.000,- | 200.000,- | 150.000,- |
| 12. | Bukittinggi | 400.000,- | 350.000,- | 250.000,- | 200.000,- |
| 13. | Padang Panjang | 350.000,- | 300.000,- | 200.000,- | 150.000,- |
| 14. | Padang | 400.000,- | 350.000,- | 250.000,- | 200.000,- |
| 15. | Payakumbuh | 350.000,- | 300.000,- | 200.000,- | 150.000,- |
| 16. | Kodya Solok | 350.000,- | 300.000,- | 200.000,- | 150.000,- |
| 17. | Sawah Lunto | 350.000,- | 300.000,- | 200.000,- | 150.000,- |
| 18. | Mentawai | - | - | - | - |

Keterangan :

1. Peruntukan Penginapan :
 - a. Tingkat A :Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II serta Pejabat Fungsional Golongan IV/c keatas
 - b. Tingkat B :Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Golongan IV/a dan IV/b
 - c. Tingkat C :Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Golongan III/c dan III/d
 - d. Tingkat D :Aparatur Non Struktural dan Pejabat Fungsional Golongan III/b kebawah dan Honor Daerah
 2. Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.
 3. Biaya Penginapan dibayarkan dalam bentuk lumpsum, khusus untuk Kabupaten Mentawai menyesuaikan dengan tarif penginapan setempat.
3. Tarif Rata-Rata Hotel Luar Provinsi Sumatera Barat Untuk Pejabat Negara, Anggota DPRD dan PNS :

| NO | PROVINSI | TARIF RATA-RATA HOTEL | | | | |
|-----|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | Pejabat Negara | DPRD dan Eselon II | Pejabat Eselon III / Gol. IV | Pejabat Eselon IV / gol III | Gol I dan II |
| 1. | ACEH DARUSALAM | 1.250.000,- | 1.050.000,- | 750.000,- | 400.000,- | 300.000,- |
| 2. | SUMATERA UTARA | 1.250.000,- | 900.000,- | 600.000,- | 450.000,- | 300.000,- |
| 3. | RIAU | 1.250.000,- | 900.000,- | 650.000,- | 450.000,- | 300.000,- |
| 4. | KEPULAUAN RIAU | 1.250.000,- | 900.000,- | 650.000,- | 380.000,- | 280.000,- |
| 5. | JAMBI | 1.250.000,- | 900.000,- | 550.000,- | 370.000,- | 280.000,- |
| 6. | SUMATERA SELATAN | 1.250.000,- | 900.000,- | 590.000,- | 400.000,- | 280.000,- |
| 7. | LAMPUNG | 1.250.000,- | 900.000,- | 650.000,- | 370.000,- | 300.000,- |
| 8. | BENGKULU | 1.250.000,- | 700.000,- | 500.000,- | 350.000,- | 300.000,- |
| 9. | BANGKA BELITUNG | 1.250.000,- | 900.000,- | 600.000,- | 450.000,- | 300.000,- |
| 10. | BANTEN | 1.500.000,- | 1.000.000,- | 650.000,- | 450.000,- | 350.000,- |
| 11. | JAWA BARAT | 1.500.000,- | 1.000.000,- | 650.000,- | 450.000,- | 375.000,- |
| 12. | D.K.I JAKARTA | 1.500.000,- | 1.000.000,- | 650.000,- | 500.000,- | 400.000,- |
| 13. | JAWA TENGAH | 1.500.000,- | 1.000.000,- | 650.000,- | 450.000,- | 350.000,- |
| 14. | D.I JOGYAKARTA | 1.500.000,- | 1.000.000,- | 650.000,- | 500.000,- | 350.000,- |
| 15. | JAWA TIMUR | 1.500.000,- | 1.000.000,- | 650.000,- | 390.000,- | 280.000,- |
| 16. | BALI | 1.750.000,- | 1.350.000,- | 1.100.000,- | 750.000,- | 658.000,- |
| 17. | NUSA TENGGARA BARAT | 1.250.000,- | 900.000,- | 550.000,- | 540.000,- | 360.000,- |
| 18. | NUSA TENGGARA TIMUR | 1.250.000,- | 900.000,- | 550.000,- | 400.000,- | 360.000,- |
| 19. | KALIMANTAN BARAT | 1.250.000,- | 900.000,- | 600.000,- | 400.000,- | 300.000,- |
| 20. | KALIMANTAN TENGAH | 1.250.000,- | 900.000,- | 600.000,- | 400.000,- | 360.000,- |
| 21. | KALIMANTAN SELATAN | 1.250.000,- | 900.000,- | 600.000,- | 400.000,- | 360.000,- |
| 22. | KALIMANTAN TIMUR | 1.250.000,- | 900.000,- | 600.000,- | 450.000,- | 350.000,- |
| 23. | SULAWESI UTARA | 1.250.000,- | 1.000.000,- | 600.000,- | 400.000,- | 300.000,- |
| 24. | GORONTALO | 1.250.000,- | 1.000.000,- | 600.000,- | 400.000,- | 240.000,- |
| 25. | SULAWESI BARAT | 1.250.000,- | 1.000.000,- | 600.000,- | 400.000,- | 300.000,- |
| 26. | SULAWESI SELATAN | 1.250.000,- | 1.000.000,- | 600.000,- | 400.000,- | 350.000,- |
| 27. | SULAWESI TENGAH | 1.250.000,- | 1.000.000,- | 600.000,- | 400.000,- | 300.000,- |
| 28. | SULAWESI TENGGARA | 1.250.000,- | 1.000.000,- | 600.000,- | 400.000,- | 350.000,- |
| 29. | MALUKU | 1.250.000,- | 1.000.000,- | 600.000,- | 400.000,- | 350.000,- |
| 30. | MALUKU UTARA | 1.300.000,- | 1.000.000,- | 600.000,- | 400.000,- | 350.000,- |

| | | | | | | |
|-----|------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 31. | PAPUA | 1.250.000,- | 1.000.000,- | 600.000,- | 400.000,- | 350.000,- |
| 32. | IRIAN JAYA BARAT | 1.250.000,- | 1.000.000,- | 600.000,- | 400.000,- | 350.000,- |

Keterangan:

1. Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.
2. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan sesuatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel bagi pejabat negara dan aparatur yang melaksanakan perjalanan dinas dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar mempedomani standar yang ditetapkan.
3. Biaya penginapan dibayarkan secara lumpsum.

C. PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPT, SPPD

- (1) Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai honor daerah, yang diperintah oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas Dalam daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD :
 1. SPT dan SPPD untuk Bupati ditandatangani oleh Bupati
 2. SPT dan SPPD untuk Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
 3. Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
 - b. Sekretariat Daerah :
 1. SPT dan SPPD untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 2. SPT dan SPPD untuk Asisten ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten.
 3. SPT untuk Kepala Bagian ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sedangkan SPPD ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkungannya.
 4. SPT Kepala Sub Bagian, Staf PNS dan Pegawai honor daerah ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkungannya dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian.
 - c. Sekretariat DPRD:
 1. SPT dan SPPD untuk Sekretaris DPRD, Pajabat Eselon III ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
 2. SPT untuk Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, sedangkan SPPD ditandatangani oleh pejabat eselon III pada lingkungannya.
 - d. Badan, Dinas dan Kantor :
 1. Kepala Badan/Dinas/Kantor, pajabat eselon III pada Badan/Dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
 2. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pejabat eselon III pada lingkungannya.
 - e. Kantor Camat :
 1. SPT dan SPPD untuk Camat dan Sekcam ditandatangani oleh Camat.
 2. SPT dan SPPD Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah ditandatangani oleh Camat.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 1. SPT dan SPPD untuk Kepala UPTD ditandatangani oleh Kepala UPTD
 2. SPT dan SPPD untuk Ka TU dan Staf PNS dan Pegawai honor daerah di lingkup UPTD ditandatangani oleh Kepala UPTD.
 3. SPT dan SPPD Kepala Sekolah,KA TU, Guru, Staf PNS dan Pegawai honor daerah ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD :
 1. SPT dan SPPD untuk Bupati ditandatangani oleh Bupati
 2. SPT dan SPPD untuk Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati

3. SPT dan SPPD untuk Anggota DPRD penandatanganan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- b. Sekretariat Daerah :
 1. SPT dan SPPD untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 5. SPT dan SPPD untuk Asisten Setda/Staf ahli Bupati, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang mewakili Setda.
 6. SPT untuk Kepala Bagian dilingkungan Setda ditandatangani oleh Sekretaris Daerah apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang mewakili Setda, sedangkan SPPD untuk Kepala Bagian ditandatangani oleh Asisten sesuai lingkungannya.
 7. SPT untuk Kepala Sub Bagian, Staf PNS, Pegawai honor daerah dan tenaga kontrak, ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkungannya dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian.
 - c. Sekretariat DPRD:
 1. SPT dan SPPD untuk Sekretaris DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD dan diberitahukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 2. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon III ditandatangani oleh Sekretaris DPRD
 3. SPT dan SPPD untuk Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, SPPD ditandatangani oleh pejabat eselon III pada lingkungannya.
 - d. Badan, Dinas dan Kantor :
 1. SPT dan SPPD Untuk Kepala Badan/Dinas/Kantor ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan dan diberitahukan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 2. SPT dan SPPD Untuk pejabat eselon III pada Badan/Dinas ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
 3. SPT untuk Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pejabat eselon III pada lingkungannya.
 - e. Kantor Camat :
 1. SPT untuk Camat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang mewakili Setda sedangkan SPPD ditandatangani oleh Camat.
 2. SPT dan SPPD Untuk Sekcam ditandatangani oleh Camat.
 2. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat apabila Camat berhalangan/tidak berada ditempat, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Camat atas nama Camat.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 1. SPT dan SPPD untuk Kepala UPTD ditandatangani oleh Kepala SKPD
 2. SPT dan SPPD untuk Ka TU dan Staf PNS dan Pegawai honor daerah di lingkup UPTD ditandatangani oleh Kepala UPTD.
 3. SPT dan SPPD untuk Kepala Sekolah, KA TU, Guru, Staf PNS dan Pegawai honor daerah ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :
- a. SPT dan SPPD untuk Bupati ditandatangani oleh Bupati.
 - b. SPT dan SPPD untuk Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
 - c. Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Anggota DPRD, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota DPRD.
 - e. SPT dan SPPD untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

- f. SPT dan SPPD untuk Kepala SKPD/Camat, ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 - g. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, Pejabat eselon IV, staf PNS dan Pegawai Honor daerah SPT ditandatangani Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada di tempat, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris daerah Berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkupnya.
 - h. Pejabat eselon III pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, SPT ditandatangani oleh Bupati, wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
 - i. Camat dan Sekcam SPT ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - j. Pejabat eselon IV, staf PNS dan Pegawai Honor Daerah di lingkungan Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Kantor SPT ditandatangani Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (5) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (6) Setiap pejabat pada SKPD yang akan melakukan perjalanan dinas keluar propinsi harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Bupati.
- (7) SPT untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Sumatera Barat, penomoran register SPT dicatat dan dibukukan oleh Sespri Bupati.
- (8) Lamanya perjalanan dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 5 (lima) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati, kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- (9) Lamanya Perjalanan dinas luar daerah luar Propinsi Sumatera Barat untuk 1 (satu) bulan maksimal 12 hari, kecuali untuk penugasan/undangan khusus mewakili pemerintah daerah untuk kepentingan daerah dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Pasaman Barat dengan mengajukan Telaahan Staf.
- (10) Untuk Rapat koordinasi dan atau konsultasi maksimal jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas sebanyak 2 (dua) orang, kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
- (11) Kecuali Bupati, Wakil Bupati, bagi pejabat, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang.
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas terdiri dari kwitansi yang berisi rincian nominal dari biaya perjalanan dinas, dan dilampiri :
- a) Kwitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditandatangani oleh para pihak yang berkompeten (Form 1 dan 1a).
 - b) Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Form 2).
 - c) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilegalisir oleh pejabat berwenang di tempat tujuan perjalanan dinas dilakukan (Form 3), untuk SPPD perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati tidak diperlukan legalisir dari pejabat berwenang di tempat tujuan perjalanan dinas.
 - d) Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

D. STANDARISASI BAGI ANGGOTA ORGANISASI YANG SUMBER DANANYA BERASAL DARI APBD UNTUK MELAKUKAN KEGIATANNYA DIATUR OLEH ORGANISASI TERSEBUT DENGAN KETENTUAN

- a) Biaya Perjalanan untuk ketua Organisasi Tingkat Kabupaten mengacu pada standar perjalanan dinas eselon III
- b) Biaya Perjalanan untuk Ketua organisasi Tingkat kecamatan mengacu pada standar perjalanan dinas eselon IV
- c) Biaya Perjalanan untuk anggota organisasi Tingkat kabupaten mengacu pada standar perjalanan dinas Gol III
- d) Biaya Perjalanan untuk anggota organisasi Tingkat kecamatan mengacu pada standar perjalanan dinas Gol II
- e) Penganggarnya dibebankan pada belanja penggantian transportasi

E. BIAYA PENDIDIKAN, LATIHAN/SOSIALISASI/SEMINAR/PENYULUHAN/DIKLAT TEKNIS

1. Biaya Pendidikan dan Latihan struktural

| No. | URAIAN | SATUAN | STANDAR |
|-----------|--|----------|------------|
| A. | kontribusi : | | |
| | Biaya Diklat PIM II | 1 org | 30.261.000 |
| | Biaya diklat PIM III | 1 org | 22.125.000 |
| | Biaya diklat PIM IV | 1 org | 20.230.000 |
| | Latihan Prajabatan | | |
| | a. Golongan I dan II | 1 org | 4.470.000 |
| | b. Golongan III | 1 org | 5.545.000 |
| | Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk.II | 1 org | 1.500.000 |
| | Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. III | 1 org | 500.000 |
| | Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. IV | 1 org | 350.000 |
| B. | Kegiatan Diklat Prajabatan , Diklat Pimpinan, Diklat Teknis, dan Fungsional | | |
| 1. | Honor Widyaiswara/ Narasumber | | |
| | a. Widyaiswara Pusat | Org/Keg | 2.400.000 |
| | b. Widyaiswara Provinsi | OJP | 150.000 |
| | c. Widyaiswara Daerah | OJP | 100.000 |
| | d. Honor Narasumber Seminar | Org/Keg | 1.100.000 |
| | e. Honor Narasumber Seminar Lokus OL | Org/Keg | 600.000 |
| 2. | Honor Pembimbing Diskusi | Org/Keg | 250.000 |
| 3. | Honor Pelatih Upacara Pembukaan/Penutup | Org/Keg | 200.000 |
| 4. | Honor Petugas Kelas | | |
| | a. Petugas Piket | Org/hari | 100.000 |
| | b. Petugas / Pengamat Kelas | Org/hari | 50.000 |
| 5. | Honor Pengawasan/Pengendalian (Diklat PIM) | Paket | 3.400.000 |
| 6. | Honor Fasilitator Out Bond | Org/Keg | 2.000.000 |
| 7. | Honorarium Pendamping Out Bond | Org/Keg | 750.000 |
| 8. | Honorarium Pelayanan Tindak Medik | | |
| | a. Honor Petugas | | |
| | - Diklat Teknis/Fungsional < 6 hari | Paket | 400.000 |
| | - Diklat Teknis/Fungsional 7 - 14 hari | Paket | 600.000 |
| | - Diklat Kepemimpinan Tk. IV | Paket | 1.500.000 |
| | - Diklat Kepemimpinan Tk. III | Paket | 1.500.000 |
| | - Diklat Prajabatan Gol III | Paket | 1.000.000 |
| | - Diklat Prajabatan Gol I dan II | Paket | 800.000 |

| | | | |
|-----------|---|---------|-----------|
| | b. Pengadaan Obat-obatan | | |
| | - Diklat Teknis / Fungsional < 6 hari | Paket | 400.000 |
| | - Diklat Teknis/ Fungsional 7 – 14 hari | Paket | 600.000 |
| | - Diklat Kepemimpinan Tk. IV | Paket | 1.500.000 |
| | - Diklat Kepemimpinan Tk. III | Paket | 1.500.000 |
| | - Diklat Prajabatan Gol III | Paket | 1.000.000 |
| | - Diklat Prajabatan Gol I dan II | Paket | 800.000 |
| 9. | Honor Pengawas Ujian | | |
| | a. Pengawas Ujian Pusat | Paket | 1.000.000 |
| | b. Pengawas Ujian Daerah | Paket | 600.000 |
| 10. | Biaya Transportasi | | |
| | Penggantian transport untuk narasumber | | |
| | 0 – 60 Km | | 100.000 |
| | 60-150 Km | | 200.000 |
| | >150 km | | 300.000 |
| 11. | Biaya akomodasi dan konsumsi | | |
| | a. Narasumber | OH | 400.000 |
| | b. Panitia dan Peserta | OH | 300.000 |
| 12. | Bantuan Biaya Diklat PIM | | |
| | a. Pendidikan Diklat PIM II | | |
| | - Bantuan Biaya Pelaksanaan OL | 1 orang | 3.000.000 |
| | - Bantuan Kertas Kerja Perorangan (KKP) | 1 orang | 1.500.000 |
| | - Bantuan Kontribusi P3KI | 1 orang | 2.500.000 |
| | b. Pendidikan Diklat PIM III | | |
| | - Bantuan Biaya Pelaksanaan OL | 1 orang | 2.000.000 |
| | - Bantuan Kertas Kerja Perorangan(KKP) | 1 orang | 1.000.000 |
| | - Bantuan Kontribusi P3KI | 1 orang | 2.500.000 |
| | c. Kegiatan Pendidikan Diklat PIM IV | | |
| | - Bantuan Biaya Pelaksanaan OL | 1 orang | 1.000.000 |
| | - Bantuan Kertas Kerja Perorangan(KKP) | 1 orang | 500.000 |
| | Honor Instruktur Senam Per Angkatan | Paket | 1.000.000 |
| C. | Kegiatan OL | | |
| 1 | Bantuan untuk Pemda Lokasi OL | Paket | 1.000.000 |
| 2 | Bantuan untuk lokus/instansi terkait | Paket | 250.000 |
| | KETERANGAN : | | |
| | OH = Orang per Hari | | |
| | OK = Orang per Kegiatan | | |
| | OJP = Orang per jam Pelajaran | | |

2. DIKLAT TEKHNIS FUNGSIONAL PNS /SOSIALISASI/BINTEK

| | | | |
|----|--|-----|---------|
| 1. | Honor Narasumber/ Widyaiswara/ Praktisi/ Pakar/ Pejabat | | |
| | a. Pusat | OJP | 750.000 |
| | b. Provinsi | OJP | 500.000 |
| | c. Kabupaten | OJP | 300.000 |
| 2. | Biaya Transportasi | | |
| | Penggantian Premium untuk Narasumber | | |
| | a. 0 – 60 Km | | 100.000 |
| | b. 60 – 150 Km | | 200.000 |

| | | | |
|----|--|-------------|-----------|
| | c. 150 Km ke atas | | 300.000 |
| | d. Penggantian Tiket pesawat narasumber | Orang/Tiket | At Cost |
| 3. | Penggantian Diktat/ bahan ajar | Makalah | 100.000 |
| 4. | Biaya Akomodasi dan Konsumsi | OH | 400.000 |
| 5. | Uang Saku Peserta | OH | 50.000 |
| 6. | Honor Instruktur Senam Per Angkatan | Paket | 1.000.000 |

Keterangan :

- Untuk Kegiatan Kerjasama dengan instansi vertical mengacu kepada standar biaya instansi tersebut

3. Diklat/ Penyuluhan/ Sosialisasi Keterampilan untuk masyarakat

| | | | |
|-----|---|--------------|-----------|
| 1. | Honor Narasumber/ Widyaiswara/ Praktisi/ Pakar/ Pejabat | | |
| | a. Pusat | | |
| | -Eselon I | OJP | 750.000 |
| | -Eselon II | OJP | 500.000 |
| | -Eselon III kebawah | OJP | 300.000 |
| | -Pakar/praktisi/Pembicara Khusus Non Eselon | OJP | 750.000 |
| | b. Provinsi/Kabupaten | | |
| | -Eselon I | OJP | 500.000 |
| | -Eselon II | OJP | 350.000 |
| | -Eselon III kebawah | OJP | 250.000 |
| | -Pakar/praktisi/Pembicara Khusus non eselon | OJP | 500.000 |
| 2. | Biaya Transportasi | | |
| | Penggantian Premium untuk Narasumber | | |
| | a. 0 – 60 Km | | 100.000 |
| | b. 60 – 150 Km | | 200.000 |
| | c. 150 Km ke atas | | 300.000 |
| | d. Penggantian Tiket pesawat narasumber | Orang/ tiket | At cost |
| 3. | Penggantian Diktat/ bahan ajar | Permakalah | 100.000 |
| 4. | Biaya Akomodasi dan Konsumsi | | |
| | a. Narasumber pusat | OH | 400.000 |
| | b. Peserta dan panitia | OH | 300.000 |
| 5. | Biaya Sewa Kendaraan Observasi Lapangan (Bus AC 40 seat) | | |
| | a. Dalam Propinsi | Unit/ Hari | 1.600.000 |
| | b. Luar Propinsi | Unit/ Hari | 2.000.000 |
| 6. | Uang Saku Peserta | OH | 50.000 |
| 7. | Uang Transport Peserta | OK | 50.000 |
| 8. | Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama | OK | 50.000 |
| 9. | Honor Pembawa Acara/ MC | OK | 50.000 |
| 10. | Honor Instruktur Pembinaan fisik | OH | 250.000 |

F. BIAYA RAPAT/SIDANG

1. BIDANG PENGEMBANGAN

| No. | URAIAN | SATUAN | STANDAR |
|-----------|---|------------|-----------|
| A. | UANG SIDANG/ RAPAT TIM BAPERJAKAT: | | |
| 1. | Honor Tim | | |
| | - Ketua | Org/Sidang | 1.000.000 |
| | - Anggota | Org/Sidang | 850.000 |
| | - Sekretaris Bukan Anggota | Org/Sidang | 500.000 |

| | | | |
|---|--|-----------------|-----------|
| 2. | Honor Sekretariat Tim | | |
| | - Koordinator | Org/Sidang | 250.000 |
| | - Anggota | Org/Sidang | 200.000 |
| B. UANG SIDANG/ RAPAT TIM MAJELIS PERTIMBANGAN PEGAWAI (MPP) | | | |
| 1. | Honor Tim | | |
| | - Pembina | Org/Sidang | 1.000.000 |
| | - Wakil Pembina | Org/Sidang | 900.000 |
| | - Ketua | Org/Sidang | 800.000 |
| | - Anggota | Org/Sidang | 750.000 |
| | - Sekretaris Bukan Anggota | Org/Sidang | 500.000 |
| 2. | Honor Sekretariat Tim | | |
| | - Koordinator | Org/Sidang | 250.000 |
| | - Wakil Koordinator | Org/Sidang | 200.000 |
| | - Anggota | Org/Sidang | 150.000 |
| 3. | Honor Tim Verifikasi Tenaga Honor Daerah/Kontrak | | |
| | - Ketua | Orang/ Kegiatan | 750.000 |
| | - Wakil Ketua | Orang/ Kegiatan | 600.000 |
| | - Sekretaris | Orang/ Kegiatan | 500.000 |
| | - Anggota | Orang/ Kegiatan | 400.000 |
| | - Sekretariat | Orang/ Kegiatan | 250.000 |

2. TUGAS BELAJAR

a. Tunjangan Tugas Belajar (TTB)

- Program D3 & D4 sebesar Rp. 250.000,- / Bulan
- Program S1 sebesar Rp. 500.000,- / Bulan
- Program S2 sebesar Rp. 750.000,- / Bulan
- Program S3 sebesar Rp. 1.000.000,- / Bulan (reguler)

b. Tunjangan Buku (TB)

- Program D3 & D4 sebesar Rp. 400.000,- / Semester
- Program S1 sebesar Rp. 500.000,- / Semester
- Program S2 sebesar Rp. 1.000.000,- / Semester
- Dokter Spesialis sebesar Rp. 1.500.000,-/Semester

c. Bantuan Penelitian/ Penulisan Skripsi, Laporan akhir

- Program D3 & D4 sebesar Rp. 500.000,-
- Program S1 sebesar Rp. 1.000.000,-
- Program S2 sebesar Rp. 1.500.000,-
- Dokter Spesialis sebesar Rp. 2.000.000,-

d. Bantuan pemberangkatan Peserta Tugas Belajar yang bukan dibiayai oleh Pemerintah daerah diberikan bantuan Secara Lumsum sebesar Rp. 5.000.000,-

3. HADIAH UNTUK PEGAWAI TELADAN

Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan Golongan I

- Juara I : Tabanas Rp. 1.250.000,-
- II : Tabanas Rp. 1.100.000,-
- III : Tabanas Rp. 900.000,-
- IV : Tabanas Rp. 750.000,-

**4. HADIAH UNTUK MASYARAKAT BERPRESTASI DIATUR DENGAN KEPUTUSAN
BUPATI TERSENDIRI**

G. HONORARIUM PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

| No. | Kegiatan | jumlah | Satuan |
|-----|--|-------------|-----------------|
| 1. | Jasa Dokter jaga | Rp. 125.000 | orang/ shift |
| 2. | Jasa Perawat kontrol pengawas | Rp. 75.000 | orang/ shift |
| 3. | Jasa Rujukan Spesialis ke Rumah Sakit | Rp. 750.000 | / kunjungan |
| 4. | Jasa Petugas Penyemprot/ Fogging Focus penyakit Demam Berdarah | Rp. 50.000 | orang/ hari |
| 5. | Bantuan biaya Transportasi untuk Dokter Tamu yang melakukan rawatan. | Rp. 500.000 | orang/ kali |
| 6. | Bantuan BBM untuk Dokter Tamu | 30 liter | / kali datang |
| 7. | Honor dokter hari libur | Rp. 175.000 | /Sift |
| 8. | Honor Petugas Pengawas | Rp. 125.000 | /Sift |
| | Jasa petugas pengantar pasien kurang mampu: | | |
| | - Perawat | Rp. 125.000 | Orang/Bulan |
| | - Sopir | Rp. 100.000 | Orang/Bulan |
| 9. | Kunjungan dokter spesialis ke puskesmas | Rp. 500.000 | Orang/kunjungan |

H. HONORARIUM KHUSUS PADA SEKRETARIAT DAERAH

1. Jasa Hukum

- a. Biaya Pengkajian Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Rp. 125.000,- /orang / satu kali sidang/rapat.
- b. Biaya dalam penanganan perkara dalam persidangan di Pengadilan Rp. 250.000,-/ orang/ satu kali sidang.
- c. Biaya Pembahasan Perkara gugatan dalam rangka penyusunan Eksepsi, Duplik, Pembuktian , kesimpulan dan memori banding Rp. 150.000,- /orang / sidang.
- d. Biaya Persidangan setempat Rp. 1.500.000,-/sidang.
- e. Pelaksanaan Kerja sama Hukum Antara Pemerintah dengan Pihak Pengacara Negara dan Pengacara Profesional akan diatur tersendiri dengan keputusan Bupati.
- f. Biaya Saksi Rp. 100.000,-/Orang
- g. Biaya Pengambilan Keputusan di Pengadilan Negeri dan PTUN Rp. 400.000,- / Kasus
- h. Biaya Pengajuan Banding / kasasi Rp. 1.000.000,- / kasus
- i. Jasa Pembuatan Naskah Akademik Ranperda Rp. 6.000.000,- / Ranperda

2. Bagian Pemerintahan/pertanahan

1. Biaya honor tim penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) diatur tersendiri dalam keputusan Bupati.
2. Biaya honorarium Panitia Pengadaan Tanah

| No | Uraian | Satuan | Besaran Honor |
|----|--------------------------------|--------|-----------------|
| 1. | Ganti rugi Tanah s.d 10 Miliar | | |
| | Ketua | Paket | Rp. 1.000.000,- |
| | Wakil Ketua | Paket | Rp. 900.000,- |

| | | | |
|----|---|-------|-----------------|
| | Sekretaris | Paket | Rp. 800.000,- |
| | Anggota | Paket | Rp. 700.000,- |
| | Sekretariat | Paket | Rp. 450.000,- |
| | Satgas | Paket | Rp. 450.000,- |
| 2 | Ganti rugi Tanah 10 Miliar s.d 50 Miliar | | |
| | Ketua | Paket | Rp. 1.500.000,- |
| | Wakil Ketua | Paket | Rp. 1.300.000,- |
| | Sekretaris | Paket | Rp. 1.200.000,- |
| | Anggota | Paket | Rp. 1.000.000,- |
| | Sekretariat | Paket | Rp. 450.000,- |
| | Satgas | Paket | Rp. 450.000,- |
| 3. | Ganti rugi Tanah 50 Miliar | | |
| | Ketua | Paket | Rp. 2.400.000,- |
| | Wakil Ketua | Paket | Rp. 2.000.000,- |
| | Sekretaris | Paket | Rp. 1.800.000,- |
| | Anggota | Paket | Rp. 1.500.000,- |
| | Sekretariat | Paket | Rp. 450.000,- |
| | Satgas | Paket | Rp. 450.000,- |

Keterangan:

1. Sekretariat paling banyak 4 (empat) orang
2. Satgas ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengadaan tanah

I. Penetapan Standar biaya pengamanan pada Dinas Kehutanan, Dinas kelautan dan Perikanan, Satpol PP, diatur dengan Surat Keputusan Bupati tersendiri.

J. BIAYA KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

1. Biaya Sidang TAPD dalam rangka pembahasan APBD, TPTGR, Tim Penghapusan Asset

| Uraian | Honor / Sidang |
|----------------|----------------|
| 1. Ketua | 200.000,- |
| 2. Wakil Ketua | 150.000,- |
| 3. Sekretaris | 125.000,- |
| 4. Anggota | 100.000,- |
| 5. Sekretariat | 75.000,- |

*Pembayaran berdasarkan kehadiran

2. Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah diatur didalam Keputusan Bupati.
3. Honor Tim penyusun Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Laporan Semester diatur didalam Keputusan Bupati tersendiri.
4. Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi kerja pada DPKAD selaku PPKD dan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Perizinan Terpadu diatur dalam Surat Keputusan Bupati tersendiri
5. Honor Tim Peneliti dan Penyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) diatur dalam Keputusan Bupati tersendiri

6. Honor Tim KUA-PPAS diatur didalam Keputusan Bupati tersendiri.
7. Honor Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Daerah diatur dalam keputusan bupati tersendiri.

K. BIAYA HONORARIUM

| No | URAIAN | SATUAN | HARGA | KET |
|----|---|---------------|-----------|-----|
| I | HONOR PENANGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN | | | |
| | 1. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN | | | |
| | a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 Juta | Orang / bulan | 360.000 | |
| | b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta | Orang / bulan | 450.000 | |
| | c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta | Orang / bulan | 550.000 | |
| | d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar | Orang / bulan | 600.000 | |
| | e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar | Orang / bulan | 800.000 | |
| | f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar | Orang / bulan | 850.000 | |
| | g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar | Orang / bulan | 900.000 | |
| | h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar | Orang / bulan | 1.250.000 | |
| | i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar | Orang / bulan | 1.500.000 | |
| | j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar | Orang / bulan | 1.700.000 | |
| | k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar | Orang / bulan | 2.000.000 | |
| | l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar | Orang / bulan | 2.450.000 | |
| | m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar | Orang / bulan | 2.800.000 | |
| | n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar | Orang / bulan | 3.200.000 | |
| | o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 triliun | Orang / bulan | 3.500.000 | |
| | p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun | Orang / bulan | 4.100.000 | |
| | 2. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN | | | |
| | a. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta | Orang / bulan | 260.000 | |
| | b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta | Orang / bulan | 300.000 | |
| | c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta | Orang / bulan | 350.000 | |
| | d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar | Orang / bulan | 450.000 | |
| | e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar | Orang / bulan | 550.000 | |
| | f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar | Orang / bulan | 600.000 | |
| | g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar | Orang / bulan | 650.000 | |
| | h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar | Orang / bulan | 900.000 | |
| | i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar | Orang / bulan | 1.050.000 | |
| | j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar | Orang / bulan | 1.200.000 | |
| | k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar | Orang / bulan | 1.400.000 | |
| | l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar | Orang / bulan | 1.700.000 | |
| | m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar | Orang / bulan | 2.000.000 | |
| | n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar | Orang / bulan | 2.250.000 | |
| | o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 triliun | Orang / bulan | 2.500.000 | |
| | p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun | Orang / bulan | 2.900.000 | |
| | 3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN | | | |
| | a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta | Orang / bulan | 150.000 | |
| | b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta | Orang / bulan | 200.000 | |
| | c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta | Orang / bulan | 225.000 | |
| | d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta | Orang / bulan | 250.000 | |
| | e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar | Orang / bulan | 275.000 | |
| | f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar | Orang / bulan | 300.000 | |
| | g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar | Orang / bulan | 325.000 | |
| | h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar | Orang / bulan | 350.000 | |
| | i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar | Orang / bulan | 400.000 | |
| | j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas | Orang / bulan | 450.000 | |
| | 4. PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM | | | |
| | a. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta | Orang / bulan | 285.000 | |
| | b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta | Orang / bulan | 350.000 | |
| | c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta | Orang / bulan | 400.000 | |
| | d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar | Orang / bulan | 475.000 | |
| | e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar | Orang / bulan | 600.000 | |
| | f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar | Orang / bulan | 650.000 | |
| | g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar | Orang / bulan | 700.000 | |
| | h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar | Orang / bulan | 1.000.000 | |
| | i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar | Orang / bulan | 1.200.000 | |
| | j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar | Orang / bulan | 1.400.000 | |
| | k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar | Orang / bulan | 1.550.000 | |
| | l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar | Orang / bulan | 1.900.000 | |
| | m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar | Orang / bulan | 2.200.000 | |
| | | Orang / bulan | 2.500.000 | |

| | | | | |
|---|--|---------------|-----------|--|
| n. | Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar | Orang / bulan | 2.800.000 | |
| o. | Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 triliun | Orang / bulan | 3.300.000 | |
| p. | Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun | | | |
| 5. BENDAHARA PENGELUARAN/ PEMEGANG UANG MUKA CABANG (BPUMC) | | Orang / bulan | 260.000 | |
| a. | Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta | Orang / bulan | 300.000 | |
| b. | Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta | Orang / bulan | 350.000 | |
| c. | Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta | Orang / bulan | 450.000 | |
| d. | Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar | Orang / bulan | 550.000 | |
| e. | Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar | Orang / bulan | 600.000 | |
| f. | Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar | Orang / bulan | 650.000 | |
| g. | Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar | Orang / bulan | 900.000 | |
| h. | Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar | Orang / bulan | 1.050.000 | |
| i. | Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar | Orang / bulan | 1.200.000 | |
| j. | Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar | Orang / bulan | 1.400.000 | |
| k. | Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar | Orang / bulan | 1.700.000 | |
| l. | Nilai pagu dana diatas Rp.100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar | Orang / bulan | 2.000.000 | |
| m. | Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar | Orang / bulan | 2.250.000 | |
| n. | Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar | Orang / bulan | 2.500.000 | |
| o. | Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 triliun | Orang / bulan | 2.900.000 | |
| p. | Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun | | | |
| 6. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN | | Orang / bulan | 250.000 | |
| a. | Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta | Orang / bulan | 250.000 | |
| b. | Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta | Orang / bulan | 300.000 | |
| c. | Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta | Orang / bulan | 350.000 | |
| d. | Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta | Orang / bulan | 375.000 | |
| e. | Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar | Orang / bulan | 400.000 | |
| f. | Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar | Orang / bulan | 425.000 | |
| g. | Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar | Orang / bulan | 450.000 | |
| h. | Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar | Orang / bulan | 450.000 | |
| i. | Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar | Orang / bulan | 475.000 | |
| j. | Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas | | | |
| 7. BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN | | Orang / bulan | 100.000 | |
| a. | Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta | Orang / bulan | 125.000 | |
| b. | Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta | Orang / bulan | 150.000 | |
| c. | Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta | Orang / bulan | 175.000 | |
| d. | Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta | Orang / bulan | 200.000 | |
| e. | Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar | Orang / bulan | 225.000 | |
| f. | Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar | Orang / bulan | 250.000 | |
| g. | Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar | Orang / bulan | 250.000 | |
| h. | Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar | Orang / bulan | 275.000 | |
| i. | Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar | Orang / bulan | 300.000 | |
| j. | Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas | Orang / bulan | 325.000 | |
| 8. PEMBANTU BENDAHARA | | Orang / bulan | 75.000 | |
| a. | Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta | Orang / bulan | 100.000 | |
| b. | Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta | Orang / bulan | 125.000 | |
| c. | Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta | Orang / bulan | 150.000 | |
| d. | Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta | Orang / bulan | 175.000 | |
| e. | Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar | Orang / bulan | 200.000 | |
| f. | Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar | Orang / bulan | 225.000 | |
| g. | Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar | Orang / bulan | 225.000 | |
| h. | Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar | Orang / bulan | 250.000 | |
| i. | Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar | Orang / bulan | 275.000 | |
| j. | Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas | Orang / bulan | 300.000 | |
| 9. PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG | | Orang / bulan | 200.000 | |
| a. | Nilai pagu dana s/d Rp. 50.000.000 | Orang / bulan | 225.000 | |
| b. | Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta | Orang / bulan | 275.000 | |
| c. | Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta | Orang / bulan | 300.000 | |
| d. | Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta | Orang / bulan | 325.000 | |
| e. | Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar | Orang / bulan | 350.000 | |
| f. | Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar | Orang / bulan | 375.000 | |
| g. | Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar | Orang / bulan | 400.000 | |
| h. | Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar | Orang / bulan | 425.000 | |
| i. | Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar | Orang / bulan | 450.000 | |
| j. | Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas | | | |
| 10. PEMBANTU PENGURUS BARANG DAN PENYIMPAN BARANG/PENYIMPAN MEDIA SETORAN PAJAK DAN RETRIBUSI | | Orang / bulan | 200.000 | |
| 11. PENGURUS BARANG TINGKAT SEKOLAH/PUSKESMAS/UPTD | | Orang / bulan | 100.000 | |

Catatan :

- a. Pada KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen jumlah staf maksimum 5 orang.
- b. Pada KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa Pejabat Pembuat Komitmen jumlah staf pengelola keuangan maksimum 2 orang pada KPA dan masing-masing 2 orang pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen.
- c. Jumlah maks. honorarium seluruh Pejabat/Pegawai pengelola Keuangan setahun tidak boleh melampaui 10% dari pagu.

| II | HONOR PEJABAT/ PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA/UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) | | | |
|-----|---|--------------|---------|--------------|
| | 1. PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA Pejabat pengadaan untuk pengadaan diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta maksimum 1 orang | Orang/ bulan | 200.000 | |
| | 2. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI) | | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.200 Juta | Orang/ paket | 450.000 | Maks 3 orang |
| | b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200 Juta s/d Rp. 500 Juta | Orang/ paket | 525.000 | Maks 3 orang |
| | c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar | Orang/ paket | 600.000 | Maks 3 orang |
| | d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar | Orang/ paket | 675.000 | Maks 5 orang |
| | e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar | Orang/ paket | 750.000 | Maks 5 orang |
| | f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar | Orang/ paket | 825.000 | Maks 5 orang |
| | g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 Miliar Ke atas | Orang/ paket | 975.000 | Maks 7 orang |
| | 3. PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONTRUKSI) | | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.200 Juta | Orang/ paket | 280.000 | Maks 3 orang |
| | b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200 Juta s/d Rp. 500 Juta | Orang/ paket | 390.000 | Maks 3 orang |
| | c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar | Orang/ paket | 450.000 | Maks 3 orang |
| | d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar | Orang/ paket | 500.000 | Maks 5 orang |
| | e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar | Orang/ paket | 550.000 | Maks 5 orang |
| | f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar | Orang/ paket | 620.000 | Maks 5 orang |
| | g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 Miliar Keatas | Orang/ paket | 725.000 | Maks 7 orang |
| | 4. PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI) | | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp.100 Juta | Orang/ paket | 225.000 | Maks 3 orang |
| | b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta | Orang/ paket | 250.000 | Maks 3 orang |
| | c. Nilai pagu pengadaan jasa Lainnya s/d 250 Juta | Orang/ paket | 280.000 | Maks 3 orang |
| | d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta | Orang/ paket | 390.000 | Maks 3 orang |
| | e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Milyar | Orang/ paket | 450.000 | Maks 3 orang |
| | f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2.5 Milyar | Orang/ paket | 500.000 | Maks 5 orang |
| | g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.2.5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar | Orang/ paket | 550.000 | Maks 5 orang |
| | h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar | Orang/ paket | 620.000 | Maks 5 orang |
| | i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.10 Milyar ke atas | Orang/ paket | 725.000 | Maks 7 orang |
| | 5. PENGAWAS LAPANGAN FISIK | | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp.200 Juta | Orang/ bulan | 280.000 | |
| | b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200 Juta s/d Rp. 250 Juta | Orang/ bulan | 350.000 | |
| | c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta | Orang/ bulan | 390.000 | |
| | d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Miliar | Orang/ bulan | 450.000 | |
| | e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar | Orang/ bulan | 500.000 | |
| | f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar | Orang/ bulan | 550.000 | |
| | g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar | Orang/ bulan | 620.000 | |
| | h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 Miliar Keatas | Orang/ bulan | 725.000 | |
| III | HONORARIUM PEJABAT/ PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN | | | |
| | 1. PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA | Orang/ Bulan | 200.000 | |
| | 2. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA | | | |
| | a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s/d 200 Juta | Orang/ paket | 280.000 | |
| | b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.200 Juta s/d Rp. 500 Juta | Orang/ paket | 390.000 | |
| | c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Milyar | Orang/ paket | 450.000 | |
| | d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2.5 Milyar | Orang/ paket | 500.000 | |
| | e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.2.5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar | Orang/ paket | 550.000 | |
| | f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar | Orang/ paket | 620.000 | |
| | g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 10 Milyar di atas | Orang/ paket | 725.000 | |
| IV | HONOR PENGELOLA PNBP | | | |
| | 1. ATASAN LANGSUNG BENDAHARA | | | |
| | a. Nilai Penerimaan s/d Rp. 200 Juta | Orang/ bulan | 450.000 | |
| | b. Nilai Penerimaan Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta | Orang/ bulan | 550.000 | |
| | c. Nilai Penerimaan Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar | Orang/ bulan | 600.000 | |
| | d. Nilai Penerimaan Rp. 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar | Orang/ bulan | 700.000 | |
| | e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 Miliar | Orang/ bulan | 800.000 | |

| | | | | |
|--|--|---------------|---------|--|
| | 2. BENDAHARA | | | |
| | a. Nilai Penerimaan s/d Rp. 200 Juta | Orang/ bulan | 300.000 | |
| | b. Nilai Penerimaan Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta | Orang/ bulan | 400.000 | |
| | c. Nilai Penerimaan Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar | Orang/ bulan | 500.000 | |
| | d. Nilai Penerimaan Rp. 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar | Orang/ bulan | 600.000 | |
| | e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 Miliar | Orang/ bulan | 700.000 | |
| | 3. SEKRETARIAT/ ANGGOTA | | | |
| | Sekretariat/ anggota maksimum 5 orang | Orang/ bulan | 200.000 | |
| Catatan : | | | | |
| Alokasi dana untuk honorarium seluruh pengelolaan PNPB setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PNPB masing-masing Satuan Kerja. | | | | |
| V | HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN | | | |
| | 1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah | | | |
| | a. Pengarah | Orang/ paket | 750.000 | |
| | b. Wakil Pengarah | Orang/ paket | 700.000 | |
| | c. Penanggung jawab | Orang/ paket | 600.000 | |
| | d. Koordinator | Orang/ paket | 500.000 | |
| | e. Ketua/Wakil Ketua | Orang/ paket | 400.000 | |
| | f. Sekretaris | Orang/ paket | 350.000 | |
| | g. Anggota | Orang/ paket | 300.000 | |
| | h. Sekretariat | Orang/ paket | 200.000 | |
| Catatan : | | | | |
| - Pembentukan tim dilaksanakan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan bersifat lintas sektoral. | | | | |
| - Yang dibolehkan masuk tim adalah PNS dan Honor Daerah | | | | |
| VI | HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT | | | |
| | 1. Penanggungjawab/ Pembina | Orang/ keg | 400.000 | |
| | 2. Ketua/ Wakil Ketua | Orang/ keg | 300.000 | |
| | 3. Sekretaris | Orang/ keg | 250.000 | |
| | 4. Anggota | Orang/ keg | 200.000 | |
| VII | HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL | | | |
| | 1. Penanggungjawab | Orang/ bulan | 400.000 | |
| | 2. Redaktur | Orang/ bulan | 300.000 | |
| | 3. Penyunting/ Editor | Orang/ bulan | 250.000 | |
| | 4. Redaktur Pelaksana | Orang/ bulan | 200.000 | |
| | 5. Sekretariat | Orang/ bulan | 150.000 | |
| | 6. Pembuat artikel | Orang/ bulan | 75.000 | |
| VIII | HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH | | | |
| | 1. Penanggungjawab | Orang/ bulan | 300.000 | |
| | 2. Redaktur | Orang/ bulan | 250.000 | |
| | 3. Penyunting/ Editor | Orang/ bulan | 200.000 | |
| | 4. Redaktur Pelaksana | Orang/ bulan | 150.000 | |
| | 5. Sekretariat | Orang/ bulan | 100.000 | |
| | 6. Pembuat artikel | Orang/ bulan | 50.000 | |
| IX | UANG SIDANG/ RAPAT PANITIA/ TIM | | | |
| | 1. Golongan I & II | Orang/ Sidang | 50.000 | |
| | 2. Golongan III | Orang/ Sidang | 60.000 | |
| | 3. Golongan IV | Orang/ Sidang | 75.000 | |
| | Honor Muspida diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Daerah. | | | |
| Catatan : | | | | |
| • Sidang sebanyak-banyaknya 2 x sidang sehari | | | | |
| • Sidang ditetapkan dengan Surat Tugas dan dilengkapi dengan daftar hadir | | | | |

L. BIAYA PELAKSANAAN UAS , UAN

| NO | URAIAN | SATUAN | STANDAR |
|----|------------------------------------|----------------------|-------------|
| 1. | Honorarium Pembuat Soal (UAN) | Org / Mata Pelajaran | Rp. 150.000 |
| 2. | Honorarium Pendamping Pembuat Soal | Org / Mata Pelajaran | Rp. 150.000 |
| 3. | Honorarium Editing Soal | Org / Mata Pelajaran | Rp. 150.000 |
| 5. | Panitia Rayon (UPTD) | | |
| | - Ketua | Org / keg | Rp. 450.000 |
| | - Sekretaris | Org / keg | Rp. 400.000 |
| | - Anggota | Org / keg | Rp. 350.000 |
| 6. | Panitia Sub Rayon (Sekolah) | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | - Ketua - Sekretaris - Anggota | Org / keg Org / keg Org / keg | Rp. 400.000 Rp. 350.000 Rp. 300.000 |
| 7. | Panitia Sekolah Pelaksana - Ketua - Sekretaris - Bendahara - Anggota | Org / keg Org / keg Org / keg Org / keg | Rp. 450.000 Rp. 400.000 Rp. 350.000 Rp. 300.000 |
| 8. | Pengawas Ruang | Org / keg | Rp. 350.000 |
| 9. | Pemeriksaan Ujian Menggunakan Alat / Mesin (Scanner) | Org / Lembar | Rp. 1.000 |
| 10. | Pemeriksaan Ujian Manual | Org / hari | Rp. 75.000 |

M. PELAKSANAAN LOMBA-LOMBA DAN PENILAIAN

| NO | URAIAN | SATUAN | STANDAR BIAYA |
|----|--|--|--|
| 1. | Pelaksanaan Lomba Perorangan Tingkat Kabupaten - Honorarium Juri - Hadiah Pemenang Berupa Tabanas (Uang) • Juara I • Juara II • Juara III • Juara Harapan I • Juara Harapan II • Juara Harapan III - Hadiah Pemenang Berupa Trophy/Bingkisan, senilai • Juara I • Juara II • Juara III • Harapan I, II dan III - Bantuan Transpor Juri • Bantuan Transpor Juri dari Wilayah Kabupaten Pasaman Barat • Bantuan Transpor Juri dari Luar Wilayah Kabupaten Pasaman Barat | Orang / Hari Pemenang / lomba Pemenang / Lomba Pemenang / Lomba Pemenang / Lomba Pemenang / Lomba Pemenang / Lomba Pemenang / Lomba Pemenang / Lomba Pemenang / Lomba Pemenang / Lomba Orang / Hari PP Orang / hari PP | 200.000 750.000 500.000 300.000 250.000 200.000 100.000 250.000 200.000 150.000 100.000 35.000 150.000 |
| 2. | Pelaksanaan Lomba Per Grup Tingkat Kabupaten Pasaman Barat - Honorarium Juri - Hadiah Pemenang Berupa Tabanas (Uang) • Juara I • Juara II • Juara III • Juara harapan I • Juara Harapan II • Juara Harapan III - Hadiah Pemenang Berupa Trophy / bingkisan, Senilai • Juara I • Juara II | Orang / Hari Pemenang / Lomba Pemenang / Lomba Pemenang / Lomba Pemenang / Lomba Pemenang / Lomba Pemenang / Lomba Pemenang / Lomba Pemenang / Lomba | 200.000 2.000.000 1.500.000 750.000 500.000 400.000 300.000 400.000 300.000 |

| | | | |
|----|---|--------------|---------|
| 6. | Uang Saku Siswa | | |
| | - Dalam Kabupaten Pasaman Barat | Orang / Hari | 50.000 |
| | - Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi | Orang / Hari | 150.000 |
| | - Luar Daerah Provinsi | Orang / Hari | 300.000 |
| | - Luar Negeri | Orang / Hari | 600.000 |

Catatan : Penganggaran untuk hadiah dalam rangka perlombaan dianggarkan pada kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan lomba tersebut

N. BIAYA SEWA RUMAH

1. Untuk Pejabat struktural yang dapat diberikan bantuan sewa rumah bagi pejabat yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur dan Staf Ahli sebesar Rp. 10.000.000,-
 - b. Kepala Kantor, Direktur RSUD sebesar Rp. 8.000.000,-
 - c. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah sebesar Rp. 6.000.000,-
 - d. Dokter Spesialis sebesar Rp. 6.000.000,-
 - e. Apabila Suami Istri sama – sama menduduki jabatan sebagaimana dimaksud huruf a s/d d, dibayarkan hanya menerima salah satu Bantuan Sewa Rumah.
2. Untuk Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD besa rannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah tersendiri dengan mengacu kepada peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

O. BELANJA PEGAWAI

I. UANG JASA PENGABDIAN

| N O | URAIAN | BIAYA | |
|--------|--------------|-------|--------------|
| 1 | Golongan IV | Rp. | 12.500.000,- |
| 2 | Golongan III | Rp. | 10.000.000,- |
| 3 | Golongan II | Rp. | 8.000.000,- |
| 4 | Golongan I | Rp. | 7.500.000,- |

Keterangan

Untuk pembayaran uang jasa pengabdian dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Permohonan untuk bantuan memasuki pensiun
2. SK CPNS
3. SK Pangkat Terakhir
4. SK Jabatan Terakhir (bagi PNS yang memilki jabatan)
5. SK Penempatan Terakhir (bagi PNS yang memilki jabatan)
6. Kartu Pegawai (Karpeg)

II. BELANJA PEGAWAI NON PNS

Belanja Honorarium

❖ Pegawai Honor Daerah

| | |
|---|----------------|
| ▪ Tenaga Administrasi | Rp. 700.000 |
| ▪ Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah | Rp. 1.500.000 |
| ▪ Apoteker Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah | Rp. 1.500.000 |
| ▪ Dokter Spesialis Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah | Rp. 15.000.000 |
| ▪ Guru, Bidan & Perawat | Rp. 700.000 |
| ▪ Sopir Satpam, Petugas kebersihan kantor | Rp. 700.000 |

Keterangan :

- Pembayaran Honor hanya diberikan kepada Tenaga Honor Daerah yang ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.
- Penganggaran honor untuk pegawai honor Daerah dialokasikan pada kelompok Belanja Langsung jenis Belanja Pegawai objek Belanja Honorarium non PNS dengan rincian objek Belanja Honorarium Pegawai Honor.

III. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

A. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja :

Diberikan kepada PNS, dan besarnya sebagai berikut :

| NO. | JABATAN/ESELONERING | SATUAN | Besaran (Rp) |
|-----|--|-------------|--------------|
| 1. | Eselon II/a | ORANG/BULAN | 5.000.000,- |
| 2. | Eselon II/b/ Staf Ahli | ORANG/BULAN | 3.000.000,- |
| 3. | Eselon III/a | ORANG/BULAN | 2.000.000,- |
| 4. | Eselon III/b | ORANG/BULAN | 1.750.000,- |
| 5. | Eselon IV/a | ORANG/BULAN | 1.250.000,- |
| 6. | Eselon IV/b | ORANG/BULAN | 1.000.000,- |
| 7. | Pegawai Struktural Non Eselon Golongan III dan IV | ORANG/BULAN | 450.000,- |
| 8. | Pegawai Struktural Non Eselon Golongan I dan II | ORANG/BULAN | 350.000,- |
| 9. | Kepala SD | ORANG/BULAN | 400.000,- |
| 10. | Kepala SLTP | ORANG/BULAN | 500.000,- |
| 11. | Kepala SLTA | ORANG/BULAN | 500.000,- |
| 12. | Pengawas, Penilik | ORANG/BULAN | 500.000,- |
| 13. | Guru, Tenaga Kesehatan | ORANG/BULAN | 200.000,- |
| 14. | Khusus daerah terpencil (Kep. SD, Guru, TK, SD, Tenaga Kesehatan) | ORANG/BULAN | 500.000,- |
| 15. | Dokter PNS dan Apoteker dan Tenaga Medis lainnya yang setingkat | ORANG/BULAN | 600.000,- |
| 16. | Pegawai fungsional lainnya Golongan III dan IV | ORANG/BULAN | 400.000,- |
| 17. | Pegawai fungsional lainnya Golongan I dan II | ORANG/BULAN | 350.000,- |

B. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi :

Diberikan kepada PNS yang ditugaskan sebagai Dokter Spesialis dengan besaran sebagai berikut :

| NO. | JABATAN | SATUAN | STANDAR |
|-----|----------------------|-------------|-------------|
| 1. | Dokter Spesialis PNS | ORANG/BULAN | 7.500.000,- |

C. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja :

Diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berpotensi menanggung resiko pada keselamatan diri pribadi dengan besaran sebagai berikut :

| NO. | JABATAN | SATUAN | STANDAR |
|-----|-------------------|-------------|-----------|
| 1. | Petugas Radiologi | ORANG/BULAN | 500.000,- |

IV. LEMBUR

| NO | URAIAN | SATUAN | HARGA TA 2012 | KET |
|----|--|--|---|-----|
| 1 | Tarif uang lembur dan uang makan lembur : 1. Uang lembur (diluar jam kerja pada hari kerja) : <ul style="list-style-type: none">• PNS<ul style="list-style-type: none">a. Golongan Ib. Golongan IIc. Golongan IIId. Golongan IV• Honor Daerah/ PTT• Tenaga Kontrak | Orang/jam Orang/jam Orang/jam Orang/jam Orang/jam Orang/jam | 9.000,- 10.000,- 12.500,- 15.000,- 9.000,- 9.000,- | |
| | 2. Uang makan lembur : Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut | Orang | 18.000,- | |

Keterangan :

1. Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas.
2. Pejabat dan pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir jam masuk kerja lembur dan jam pulang kerja lembur.
3. Lembur dapat dibayarkan bila bekerja lebih dari 2 (dua) jam diluar jam kerja dan maksimal 3 (tiga) jam dalam sehari. Maksimal 14 (empat belas) jam dalam seminggu.
4. Terhadap pegawai yang ditugaskan di luar hari kerja (Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya) dihitung 200% dari tarif lembur). Maksimal 5 (lima) jam per hari, dengan ketentuan uang makan tidak dibayarkan.

V. UANG DUKA / WAFAT / TEWAS

| NO | URAIAN | PNS | Honor Daerah |
|----|--|------------------|-----------------|
| 1. | Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan diluar kabupaten | Rp. 15.000.000,- | Rp. 5.000.000,- |
| 2. | Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan didalam kabupaten | Rp. 6.000.000,- | Rp. 3.000.000,- |
| 3. | Meninggal tidak dalam tugas kedinasan | Rp. 5.000.000,- | Rp. 2.500.000,- |
| 4. | Suami/ istri meninggal | Rp. 2.500.000,- | Rp. 1.000.000,- |
| 5. | Orang tua/ anak meninggal | Rp. 1.000.000,- | Rp. 500.000,- |

Keterangan

1. Untuk poin 1 dan 2 dilengkapi persyaratan sbb:
 - Surat perintah tugas pada saat kejadian
 - Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang
 - Sk penempatan terakhir
2. Poin 3 dilengkapi dengan
 - Surat keterangan kematian dari instansi terkait
3. Untuk poin 4 dan 5 dilengkapi dengan
 - Surat keterangan dari ahli waris

- Surat keterangan meninggal dari instansi terkait
- Surat permohonan dari ahli waris

VI. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR UNIT/ TAHUN

| NO | MERK KENDARAAN/CC | PEMBUATAN s/d TAHUN 2000 | PEMBUATAN DIATAS TAHUN 2000 |
|----|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | <u>Kendaraan Dinas Jabatan</u> | | |
| 1 | Nissan Terano | 17.000.000,- | 16.150.000,- |
| 2 | Toyota Land Cruiser Prado | 27.000.000,- | 25.000.000,- |
| 3 | Toyota Fortuner/Honda CRV | 27.000.000,- | 25.000.000,- |
| 4 | Mitsubishi L-300 | 14.500.000,- | 14.000.000,- |
| 5 | Toyota Kijang LSX/LGX/Krista | 14.000.000,- | 11.000.000,- |
| 6 | Toyota Avanza/ Daihatsu Xenia | 13.000.000,- | 12.500.000,- |
| 7 | Toyota Altis | 16.175.000,- | 14.175.000,- |
| 8 | Suzuki Grand Vitara | 16.175.000,- | 14.175.000,- |
| 9 | Mitsubishi Kuda | 16.500.000,- | 14.500.000,- |
| 10 | Toyota Kijang Innova | 16.500.000,- | 16.500.000,- |
| 11 | Isuzu Panther | 16.500.000,- | 14.500.000,- |
| 12 | Toyota Camry | 17.350.000,- | 16.500.000,- |
| 13 | Toyota Rush | 17.350.000,- | 14.500.000,- |
| 14 | Daihatsu Terios | 17.350.000,- | 14.500.000,- |
| | <u>Kendaraan Khusus</u> | | |
| 1 | Ambulance | 17.000.000,- | 15.500.000,- |
| 2 | Patroli/ Vorryders | 17.000.000,- | 15.500.000,- |
| 3 | Pemadam Kebakaran | 18.000.000,- | 17.000.000,- |
| 4 | Toyota Dyna Rino | 16.500.000,- | 15.500.000,- |
| 5 | Mitsubishi Colt Diesel | 17.000.000,- | 16.000.000,- |
| | <u>Kendaraan Double Gardan/Cabin</u> | | |
| 1 | Toyota Hilux | 13.000.000,- | 12.500.000,- |
| 2 | Ford | 13.000.000,- | 12.500.000,- |
| 3 | Mitsubishi Strada | 13.000.000,- | 12.500.000,- |
| 4 | Kendaraan Bermotor Roda 2(Dua) | 850.000,- | 800.000,- |

Keterangan:

Biaya Pemeliharaan diatas tidak termasuk biaya STNK dan KIR)

VII. STANDARISASI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DINAS JABATAN :

| NO | URAIAN | JENIS KENDARAAN | CC |
|----|--------------------|------------------|----------|
| 1 | Bupati | Sedan/ | 2.500 cc |
| | | Jeep | 3.200 cc |
| 2 | Wakil Bupati | Sedan | 2.000 cc |
| | | Jeep | 2.500 cc |
| 3 | Ketua DPRD | Sedan/ Minibus | 2.500 cc |
| 4 | Wakil Ketua DPRD | Sedan/ Minibus | 2.200 cc |
| 5 | Pejabat Eselon I | Sedan/ Jeep | 2.700 cc |
| 6 | Pejabat Eselon II | Sedan | |
| | | Minibus (bensin) | 2.000 cc |
| | | Minibus (Solar) | 2.500 cc |
| 7 | Pejabat Eselon III | Sedan | |
| | | Minibus (bensin) | 1.600 cc |

| | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|----------|
| | | Minibus (Solar) | 2.500 cc |
| 8 | Pejabat Eselon IV dan Eselon V | Sepeda Motor | 200 cc |

Keterangan:

Harga Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional dinas jabatan mengacu kepada Harga yang dikeluarkan oleh LKPP.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 8 November 2012

